

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia, pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar pada tahun 2019. Pencapaian target tersebut dinamai dengan “Gerakan 100-0-100”.

Guna merealisasikan target tersebut tentu diperlukan kolaborasi dan dukungan semua pihak untuk pencapaiannya. Oleh karena itu, Kabupaten Grobogan mempunyai kewajiban untuk mengambil suatu tindakan yang lebih kongkrit dengan ikut melaksanakan kebijakan nasional program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dalam upaya meningkatkan kondisi sanitasi yang lebih baik. Tahun 2016 ini, Kabupaten Grobogan menjadi salah satu Kabupaten/Kota yang terpilih untuk melaksanakan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-565/Kep/Bangda/2014. Melalui program PPSP tersebut diharapkan Kabupaten Grobogan dapat lebih meningkatkan dalam pembangunan sektor sanitasi yang dapat melibatkan seluruh stakeholder, baik Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, partisipasi swasta maupun donor serta masyarakat.

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Grobogan merupakan suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan khususnya sektor sanitasi secara komprehensif pada tingkat kabupaten yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Grobogan dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pengembangan layanan sanitasi kabupaten harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi jangka menengah (5 tahunan) yang komprehensif dan bersifat strategis. Strategi Sanitasi Kabupaten dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kabupaten. Setelah disepakati, Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (*annual action plan*). Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan (program atau proyek) pengembangan layanan sanitasi kabupaten yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya.

Kabupaten Grobogan pada tahun 2012 telah menyusun dokumen SSK sebagai acuan dasar pembangunan sektor sanitasi selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dan sebagai implementasi dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 660/4500/VI/Bangda Tanggal 26 September 2011 Perihal: Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2012. Beberapa program dan kegiatan yang ditargetkan telah diimplementasikan secara bertahap sehingga menambah cakupan layanan sanitasi kabupaten. Karena pada tahun 2016 ini sudah ada pergantian pimpinan daerah serta Kabupaten Grobogan merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional maka dokumen SSK perlu dimutakhirkan kembali untuk perencanaan lima tahun kedepan sehingga bisa memberikan gambaran yang *up to date* dan rencana implementasi program akan lebih tepat sasaran.

Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Grobogan berisi visi, misi, dan tujuan pembangunan sanitasi, berikut strategi-strategi pencapaiannya. Tiap-tiap strategi kemudian diterjemahkan menjadi berbagai usulan kegiatan berikut komponen-komponen kegiatan indikatifnya. Cakupan suatu Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) akan meliputi :

- **Aspek Teknis;** mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan sektor sanitasi yang terdiri dari (a) layanan sub sektor air limbah domestik, (b) layanan sub sektor persampahan, (c) sub sektor drainase lingkungan.
- **Aspek Pendukung;** mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen (a) Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, (b) Keuangan (c) Komunikasi, (d) Keterlibatan Pelaku Bisnis, (e) Pemberdayaan Masyarakat, aspek Jender dan Kemiskinan, (f) Monitoring dan evaluasi.

Pembangunan sanitasi di Kabupaten Grobogan juga harus diupayakan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan dukungan dari semua pihak baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sektor swasta maupun sumber pembiayaan dari donor, agar lebih efisien, efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat serta sinkron dengan program nasional, maka perlu dilakukan pemutakhiran dokumen SSK yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Kegiatan pemutakhiran dokumen SSK diharapkan dapat mengakomodasikan dan merumuskan kebutuhan pembangunan kabupaten, secara spesifik sesuai dengan karakteristik dan potensi sehingga mampu mendorong pembangunan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kabutuhan nyata. Karena merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait dengan sektor sanitasi, maka secara struktural dokumen SSK juga merupakan rujukan dari seluruh SKPD dan instansi terkait dalam penganggaran pendanaan, baik dalam tingkatan kabupaten, provinsi, pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya.

Dokumen SSK merupakan terminal dari seluruh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sektor sanitasi di tingkat kabupaten yang meliputi sub-sektor air limbah, sub-sektor persampahan, sub-sektor drainase dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). SSK disusun oleh pemerintah kabupaten,

dengan mengacu pada kondisi dan permasalahan yang ada, yang merupakan hasil suatu konsolidasi dan integrasi keluaran proses perencanaan.

Hubungan antara SSK yang disusun dan telah dimutakhirkan ini dengan dokumen perencanaan lainnya antara lain:

1. SSK Kabupaten Grobogan merupakan pelengkap dari dokumen perencanaan resmi yang ada di Kabupaten Grobogan, seperti RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.
2. SSK Kabupaten Grobogan merupakan penjabaran secara lengkap sebagian dari RPIJM tahun 2015 – 2019 khususnya dalam bidang sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase).
3. SSK Kabupaten Grobogan akan menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD untuk kepala daerah periode berikutnya (2016 – 2021).
4. Penyusunan SSK Kabupaten Grobogan mengacu pada dokumen perencanaan tata ruang wilayah (RTRW tahun 2011 – 2031) Kabupaten Grobogan, khususnya berkaitan dengan zonasi pembangunan sarana sanitasi.
5. Penyusunan SSK Kabupaten Grobogan mengacu pada dokumen RPJPD (2005 – 2025) Kabupaten Grobogan, khususnya berkaitan dengan prioritas pembangunan jangka panjang sarana sanitasi.

## 1.2. Metodologi Penyusunan

Strategi Sanitasi Kabupaten Grobogan ini disusun oleh Pokja Sanitasi secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, lokakarya dan pembekalan baik yang dilakukan oleh Tim Pokja Kabupaten Grobogan dibantu Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah dan dukungan fasilitasi dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan BAPPENAS melalui *Provincial Sanitation Development Advisor (ProSDA)* dan *City Facilitator (CF)*. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metoda dilakukan bersama-sama dengan tim Pokja Sanitasi Kabupaten melalui kegiatan lokakarya, pelatihan, diskusi dan pembekalan.

Metode penyusunan SSK ini, terdiri dari tahapan berikut :

1. Melakukan pemetaan kondisi dan kemajuan pembangunan sanitasi kabupaten saat ini. Termasuk didalamnya adalah pengumpulan dokumen perencanaan dan data teknis terkini, penetapan profil sanitasi, identifikasi permasalahan dan penetapan area berisiko sanitasi. Metoda yang digunakan adalah kajian data sekunder dan penggalian data primer melalui kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi.
2. Melakukan studi EHRA 2016 (*Environmental Health Risk Assessment*) atau Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan yaitu studi untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku – perilaku yang memiliki risiko pada kesehatan warga. Hasil ini dikaitkan dengan perkembangan kondisi saat ini.

3. Menetapkan Skenario Pembangunan Sanitasi lima tahun kedepan yang mencakup; kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi kabupaten, penetapan zona dan sistem sanitasi serta tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi kabupaten. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di kabupaten.
4. Merumuskan strategi sanitasi kabupaten yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kota jangka menengah (5 tahunan). Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman sistem sanitasi kabupaten.
5. Melakukan konsolidasi penganggaran dan pemasaran sanitasi melalui upaya; eksternalisasi kepada Pokja AMPL Provinsi, Satker, Kementerian dan Lembaga dan sumber pendanaan lainnya. Internalisasi seluruh SKPD terkait sanitasi di tingkat Kabupaten dan pemasaran sanitasi kepada *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pendanaan non pemerintah lainnya.

### 1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan strategi sanitasi kota (SSK) Kabupaten Grobogan adalah :

#### **Undang-Undang Republik Indonesia**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
11. Undang Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan



### **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Ijin Lingkungan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah.

### **Peraturan Presiden Republik Indonesia**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

### **Keputusan Presiden Republik Indonesia**

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

### **Keputusan Menteri Lingkungan Hidup**

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Penetapan Kelas Air.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu air Limbah.

### **Keputusan Menteri Kesehatan**

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876 Tahun 2001 Tentang Pedoman Teknis ADKL (Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan ).
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 Tentang Penyehatan Sarana dan bangunan umum.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).

### **Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 21/PRT/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP).
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 16/PRT/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP).
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 02/PRT/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 03/PRT/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

### **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah**

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor SE Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7).
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3).
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6).
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5).

### **Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2031.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ijin Pemanfaatan Ruang.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021.

### **Petunjuk Teknis**

1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan.
2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah.
3. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan.
4. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih.
5. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan.
6. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik.
7. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan.
8. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman.
9. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kaku.
10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi.
11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Seusai dengan pedoman pemutakhiran SSK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, susunan penulisan dokumen pemutakhiran SSK ini terdiri dari 6 (enam) bab yang meliputi:

##### **Bab-1 Pendahuluan**

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum dan sistematika penulisan.

##### **Bab-2 Profil Wilayah dan Sanitasi Saat ini**

Menjelaskan secara rinci gambaran wilayah Kabupaten Grobogan, kemajuan pelaksanaan SSK tahun 2012 – 2016 yang lalu, profil sanitasi saat ini berdasarkan hasil pengisian instrumen profil dan peta area berisiko sanitasi.

### **Bab-3 Kerangka Pengembangan Sanitasi**

Merupakan arah pengembangan sanitasi lima tahun kedepan yang mencakup; visi dan misi sanitasi Kabupaten Grobogan, pentahapan pengembangan sanitasi sesuai dengan zona dan sistem sanitasi yang direkomendasikan serta analisis kemampuan pendanaan sanitasi Kabupaten Grobogan.

### **Bab-4 Strategi Pengembangan Sanitasi**

Memuat strategi pengembangan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan darinase perkotaan berdasarkan hasil analisis SWOT.

### **Bab-5 Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi**

Menyajikan tentang ringkasan program dan anggaran, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah dan antisipasi *funding gap*.

### **Bab-6 Monitoring dan Evakuasi Capaian SSK**

Merupakan uraian tentang upaya monitoring dan evaluasi capaian SSK.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia, pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar pada tahun 2019. Pencapaian target tersebut dinamai dengan “Gerakan 100-0-100”.

Guna merealisasikan target tersebut tentu diperlukan kolaborasi dan dukungan semua pihak untuk pencapaiannya. Oleh karena itu, Kabupaten Grobogan mempunyai kewajiban untuk mengambil suatu tindakan yang lebih kongkrit dengan ikut melaksanakan kebijakan nasional program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dalam upaya meningkatkan kondisi sanitasi yang lebih baik. Tahun 2016 ini, Kabupaten Grobogan menjadi salah satu Kabupaten/Kota yang terpilih untuk melaksanakan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-565/Kep/Bangda/2014. Melalui program PPSP tersebut diharapkan Kabupaten Grobogan dapat lebih meningkatkan dalam pembangunan sektor sanitasi yang dapat melibatkan seluruh stakeholder, baik Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, partisipasi swasta maupun donor serta masyarakat.

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Grobogan merupakan suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan khususnya sektor sanitasi secara komprehensif pada tingkat kabupaten yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Grobogan dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pengembangan layanan sanitasi kabupaten harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi jangka menengah (5 tahunan) yang komprehensif dan bersifat strategis. Strategi Sanitasi Kabupaten dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kabupaten. Setelah disepakati, Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (*annual action plan*). Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan (program atau proyek) pengembangan layanan sanitasi kabupaten yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya.

Kabupaten Grobogan pada tahun 2012 telah menyusun dokumen SSK sebagai acuan dasar pembangunan sektor sanitasi selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dan sebagai implementasi dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 660/4500/VI/Bangda Tanggal 26 September 2011 Perihal: Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2012. Beberapa program dan kegiatan yang ditargetkan telah diimplementasikan secara bertahap sehingga menambah cakupan layanan sanitasi kabupaten. Karena pada tahun 2016 ini sudah ada pergantian pimpinan daerah serta Kabupaten Grobogan merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional maka dokumen SSK perlu dimutakhirkan kembali untuk perencanaan lima tahun kedepan sehingga bisa memberikan gambaran yang *up to date* dan rencana implementasi program akan lebih tepat sasaran.

Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Grobogan berisi visi, misi, dan tujuan pembangunan sanitasi, berikut strategi-strategi pencapaiannya. Tiap-tiap strategi kemudian diterjemahkan menjadi berbagai usulan kegiatan berikut komponen-komponen kegiatan indikatifnya. Cakupan suatu Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) akan meliputi :

- **Aspek Teknis;** mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan sektor sanitasi yang terdiri dari (a) layanan sub sektor air limbah domestik, (b) layanan sub sektor persampahan, (c) sub sektor drainase lingkungan.
- **Aspek Pendukung;** mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen (a) Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, (b) Keuangan (c) Komunikasi, (d) Keterlibatan Pelaku Bisnis, (e) Pemberdayaan Masyarakat, aspek Jender dan Kemiskinan, (f) Monitoring dan evaluasi.

Pembangunan sanitasi di Kabupaten Grobogan juga harus diupayakan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan dukungan dari semua pihak baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sektor swasta maupun sumber pembiayaan dari donor, agar lebih efisien, efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat serta sinkron dengan program nasional, maka perlu dilakukan pemutakhiran dokumen SSK yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Kegiatan pemutakhiran dokumen SSK diharapkan dapat mengakomodasikan dan merumuskan kebutuhan pembangunan kabupaten, secara spesifik sesuai dengan karakteristik dan potensi sehingga mampu mendorong pembangunan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kabutuhan nyata. Karena merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait dengan sektor sanitasi, maka secara struktural dokumen SSK juga merupakan rujukan dari seluruh SKPD dan instansi terkait dalam penganggaran pendanaan, baik dalam tingkatan kabupaten, provinsi, pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya.

Dokumen SSK merupakan terminal dari seluruh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sektor sanitasi di tingkat kabupaten yang meliputi sub-sektor air limbah, sub-sektor persampahan, sub-sektor drainase dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). SSK disusun oleh pemerintah kabupaten,

dengan mengacu pada kondisi dan permasalahan yang ada, yang merupakan hasil suatu konsolidasi dan integrasi keluaran proses perencanaan.

Hubungan antara SSK yang disusun dan telah dimutakhirkan ini dengan dokumen perencanaan lainnya antara lain:

1. SSK Kabupaten Grobogan merupakan pelengkap dari dokumen perencanaan resmi yang ada di Kabupaten Grobogan, seperti RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.
2. SSK Kabupaten Grobogan merupakan penjabaran secara lengkap sebagian dari RPIJM tahun 2015 – 2019 khususnya dalam bidang sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase).
3. SSK Kabupaten Grobogan akan menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD untuk kepala daerah periode berikutnya (2016 – 2021).
4. Penyusunan SSK Kabupaten Grobogan mengacu pada dokumen perencanaan tata ruang wilayah (RTRW tahun 2011 – 2031) Kabupaten Grobogan, khususnya berkaitan dengan zonasi pembangunan sarana sanitasi.
5. Penyusunan SSK Kabupaten Grobogan mengacu pada dokumen RPJPD (2005 – 2025) Kabupaten Grobogan, khususnya berkaitan dengan prioritas pembangunan jangka panjang sarana sanitasi.

## 1.2. Metodologi Penyusunan

Strategi Sanitasi Kabupaten Grobogan ini disusun oleh Pokja Sanitasi secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, lokakarya dan pembekalan baik yang dilakukan oleh Tim Pokja Kabupaten Grobogan dibantu Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah dan dukungan fasilitasi dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan BAPPENAS melalui *Provincial Sanitation Development Advisor (ProSDA)* dan *City Facilitator (CF)*. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metoda dilakukan bersama-sama dengan tim Pokja Sanitasi Kabupaten melalui kegiatan lokakarya, pelatihan, diskusi dan pembekalan.

Metode penyusunan SSK ini, terdiri dari tahapan berikut :

1. Melakukan pemetaan kondisi dan kemajuan pembangunan sanitasi kabupaten saat ini. Termasuk didalamnya adalah pengumpulan dokumen perencanaan dan data teknis terkini, penetapan profil sanitasi, identifikasi permasalahan dan penetapan area berisiko sanitasi. Metoda yang digunakan adalah kajian data sekunder dan penggalian data primer melalui kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi.
2. Melakukan studi EHRA 2016 (*Environmental Health Risk Assessment*) atau Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan yaitu studi untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku – perilaku yang memiliki risiko pada kesehatan warga. Hasil ini dikaitkan dengan perkembangan kondisi saat ini.



3. Menetapkan Skenario Pembangunan Sanitasi lima tahun kedepan yang mencakup; kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi kabupaten, penetapan zona dan sistem sanitasi serta tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi kabupaten. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di kabupaten.
4. Merumuskan strategi sanitasi kabupaten yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kota jangka menengah (5 tahunan). Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman sistem sanitasi kabupaten.
5. Melakukan konsolidasi penganggaran dan pemasaran sanitasi melalui upaya; eksternalisasi kepada Pokja AMPL Provinsi, Satker, Kementerian dan Lembaga dan sumber pendanaan lainnya. Internalisasi keseluruhan SKPD terkait sanitasi di tingkat Kabupaten dan pemasaran sanitasi kepada *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pendanaan non pemerintah lainnya.

### 1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan strategi sanitasi kota (SSK) Kabupaten Grobogan adalah :

#### **Undang-Undang Republik Indonesia**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
11. Undang Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

### **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Ijin Lingkungan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah.

### **Peraturan Presiden Republik Indonesia**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

### **Keputusan Presiden Republik Indonesia**

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

### **Keputusan Menteri Lingkungan Hidup**

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Penetapan Kelas Air.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu air Limbah.

### **Keputusan Menteri Kesehatan**

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876 Tahun 2001 Tentang Pedoman Teknis ADKL (Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan ).
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 Tentang Penyehatan Sarana dan bangunan umum.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).

### **Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 21/PRT/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP).
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 16/PRT/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP).
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 02/PRT/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 03/PRT/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

### **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah**

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor SE Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7).
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3).
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6).
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5).

### **Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2031.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ijin Pemanfaatan Ruang.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021.

### **Petunjuk Teknis**

1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan.
2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah.
3. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan.
4. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih.
5. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan.
6. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik.
7. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan.
8. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman.
9. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kaku.
10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi.
11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Seusai dengan pedoman pemutakhiran SSK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, susunan penulisan dokumen pemutakhiran SSK ini terdiri dari 6 (enam) bab yang meliputi:

##### **Bab-1 Pendahuluan**

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum dan sistematika penulisan.

##### **Bab-2 Profil Wilayah dan Sanitasi Saat ini**

Menjelaskan secara rinci gambaran wilayah Kabupaten Grobogan, kemajuan pelaksanaan SSK tahun 2012 – 2016 yang lalu, profil sanitasi saat ini berdasarkan hasil pengisian instrumen profil dan peta area berisiko sanitasi.

### **Bab-3 Kerangka Pengembangan Sanitasi**

Merupakan arah pengembangan sanitasi lima tahun kedepan yang mencakup; visi dan misi sanitasi Kabupaten Grobogan, pentahapan pengembangan sanitasi sesuai dengan zona dan sistem sanitasi yang direkomendasikan serta analisis kemampuan pendanaan sanitasi Kabupaten Grobogan.

### **Bab-4 Strategi Pengembangan Sanitasi**

Memuat strategi pengembangan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan darinase perkotaan berdasarkan hasil analisis SWOT.

### **Bab-5 Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi**

Menyajikan tentang ringkasan program dan anggaran, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah dan antisipasi *funding gap*.

### **Bab-6 Monitoring dan Evakuasi Capaian SSK**

Merupakan uraian tentang upaya monitoring dan evaluasi capaian SSK.

# BAB III

## KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

### 3.1. VISI DAN MISI SANITASI

Visi dan misi merupakan sumber inspiratif bagi pengembangan kegiatan sebuah organisasi. Visi dan misi memberikan arah yang jelas dan terukur, sehingga pada akhir periode perencanaan dapat dilakukan evaluasi terukur bagi keberhasilan sebuah program/proyek dan kegiatan. Oleh karena demikian, dalam bidang pembangunan sanitasi, Kabupaten Grobogan telah merumuskan visi dan misi sanitasi yang merupakan hasil dari kolaborasi pemikiran dari berbagai stakeholder terkait. Visi dan misi sanitasi Kabupaten Grobogan sangat erat dengan kaitannya dengan visi dan misi Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan yang sama, Pokja Sanitasi telah merumuskan tujuan, indikator dan strategi pengembangan subsektor sanitasi baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Rumusan visi misi, tujuan, sasaran dan strategi sanitasi kabupaten Grobogan telah memperhatikan isu-isu strategis yang termuat dalam dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS). Tabel di bawah ini, merupakan gambaran tentang Visi Sanitasi dan Misi persubsektor sanitasi serta Visi dan Misi Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Grobogan.

**Tabel 3.1**  
**Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Grobogan**

Visi Kab/Kota	Misi Kab/Kota	Visi Sanitasi Kabupaten Grobogan	Misi Sanitasi Kabupaten Grobogan
Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah;</li> <li>2. Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya</li> </ol>	Terwujudnya Sanitasi yang Mandiri, Berkeadilan & Berkelanjutan Menuju Masyarakat Grobogan Sehat dan Sejahtera Tahun 2017	<b>Misi Air Limbah Domestik:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memantapkan pengelolaan air limbah domestik yang aman dan berkelanjutan;</li> <li>b. Mengembangkan cakupan pelayanan air limbah domestik;</li> <li>c. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam</li> </ol>

Visi Kab/Kota	Misi Kab/Kota	Visi Sanitasi Kabupaten Grobogan	Misi Sanitasi Kabupaten Grobogan
cerdas dan lebih sejahtera	<p>pembangunan di bidang pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata;</p> <p>3. Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;</p> <p>4. Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik;</p> <p>5. Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat; dan</p> <p>6. Memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang</p>		<p>pengelolaan air limbah domestik.</p> <p><b>Misi Persampahan</b></p> <p>a. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan persampahan yang terpadu, handal serta berorientasi lingkungan;</p> <p>b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta sebagai mitra pengelolaan persampahan didukung pengembangan kelembagaan.</p> <p><b>Misi Drainase Perkotaan</b></p> <p>Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase secara menyeluruh dan terpadu dalam penanganan banjir dan genangan.</p>



Visi Kab/Kota	Misi Kab/Kota	Visi Sanitasi Kabupaten Grobogan	Misi Sanitasi Kabupaten Grobogan
	<p>mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.</p>		

## 3.2. PENTAHAPAN PENGEMBANGAN SANITASI

### 3.2.1. Tahapan Pengembangan Sanitasi

Pengembangan pengelolaan sanitasi Kabupaten Grobogan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pentahapan tersebut dimaksudkan untuk mengalokasikan secara tepat dan akurat sumber daya yang terbatas jumlahnya, baik dari segi alokasi anggaran, waktu, maupun tenaga pelaksana. Dalam pengembangan pengelolaan sanitasi, pentahapan dibagi ke dalam tahap jangka pendek (1-2 tahun), menengah (5 tahun), jangka panjang (10-15 tahun), maupun kombinasi antara 2 tahapan.

Penentuan tahapan dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah kepadatan penduduk yang mendiami desa/kelurahan, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai unit analisis terkecil dalam penetapan strategi sanitasi Kabupaten Grobogan. Kelurahan dengan kepadatan penduduk yang besar, terutama CBD membutuhkan penanganan yang lebih cepat dibanding kelurahan dengan kepadatan rendah.

Pertimbangan berikutnya dalam menentukan pentahapan adalah kondisi fisik lingkungan, terutama relief (kemiringan lereng) dan kondisi tanah. Sebagai contoh : kondisi tanah dengan relief terjal tidak dimungkinkan untuk dilakukan pembangunan saluran off-site maupun sanitasi on-site individual. Pertimbangan terhadap faktor fisik penting untuk dilakukan agar pembangunan sarana sanitasi yang dilakukan pemanfaatannya dapat optimal dalam jangka panjang.

Pertimbangan selanjutnya adalah resiko sanitasi yang dimiliki oleh desa/kelurahan tersebut. desa/Kelurahan dengan resiko sanitasi terbesar akan mendapatkan prioritas penanganan terlebih dahulu. Pertimbangan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah kesesuaian dengan rencana RTRW Kota dan RPJMD Kabupaten Grobogan yang telah disusun.

Indikator yang digunakan dalam tahapan cakupan pelayanan dalam dokumen strategi sanitasi ini adalah presentase penduduk terlayani. Diharapkan dalam jangka panjang, semua penduduk akan dapat terlayani oleh program dan kegiatan sanitasi yang dirumuskan dalam dokumen ini.

## **A. Tahapan Pengembangan Sanitasi Air Limbah**

Sesuai pembahasan Diagram Sistem Sanitasi (DSS), berdasarkan isu pokok sanitasi air limbah domestik, permasalahan mendesak sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :

- ❖ Permasalahan yang dihadapi adalah persepsi dari sebagian masyarakat bahwa sarana sanitasi air limbah belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Sebagian masyarakat Kabupaten Grobogan lebih mudah membuang limbahnya ke saluran/sungai atau karena keterbatasan ekonominya belum mampu menyediakan sarana sanitasi sendiri.
- ❖ Terbatasnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah rumah tangga, di beberapa wilayah banyak dijumpai sarana pembuangan air limbah tidak tertata atau dikelola dengan benar.
- ❖ Kurangnya ketersediaan air bersih untuk Jamban dan MCK cenderung mendorong masyarakat berperilaku kurang sehat.
- ❖ Kurangnya akses masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan dana dan modal sehingga masyarakat sering beralasan tidak memiliki biaya untuk membuat jamban.
- ❖ Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan hidup sehat. Pemahaman masyarakat mengenai keterkaitan antar kependudukan dan lingkungan hidup belum memadai, sementara berbagai kearifan tradisional yang berorientasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem sudah lama ditinggalkan karena faktor ekonomi, teknologi dan lain-lain.
- ❖ Maraknya dugaan pembuangan limbah cair dari rumah penduduk, hotel dan restoran ke badan sungai. Para pelaku usaha memilih mengambil jalan pintas membuang limbah cair ke sungai karena biaya penyedotan lumpur tinja meningkat dari biaya normal.

Berdasarkan analisis penentuan zona dan sistem sanitasi dari Instrumen Profil sanitasi Kabupaten Grobogan, diperoleh gambaran bahwa untuk penetapan zona air limbah di Kabupaten Grobogan, dalam pengelolaan sistem air limbah domestik dikategorikan dalam 3 (Tiga) tipikal sistem, yaitu :

1. SPAL-Setempat Individual
2. Sistem Komunal.
3. SPAL-Terpusat skala kawasan.

**Gambar 3.1**  
**Zona Sistem Air Limbah**

<b>Zona Air Limbah</b>						
	zona 1	Zone 2	zona 3	zona 4	zona 5	
Jumlah penduduk saat ini	: 882,461	111,858	357,153	-	-	orang
Pertumbuhan penduduk dalam zona	: 0.56%	0.52%	0.67%	0.00%	0.00%	
Persentase penduduk yang memiliki akses SPAL-S yang layak	: 85.4%	83.5%	88.2%	0.0%	0.0%	
Persentase penduduk yang memiliki akses sistem komunal (CBS)	: 0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	
Persentase penduduk yang memiliki akses SPAL-T	: 0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Luas total area terbangun	: 20,535	1,427	6,001	-	-	ha
Saran Pilihan Drop Down-Menu						
Tingkat kerapatan penduduk	: pilih 25-100 orang/ha	pilih 25-100 orang	pilih 25-100 orar			
Apakah wilayah bebas genangan/banjir?	: pilih ya	pilih tidak	pilih ya			
Apakah perkotaan akan dikembangkan (sekarang atau masa depan)?	: pilih tidak	pilih tidak	pilih ya			
Apakah saat ini daerah CBD?	: pilih tidak	pilih tidak	pilih ya			
Apakah >50% area di zona merupakan area beresiko dalam Buku Putih?	: pilih tidak	pilih tidak	pilih tidak			

Sumber : Profil sanitasi Kabupaten Grobogan, 2016

Wilayah zona 1 meliputi 197 Desa/Kel dimana diwilayah tersebut yang sudah memiliki pengelolaan limbah SPAL-Setempat Individual secara layak sebesar 85,4% dan akses sistem komunal (CBS) sebesar 0,2%. Untuk kedepan masih perlu peningkatan akses terhadap sarana pengelolaan air limbah karena hanya tiga per empat saja dari masyarakat yang saat ini sudah mendapatkan akses ke jamban sehat.

Untuk wilayah yang termasuk dalam zona 2 terdiri dari 31 Desa/Kel, dengan tingkat akses masyarakat terhadap sarana pengelolaan air limbah SPAL-Setempat Individual yang layak sebesar 83,5% dan akses terhadap sistem komunal sebesar 0,1%. Untuk wilayah ini dipilih untuk dikembangkan sistem komunal dikarenakan tingkat kepadatan penduduk sudah cukup tinggi sehingga keterbatasan lahan menjadi permasalahan dalam pembangunan jamban apabila akan dikembangkan SPAL-Setempat Individual.

Pengembangan sistem air limbah haruslah selalu diselaraskan dengan kondisi riil dilapangan. Hal ini dikarenakan tidak semua wilayah sesuai dengan pilihan teknologi yang dipilih. Berdasarkan kesepakatan Pokja Sanitasi, untuk wilayah zona 3 terdiri dari 52 Desa/Kel, dimana besarnya akses terhadap SPAL-Setempat Individual yang layak sebesar 88,2%. Diwilayah yang terpilih tersebut dinilai yang paling dapat dikembangkan SPAL-Terpusat skala kawasan dikarenakan wilayah tersebut merupakan daerah pengembangan perumahan, lokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana masih tersedia dan tingkat elevasi yang memungkinkan untuk dibangun sistem off site.

Dalam pengembangan sistem sanitasi air limbah telah disepakati bahwa sistem utama yang akan digunakan dalam menangani permasalahan air limbah untuk zona 1 dengan menggunakan sistem SPAL-Setempat Individual, zona 2 menggunakan sistem komunal dan zona 3 dengan sistem SPAL-Terpusat skala kawasan. Namun dalam

pelaksanaannya masih dimungkinkan untuk menggunakan sistem yang lain sesuai dengan kondisi lapangan. Hal ini dikarenakan dalam kenyataannya kondisi lapangan tidak memungkinkan untuk menggunakan teknologi yang telah dipersyaratkan tersebut.

**Tabel 3.2**  
**Penyepkatan Wilayah Zona Air Limbah**

No	Desa/Kel	Zona 1 (SPAL-Setempat Individual)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Jumlah penduduk miskin (KK) 2015	Jumlah KK yang BABS ("sistem tidak layak")	Jumlah KK menggunakan cubluk/tangki septik individual belum aman	Jumlah KK menggunakan tangki septik individual	Jumlah KK menggunakan jamban bersama	Jumlah KK yang terkoneksi ke MCK	Jumlah KK yang terkoneksi ke IPAL Komunal
1	Prigi	1	55	1,614	2	623	0	156	337	99	0	0
2	Kentengsari	1	95	2,792	2	385	0	156	677	189	0	0
3	Karanglangu	1	172	5,021	2	1,263	0	553	718	325	0	0
4	Panimbo	1	100	2,178	2	1,034	0	169	337	180	0	0
5	Klitikan	1	47	1,175	2	278	0	8	301	99	0	0
6	Kalimaro	1	124	5,177	2	623	0	434	850	163	0	0
7	Wates	1	142	3,175	2	564	0	139	746	235	0	0
8	Gunungtumpeng	1	109	3,457	2	434	0	483	494	42	0	0
9	Ketro	1	171	8,051	2	1,628	0	245	1,896	430	0	30
10	Sendangharjo	1	288	9,562	2	1,736	0	1,522	1,436	75	0	30
11	Karanganyar	1	103	2,300	2	211	0	653	214	30	0	0
12	Parakan	1	42	2,166	2	280	0	407	172	25	0	0
13	Nampu	1	171	8,664	2	2,047	0	1,639	785	80	0	30
14	Karangsono	1	174	4,925	2	865	0	675	874	56	0	29
15	Jetis	1	46	2,443	2	282	0	259	421	25	0	30
16	Telawah	1	74	2,938	2	507	0	434	516	31	0	0
17	Cekel	1	66	2,676	2	335	0	460	261	36	0	30
18	Mangin	1	84	6,496	2	686	0	545	973	545	0	0
19	Pangkalan	1	56	2,470	2	173	0	164	938	148	0	0
20	Rawoh	1	38	2,234	2	303	0	324	480	152	0	0

No	Desa/Kel	Zona 1 (SPAL-Setempat Individual)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Jumlah penduduk miskin (KK) 2015	Jumlah KK yang BABS ("sistem tidak layak")	Jumlah KK menggunakan cubluk/tangki septik individual belum aman	Jumlah KK menggunakan tangki septik individual	Jumlah KK menggunakan jamban bersama	Jumlah KK yang terkoneksi ke MCK	Jumlah KK yang terkoneksi ke IPAL Komunal
21	Dempel	1	91	3,275	2	869	0	364	473	348	0	30
22	Termas	1	63	2,814	2	692	0	277	566	98	0	0
23	Putatnganten	1	104	4,396	2	978	0	452	828	237	0	0
24	Temurejo	1	83	2,975	2	793	0	244	525	250	0	0
25	Lajer	1	149	7,225	2	2,053	0	1,314	591	284	0	0
26	Sedadi	1	75	4,171	2	321	0	687	576	0	0	0
27	Bologarang	1	81	3,255	2	346	0	454	488	27	0	0
28	Karangwader	1	60	3,092	2	65	0	538	647	0	0	0
29	Toko	1	42	1,196	2	313	0	219	602	105	0	0
30	Pengkol	1	89	4,337	2	409	0	792	514	318	0	0
31	Leyangan	1	48	2,939	2	415	0	399	278	170	0	0
32	Watupawon	1	37	1,573	2	247	0	260	385	0	0	0
33	Tunggu	1	31	1,388	2	210	0	241	289	15	0	0
34	Jipang	1	59	2,639	2	162	0	297	609	0	0	0
35	Kramat	1	90	3,024	2	138	0	388	678	0	0	0
36	Curut	1	33	1,238	2	106	0	235	189	101	0	0
37	Wedoro	1	60	2,111	2	200	0	328	305	90	0	0
38	Kluwan	1	86	3,898	2	227	0	502	582	406	0	0
39	Karangpaing	1	49	2,279	2	128	0	430	374	89	0	0
40	Pulutan	1	45	2,830	2	183	0	499	472	70	0	0
41	Winong	1	50	2,301	2	183	0	405	301	112	0	0
42	Dimoro	1	173	7,682	2	1,067	0	435	2,192	260	0	0
43	Genengadal	1	93	5,933	2	472	0	353	1,946	180	0	0
44	Bandungharjo	1	174	6,633	2	580	0	447	1,511	743	0	0

No	Desa/Kel	Zona 1 (SPAL-Setempat Individual)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Jumlah penduduk miskin (KK) 2015	Jumlah KK yang BABS ("sistem tidak layak")	Jumlah KK menggunakan cubluk/tangki septik individual belum aman	Jumlah KK menggunakan tangki septik individual	Jumlah KK menggunakan jamban bersama	Jumlah KK yang terkoneksi ke MCK	Jumlah KK yang terkoneksi ke IPAL Komunal
45	Genengsari	1	118	3,559	2	507	0	963	195	95	0	0
46	Kenteng	1	214	7,471	2	1,158	0	1,553	869	115	0	0
47	Ngrandah	1	156	5,728	2	1,118	0	1,287	362	120	0	0
48	Tunggak	1	144	7,175	2	1,245	0	1,706	671	95	0	0
49	Boloh	1	178	7,663	2	510	0	1,759	854	92	0	0
50	Plosoharjo	1	144	5,595	2	1,111	0	1,370	396	83	0	0
51	Tambirejo	1	134	7,822	2	1,222	0	649	1,564	374	0	0
52	Krangganharjo	1	79	4,892	2	221	0	40	1,599	101	0	0
53	Sugihan	1	113	6,307	2	682	0	45	2,013	98	0	0
54	Katong	1	82	3,984	2	250	0	62	1,347	132	0	0
55	Rambat	1	41	2,187	2	495	0	238	412	18	0	0
56	Kalambangancar	1	33	2,085	2	366	0	263	341	24	0	0
57	Monggot	1	61	5,428	2	1,023	0	764	864	20	0	0
58	Bangsri	1	75	3,657	2	1,200	0	560	579	155	0	0
59	Karanganyar	1	73	6,890	2	3,016	0	1,756	962	529	0	0
60	Jambangan	1	123	6,203	2	2,102	0	1,022	1,283	70	0	0
61	Sobo	1	85	5,167	2	1,556	0	861	948	15	0	0
62	Suru	1	67	4,781	2	776	0	643	1,097	11	0	0
63	Randurejo	1	173	5,804	2	1,411	0	1,321	459	9	0	0
64	Mlowokarangtalun	1	127	5,605	2	1,700	0	491	622	7	0	0
65	Pojok	1	183	6,779	2	2,663	0	884	894	745	0	0
66	Jatiharjo	1	123	7,286	2	1,140	0	700	513	11	0	0
67	Sidorejo	1	252	9,223	2	3,201	0	2,208	850	51	0	0
68	Jetaksari	1	98	5,816	2	1,261	0	612	1,662	677	0	0

No	Desa/Kel	Zona 1 (SPAL-Setempat Individual)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Jumlah penduduk miskin (KK) 2015	Jumlah KK yang BABS ("sistem tidak layak")	Jumlah KK menggunakan cubluk/tangki septik individual belum aman	Jumlah KK menggunakan tangki septik individual	Jumlah KK menggunakan jamban bersama	Jumlah KK yang terkoneksi ke MCK	Jumlah KK yang terkoneksi ke IPAL Komunal
69	Pulokulon	1	235	10,647	2	2,373	0	985	1,995	652	0	0
70	Jambon	1	160	7,575	2	1,771	0	891	915	487	0	0
71	Karangharjo	1	164	7,530	2	3,094	0	687	924	782	0	0
72	Sembungharjo	1	178	7,995	2	2,104	0	948	923	580	0	0
73	Bago	1	64	3,273	2	1,178	0	405	660	30	0	0
74	Simo	1	221	5,432	2	992	0	885	773	53	0	0
75	Rejosari	1	122	6,891	2	1,541	0	1,117	1,009	102	0	0
76	Pakis	1	199	7,500	2	1,399	0	1,240	1,030	27	0	0
77	Crewek	1	147	4,828	2	1,315	0	792	743	12	0	0
78	Kradenan	1	194	7,706	2	1,206	0	1,106	1,317	29	0	0
79	Sambongbangi	1	148	5,376	2	2,030	0	907	1,020	106	0	0
80	Sengonwetan	1	53	3,626	2	1,771	0	637	713	52	0	0
81	Banjardowo	1	143	6,280	2	1,409	0	842	946	103	0	0
82	Kuwu	1	135	5,530	2	1,239	0	763	795	35	0	0
83	Tanjungsari	1	118	4,035	2	858	0	447	727	49	0	0
84	Keyongan	1	606	5,229	2	969	0	960	378	30	0	0
85	Suwatu	1	651	2,544	2	530	0	365	281	36	0	0
86	Tlogotirto	1	189	4,367	1	855	0	575	639	19	0	0
87	Gabus	1	44	3,302	2	740	0	1,697	598	15	0	0
88	Pandanharum	1	78	6,426	2	1,299	0	1,480	719	58	0	0
89	Bendoharjo	1	75	5,573	2	1,095	0	1,385	764	19	0	0
90	Kalipang	1	42	3,599	2	616	0	592	790	16	0	0
91	Sendangrejo	1	95	3,334	2	556	0	440	632	76	0	33
92	Sarirejo	1	118	3,743	2	759	0	327	972	9	0	33



No	Desa/Kel	Zona 1 (SPAL-Setempat Individual)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Jumlah penduduk miskin (KK) 2015	Jumlah KK yang BABS ("sistem tidak layak")	Jumlah KK menggunakan cubluk/tangki septik individual belum aman	Jumlah KK menggunakan tangki septik individual	Jumlah KK menggunakan jamban bersama	Jumlah KK yang terkoneksi ke MCK	Jumlah KK yang terkoneksi ke IPAL Komunal
93	Kalangdosari	1	70	4,522	2	846	0	1,090	980	485	0	33
94	Kalanglundo	1	133	7,320	2	2,072	0	765	635	270	0	0
95	Truwolu	1	133	7,498	2	1,126	0	985	1,345	118	0	21
96	Pendem	1	64	4,042	2	1,336	0	392	940	24	0	0
97	Bandungsari	1	129	8,614	2	2,550	0	715	870	618	0	0
98	Ngarap-arap	1	59	4,944	2	1,010	0	635	710	280	0	0
99	Belor	1	147	4,878	2	689	0	710	510	371	0	0
100	Sumberagung	1	183	7,770	2	2,190	0	998	995	615	0	0
101	Sambirejo	1	201	5,767	2	770	0	1,043	771	287	0	0
102	Tanjungrejo	1	144	5,788	2	1,145	0	1,197	866	152	0	0
103	Tambahrejo	1	163	6,968	2	1,138	0	1,354	927	445	0	0
104	Kropak	1	88	4,039	2	942	0	836	543	269	0	0
105	Kalirejo	1	114	5,042	2	476	0	1,015	642	225	0	0
106	Dapurmo	1	108	4,080	2	730	0	695	526	275	0	0
107	Mojorebo	1	110	4,989	2	1,336	0	397	1,176	192	0	33
108	Gedangan	1	79	4,274	2	1,207	0	265	1,194	71	0	0
109	Tambakselo	1	190	10,152	2	3,151	0	700	2,312	266	0	0
110	Karangasem	1	134	9,250	2	683	0	165	2,551	380	0	0
111	Dokoro	1	184	5,690	2	1,436	0	504	1,244	504	0	0
112	Tegalrejo	1	141	6,728	2	789	0	262	2,585	194	0	0
113	Pulongrambe	1	70	2,818	2	625	0	536	331	172	0	0
114	Mayahan	1	104	5,631	2	553	0	745	851	169	0	0
115	Jono	1	83	4,025	2	1,013	0	609	553	314	0	0
116	Tarub	1	162	6,105	2	1,326	0	553	1,072	112	0	0

No	Desa/Kel	Zona 1 (SPAL-Setempat Individual)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Jumlah penduduk miskin (KK) 2015	Jumlah KK yang BABS ("sistem tidak layak")	Jumlah KK menggunakan cubluk/tangki septik individual belum aman	Jumlah KK menggunakan tangki septik individual	Jumlah KK menggunakan jamban bersama	Jumlah KK yang terkoneksi ke MCK	Jumlah KK yang terkoneksi ke IPAL Komunal
117	Plosorejo	1	91	6,482	2	1,087	0	736	1,315	164	0	0
118	Godan	1	70	5,957	2	1,577	0	602	1,012	141	0	0
119	Kemadohatur	1	77	3,954	2	608	0	416	572	155	0	0
120	Rejosari	1	122	5,808	2	1,730	0	667	606	430	0	0
121	Tanggungharjo	1	108	6,390	2	1,243	0	847	781	502	0	0
122	Teguhan	1	138	6,156	2	1,317	0	884	663	329	0	0
123	Putatsari	1	175	10,865	2	3,870	0	1,235	1,423	534	0	0
124	Lebak	1	175	9,159	2	2,660	0	1,062	1,064	566	0	0
125	Lebengjumuk	1	95	2,315	2	419	0	219	286	183	0	0
126	Sedayu	1	126	3,712	2	835	0	460	440	253	0	0
127	Sumberjatipohon	1	249	6,016	2	1,841	0	630	564	371	0	0
128	Candisari	1	167	4,120	2	229	0	492	979	133	0	0
129	Genuksuran	1	70	4,397	2	327	0	385	587	204	0	0
130	Kandangan	1	113	5,442	2	396	0	380	1,309	265	0	0
131	Nambuhan	1	136	7,732	2	1,481	0	871	1,093	419	0	0
132	Waru Karanganyar	1	90	4,213	2	1,070	0	435	577	373	0	0
133	Nglobar	1	111	4,149	2	1,353	0	655	418	316	0	0
134	Kedungrejo	1	84	5,663	2	1,434	0	816	602	356	0	0
135	Ngembak	1	125	6,071	2	388	0	704	1,265	140	0	0
136	Cingkrong	1	194	6,289	2	500	0	833	1,226	131	0	0
137	Pulorejo	1	107	3,567	2	120	0	300	637	161	0	0
138	Putat	1	76	5,092	2	406	0	247	979	140	0	0
139	Jangkungharjo	1	117	5,784	2	830	0	382	1,125	188	0	0
140	Temon	1	88	4,477	2	501	0	236	682	582	0	30

No	Desa/Kel	Zona 1 (SPAL-Setempat Individual)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Jumlah penduduk miskin (KK) 2015	Jumlah KK yang BABS ("sistem tidak layak")	Jumlah KK menggunakan cubluk/tangki septik individual belum aman	Jumlah KK menggunakan tangki septik individual	Jumlah KK menggunakan jamban bersama	Jumlah KK yang terkoneksi ke MCK	Jumlah KK yang terkoneksi ke IPAL Komunal
141	Tirem	1	84	4,703	2	1,303	0	155	919	440	0	0
142	Katekan	1	198	4,353	1	1,194	0	119	970	460	0	29
143	Tegalsumur	1	133	3,100	2	269	0	437	455	90	0	0
144	Kandangrejo	1	55	4,165	2	706	0	682	1,678	39	0	30
145	Selojari	1	48	2,124	2	314	0	65	662	36	0	0
146	Taruman	1	140	4,216	2	671	0	67	1,508	29	0	0
147	Terkesi	1	65	5,932	2	853	0	44	1,565	0	0	0
148	Jenengan	1	37	2,384	2	378	0	73	733	32	0	30
149	Wandankemiri	1	38	1,910	2	410	0	45	559	22	0	0
150	Tungu	1	42	1,947	2	278	0	114	510	0	0	0
151	Pahesan	1	40	2,150	2	305	0	132	389	131	0	0
152	Latak	1	78	4,427	2	609	0	291	715	220	0	0
153	Sumurgede	1	54	2,548	2	271	0	309	531	42	0	0
154	Sambung	1	72	4,194	2	455	0	412	942	40	0	0
155	Ketangirejo	1	65	4,027	2	476	0	226	963	84	0	0
156	Anggaswangi	1	26	1,530	2	173	0	73	268	193	0	0
157	Guci	1	25	1,757	2	181	0	49	612	12	0	0
158	Werdoyo	1	23	1,951	2	390	0	204	437	7	0	0
159	Guyangan	1	29	1,977	2	272	0	196	503	35	0	0
160	Gundi	1	25	1,598	2	112	0	47	521	0	0	0
161	Jatilor	1	52	2,669	2	116	0	171	548	222	0	0
162	Sumberagung	1	21	1,630	2	75	0	48	514	4	0	0
163	Beringin	1	41	1,767	2	191	0	100	329	174	0	0
164	Kemloko	1	64	4,206	2	338	0	257	1,101	145	0	0

No	Desa/Kel	Zona 1 (SPAL-Setempat Individual)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Jumlah penduduk miskin (KK) 2015	Jumlah KK yang BABS ("sistem tidak layak")	Jumlah KK menggunakan cubluk/tangki septik individual belum aman	Jumlah KK menggunakan tangki septik individual	Jumlah KK menggunakan jamban bersama	Jumlah KK yang terkoneksi ke MCK	Jumlah KK yang terkoneksi ke IPAL Komunal
165	Ketitang	1	31	1,764	2	212	0	73	335	159	0	0
166	Kopek	1	21	1,505	2	223	0	227	308	28	0	0
167	Dorolegi	1	49	2,789	2	298	0	185	701	71	0	0
168	Rajek	1	37	2,279	2	158	0	96	646	92	0	0
169	Harjowinangun	1	87	4,511	2	1,033	0	171	598	369	0	0
170	Karanggeneng	1	48	3,705	2	650	0	216	539	540	0	0
171	Wanutunggal	1	38	1,663	2	343	0	220	291	60	0	0
172	Manggarwetan	1	45	3,166	2	358	0	160	542	401	0	0
173	Manggarmas	1	59	4,495	2	806	0	99	730	435	0	0
174	Tinanding	1	36	1,981	2	247	0	92	281	239	0	0
175	Penadaran	1	81	4,346	2	977	0	307	466	114	0	0
176	Gelapan	1	48	1,613	2	451	0	24	231	68	0	0
177	Ngroto	1	124	5,223	2	287	0	191	1,023	26	0	0
178	Ginggangtani	1	78	4,361	2	661	0	82	743	19	0	0
179	Jeketro	1	56	3,004	2	335	0	7	484	0	0	0
180	Saban	1	65	1,767	2	385	0	87	309	14	0	0
181	Mlilir	1	109	3,658	2	331	0	129	726	65	0	0
182	Papanrejo	1	60	2,232	2	477	0	206	463	70	0	0
183	Trisari	1	82	2,629	2	517	0	125	624	5	0	0
184	Rowosari	1	51	2,409	2	365	0	190	793	21	0	0
185	Jatipecaron	1	63	2,092	2	617	0	96	400	126	0	0
186	Tambakan	1	53	3,185	2	659	0	196	678	240	0	0
187	Ringinkidul	1	38	1,795	2	264	0	195	378	0	0	0
188	Ringinharjo	1	65	3,494	2	452	0	285	479	335	0	0

No	Desa/Kel	Zona 1 (SPAL-Setempat Individual)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Jumlah penduduk miskin (KK) 2015	Jumlah KK yang BABS ("sistem tidak layak")	Jumlah KK menggunakan cubluk/tangki septik individual belum aman	Jumlah KK menggunakan tangki septik individual	Jumlah KK menggunakan jamban bersama	Jumlah KK yang terkoneksi ke MCK	Jumlah KK yang terkoneksi ke IPAL Komunal
189	Tlogomulyo	1	120	4,362	2	505	0	74	1,240	106	0	0
190	Medani	1	48	2,001	2	471	0	155	370	36	0	0
191	Gaji	1	22	1,696	2	198	0	167	330	63	0	0
192	Ringinpitu	1	72	4,000	2	942	0	530	433	418	0	0
193	Mrisi	1	95	4,598	2	433	0	202	1,136	122	0	0
194	Ngambakrejo	1	107	4,610	2	373	0	472	860	171	0	0
195	Kapung	1	64	2,377	2	594	0	95	552	126	0	0
196	Kaliwenang	1	90	2,259	2	198	0	52	879	11	0	0
197	Padang	1	73	3,894	2	650	0	458	475	327	0	0
	<b>Jumlah</b>		<b>20,535</b>	<b>877,638</b>		<b>168,218</b>	<b>0</b>	<b>104,055</b>	<b>153,275</b>	<b>35,070</b>	<b>0</b>	<b>481</b>

No	Desa/Kel	Zona 2 (Sistem Komunal)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Jumlah penduduk miskin (KK) 2015	Jumlah KK yang BABS ("sistem tidak layak")	Jumlah KK menggunakan cubluk/tangki septik individual belum aman	Jumlah KK menggunakan tangki septik individual	Jumlah KK menggunakan jamban bersama	Jumlah KK yang terkoneksi ke MCK	Jumlah KK yang terkoneksi ke IPAL Komunal
1	Ngombak	2	54	2,929	2	690	0	174	655	115	0	0
2	Padas	2	87	2,578	2	699	0	255	499	108	0	0
3	Deras	2	75	3,616	2	886	0	148	764	332	0	0
4	Jumo	2	95	4,087	2	1,071	0	167	1,019	204	0	0
5	Juworo	2	27	3,268	2	931	0	86	439	50	0	0
6	Ngrandu	2	35	4,559	2	1,102	0	850	912	220	0	0
7	Asemrudung	2	68	5,001	2	1,326	0	998	791	395	0	0
8	Nglinduk	2	34	3,522	2	521	0	1,018	281	19	0	0
9	Pelem	2	47	6,509	2	1,105	0	1,079	798	14	0	0
10	Tunggulrejo	2	92	5,476	2	1,368	0	1,305	871	22	0	0
11	Karangrejo	2	36	4,436	2	1,216	0	1,095	665	21	0	0
12	Banjarejo	2	64	5,642	2	1,345	0	1,530	574	23	0	0
13	Lemahputih	2	63	3,229	2	917	0	158	656	379	0	30
14	Menawan	2	45	4,515	2	235	0	424	1,159	17	0	0
15	Kunjeng	2	23	2,924	2	550	0	86	676	270	0	0
16	Baturagung	2	45	5,375	2	1,103	0	540	744	337	0	0
17	Kebonagung	2	55	4,815	2	1,051	0	400	882	111	0	0
18	Tlogorejo	2	53	4,321	2	319	0	464	512	161	0	0
19	Sukorejo	2	66	2,778	2	314	0	308	446	212	0	0

No	Desa/Kel	Zona 2 (Sistem Komunal)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Jumlah penduduk miskin (KK) 2015	Jumlah KK yang BABS ("sistem tidak layak")	Jumlah KK menggunakan cubluk/tangki septik individual belum aman	Jumlah KK menggunakan tangki septik individual	Jumlah KK menggunakan jamban bersama	Jumlah KK yang terkoneksi ke MCK	Jumlah KK yang terkoneksi ke IPAL Komunal
20	Tanggirejo	2	29	1,405	2	672	0	54	333	96	0	0
21	Mangunsari	2	24	2,737	2	623	0	236	357	127	0	0
22	Gebangan	2	17	1,019	2	177	0	38	188	40	0	0
23	Kejawen	2	22	1,560	2	249	0	169	285	92	0	0
24	Tajemsari	2	26	2,733	2	808	0	99	582	77	0	0
25	Karangpasar	2	38	2,522	2	672	0	143	356	219	0	0
26	Kedungwungu	2	36	3,186	2	264	0	130	575	166	0	0
27	Pepe	2	31	3,001	2	500	0	275	411	147	0	0
28	Curug	2	23	2,022	2	100	0	139	383	53	0	0
29	Cangkring	2	25	1,932	2	293	0	139	315	150	0	0
30	Tunjungharjo	2	48	4,370	2	232	0	393	598	222	0	0
31	Brabo	2	44	5,235	2	1,221	0	228	1,075	164	0	0
	<b>Jumlah</b>		<b>1,427</b>	<b>111,302</b>		<b>22,560</b>	<b>0</b>	<b>13,128</b>	<b>18,801</b>	<b>4,563</b>	<b>0</b>	<b>30</b>

No	Desa/Kel	Zona 3 (SPAL- Terpusat skala kawasan)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2013	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Jumlah penduduk miskin (KK) 2013	Jumlah KK yang BABS ("sistem tidak layak")	Jumlah KK menggunakan cubluk/tangki septik individual belum aman	Jumlah KK menggunakan tangki septik individual	Jumlah KK menggunakan jamban bersama	Jumlah KK yang terkoneksi ke MCK	Jumlah KK yang terkoneksi ke IPAL Komunal
1	Kedungjati	3	95	5,479	1	406	0	291	1,213	294	0	0
2	Sumberjosari	3	205	11,467	1	946	0	914	2,482	648	0	0
3	Mojoangung	3	118	6,391	1	570	0	350	1,450	391	0	0
4	Wolo	3	64	4,029	1	176	0	682	617	122	0	0
5	Ngeluk	3	32	2,422	1	619	0	449	291	227	0	0
6	Penawangan	3	63	2,837	1	234	0	397	376	211	0	0
7	Sindurejo	3	169	8,280	1	1,477	0	1,599	1,417	163	0	0
8	Depok	3	174	12,809	1	1,381	0	867	2,987	420	0	0
9	Pilangpayung	3	96	5,240	1	362	0	257	1,843	102	0	0
10	Geyer	3	43	5,272	1	1,734	0	635	1,123	35	0	0
11	Ledokdawan	3	159	5,726	1	1,365	0	872	1,081	36	0	0
12	Tuko	3	162	10,174	1	3,095	0	961	1,317	7	0	0
13	Panunggalan	3	180	10,162	1	2,636	0	776	1,449	6	0	0
14	Mangunrejo	3	135	6,092	1	2,056	0	674	926	698	0	0
15	Banjarsari	3	145	5,369	1	1,123	0	654	924	25	0	0
16	Kalisari	3	213	6,469	1	1,244	0	860	950	101	0	0
17	Grabagan	3	116	3,807	1	920	0	456	732	74	0	0
18	Sulursari	3	44	6,664	1	1,294	0	1,160	863	15	0	0
19	Tahunan	3	35	4,577	1	810	0	844	631	22	0	0
20	Ngaringan	3	81	2,801	1	446	0	470	535	72	0	0
21	Tanjungharjo	3	140	6,781	1	1,458	0	1,270	810	217	0	0
22	Kunden	3	77	8,000	1	0	0	1,251	868	860	0	0
23	Wirosari	3	64	5,040	1	0	0	857	647	351	0	0



No	Desa/Kel	Zona 3 (SPAL- Terpusat skala kawasan)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2013	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Jumlah penduduk miskin (KK) 2013	Jumlah KK yang BABS ("sistem tidak layak")	Jumlah KK menggunakan cubluk/tangki septik individual belum aman	Jumlah KK menggunakan tangki septik individual	Jumlah KK menggunakan jamban bersama	Jumlah KK yang terkoneksi ke MCK	Jumlah KK yang terkoneksi ke IPAL Komunal
24	Selo	3	177	8,373	1	2,545	0	1,184	868	848	0	0
25	Tawangharjo	3	117	4,883	1	887	0	287	1,445	18	0	0
26	Pojok	3	111	5,553	1	1,491	0	711	1,205	133	0	0
27	Getasrejo	3	152	5,874	1	818	0	622	568	284	0	0
28	Ngabenrejo	3	112	4,898	1	1,245	0	606	552	48	0	0
29	Grobogan	3	158	7,418	1	0	0	935	914	651	0	0
30	Karangrejo	3	125	5,995	1	1,208	0	755	620	256	0	0
31	Danyang	3	70	9,429	1	0	0	601	1,867	128	0	0
32	Kalongan	3	137	10,475	1	0	0	220	3,029	181	0	0
33	Ngraji	3	128	9,413	1	993	0	269	2,195	254	0	0
34	Karanganyar	3	105	5,936	1	1,389	0	297	1,189	263	0	0
35	Purwodadi	3	218	23,555	1	0	0	2,125	3,364	864	0	0
36	Kuripan	3	210	18,811	1	0	0	1,502	3,130	292	0	0
37	Menduran	3	123	8,056	1	833	0	97	1,457	558	0	30
38	Karangsari	3	85	4,897	1	918	0	393	1,006	379	0	0
39	Kronggen	3	155	7,588	1	716	0	332	1,474	448	0	30
40	Penganten	3	90	3,804	1	468	0	225	1,185	31	0	0
41	Klambu	3	64	5,591	1	608	0	497	1,554	0	0	30
42	Klompok	3	45	2,838	1	82	0	85	643	109	0	0
43	Godong	3	208	6,274	1	246	0	249	1,205	624	0	0
44	Bugel	3	25	3,423	1	436	0	40	454	579	0	0
45	Kemiri	3	55	2,891	1	396	0	152	510	348	0	0
46	Kuwaron	3	210	8,605	1	417	0	407	1,728	130	0	0
47	Gubug	3	149	8,773	1	480	0	98	2,981	0	0	0
48	Pranten	3	28	1,967	1	160	0	84	501	20	0	0
49	Tegowanu Wetan	3	31	6,546	1	306	0	283	1,119	257	0	0

No	Desa/Kel	Zona 3 (SPAL- Terpusat skala kawasan)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2013	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Jumlah penduduk miskin (KK) 2013	Jumlah KK yang BABS ("sistem tidak layak")	Jumlah KK menggunakan cubluk/tangki septik individual belum aman	Jumlah KK menggunakan tangki septik individual	Jumlah KK menggunakan jamban bersama	Jumlah KK yang terkoneksi ke MCK	Jumlah KK yang terkoneksi ke IPAL Komunal
50	Tegowanu Kulon	3	31	4,627	1	397	0	110	993	206	0	0
51	Sugihmanik	3	183	6,285	1	1,171	0	608	775	398	0	0
52	Tanggungharjo	3	88	6,158	1	1,056	0	812	895	397	0	0
	<b>Jumlah</b>		<b>6,001</b>	<b>354,824</b>		<b>43,618</b>	<b>0</b>	<b>32,132</b>	<b>64,958</b>	<b>13,801</b>	<b>0</b>	<b>90</b>

Sumber : Profil Sanitasi Kab. Grobogan diolah, 2016

Untuk lebih mengoperasionalkan target pencapaian pengelolaan air limbah rumah tangga, perlu dibuat pentahapan pengembangan air limbah rumah tangga, agar dalam membuat perencanaan program dan kegiatan selalu berpatokan kepada target yang telah disepakati tersebut.

Tahapan pengembangan air limbah rumah tangga ditetapkan berdasarkan perencanaan yang realistis, terukur dan bisa dicapai. Dalam menentukan pentahapan pengembangan air limbah rumah tangga terbagi menjadi 3 tahap yaitu untuk jangka pendek (1-2 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10-15 tahun).

**Tabel 3.3**  
**Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Grobogan**

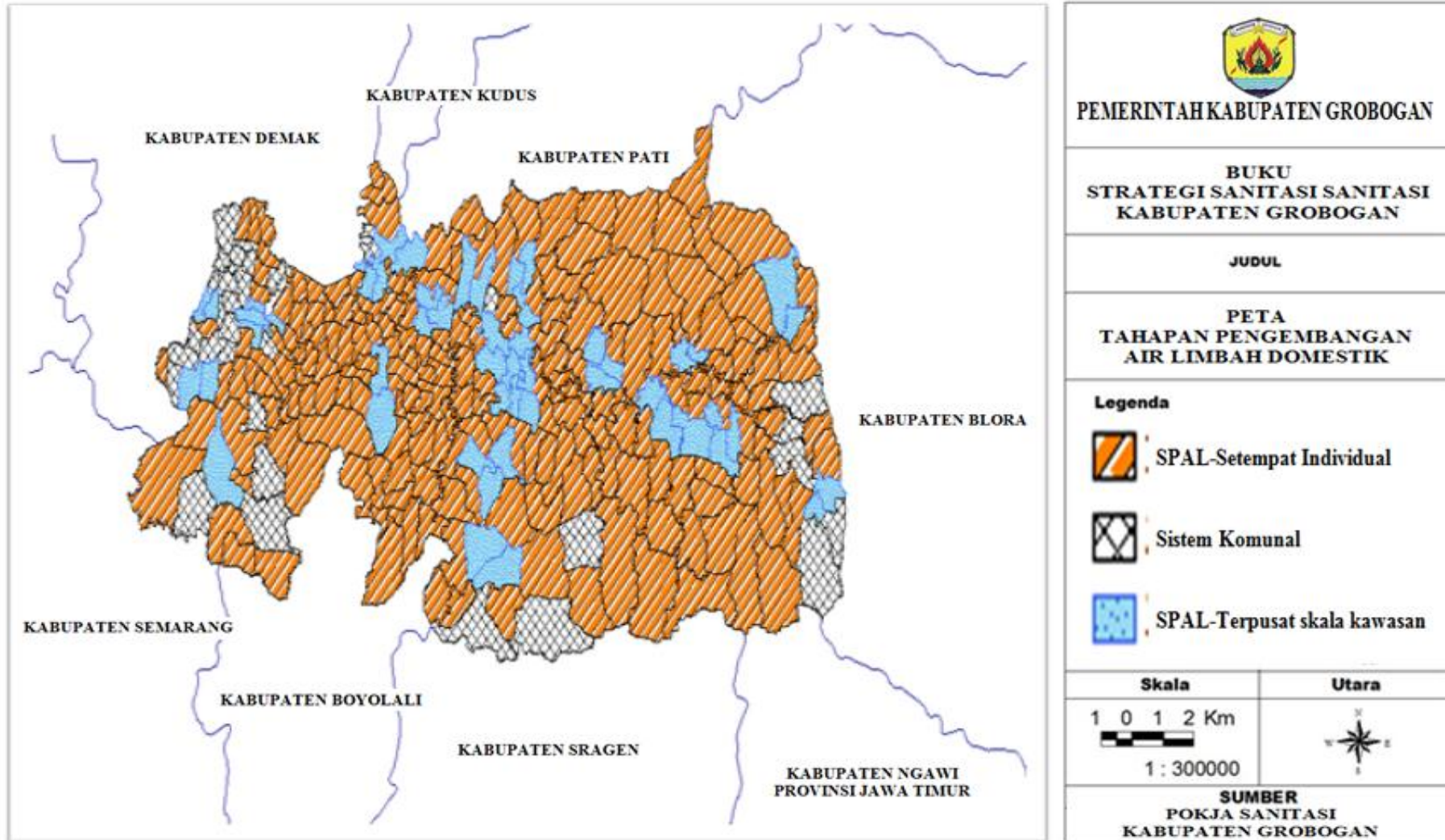
No	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target cakupan layanan (%)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
			(1-2 tahun)	(5 tahun)	(10-15 tahun)
Wilayah Zona 1					
A	Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	0%	0%	0%	0%
B	Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Setempat (Onsite)				
1	Cubluk/Tangki septik individual belum aman	34.7%	30%	15%	0%
2	Tangki septik individual	56.7%	61.4%	76.3%	91.3%
3	Tangki septik komunal ( $\leq 10$ kk)	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%
4	MCK	0%	0%	0%	0%
C	Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Terpusat (Off-site)				
1	Tangki septik komunal ( $\geq 10$ kk)	0%	0%	0%	0%
2	IPAL Komunal	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%
3	IPAL Kawasan	0%	0%	0%	0%
4	IPAL Kota	0%	0%	0%	0%
	<b>Sub total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Wilayah Zona 2					
A	Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	0%	0%	0%	0%
B	Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Setempat (Onsite)				
1	Cubluk/Tangki septik individual belum aman	33%	25%	17.7%	8%
2	Tangki septik individual	62.4%	69.5%	76.3%	84.5%
3	Tangki septik komunal ( $\leq 10$ kk)	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%
4	MCK	0%	0%	0%	0%

C	Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Terpusat (Off-site)				
1	Tangki septik komunal ( $\geq 10$ kk)	0%	0%	0%	0%
2	IPAL Komunal	0.1%	1%	1.5%	3%
3	IPAL Kawasan	0%	0%	0%	0%
4	IPAL Kota	0%	0%	0%	0%
	<b>Sub total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Wilayah Zona 3					
A	Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	0%	0%	0%	0%
B	Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Setempat (Onsite)				
1	Cubluk/Tangki septik individual belum aman	37.2%	26.4%	17.7%	8%
2	Tangki septik individual	57.6%	65.5%	72.7%	80%
3	Tangki septik komunal ( $\leq 10$ kk)	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%
4	MCK	0%	0%	0%	0%
C	Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Terpusat (Off-site)				
1	Tangki septik komunal ( $\geq 10$ kk)	0%	0%	0%	0%
2	IPAL Komunal	0.1%	1%	1.5%	3%
3	IPAL Kawasan	0%	2%	3%	3.9%
4	IPAL Kota	0%	0%	0%	0%
	<b>Sub total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Wilayah Zona 4					
A	Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	0%	0%	0%	0%
B	Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Setempat (Onsite)				
1	Cubluk/Tangki septik individual belum aman	32.1%	25%	17%	8.5%
2	Tangki septik individual	63.3%	69.5%	73%	80%
3	Tangki septik komunal ( $\leq 10$ kk)	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%
4	MCK	0%	0%	0%	0%
C	Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Terpusat (Off-site)				
1	Tangki septik komunal ( $\geq 10$ kk)	0%	0%	0%	0%
2	IPAL Komunal	0.1%	1%	1.5%	3%
3	IPAL Kawasan	0%	0%	0%	0%
4	IPAL Kota	0%	0%	4%	4%
	<b>Sub total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Profil Sanitasi Kab. Grobogan, diolah, 2016.

Peta 3.1

Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Grobogan



## **B. Tahapan Pengembangan Sanitasi Persampahan**

Permasalahan pengelolaan persampahan di Kabupaten Grobogan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini dikarenakan masih banyak wilayah yang belum terlayani oleh pengelola persampahan. Sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan dalam diagram sistem sanitasi (DSS) persampahan, permasalahan utama sektor persampahan adalah :

- ❖ Pembagian tupoksi belum jelas
  - ❖ Beban kerja di seksi kebersihan dan pengelolaan sampah terlalu berat (perlu penambahan seksi)
  - ❖ Belum ada dana kompensasi untuk petugas dan masyarakat di wilayah resiko tinggi
  - ❖ Sampah belum terangkut semua
  - ❖ Belum ada TPA yang memadai dan memenuhi syarat sesuai UU no. 18/2008
  - ❖ Kurangnya kapasitas TPA
  - ❖ Belum ada masterplan persampahan
  - ❖ Transfer depo masih ada dilingkungan permukiman
  - ❖ Tidak ada penyediaan TPS 3 R oleh SKPD
  - ❖ Belum ada workshop untuk mengelola sarpras
  - ❖ Pendidikan atau SDM karyawan kurang mendukung
  - ❖ Kurangnya jumlah tenaga pengumpul sampah
  - ❖ Kurangnya lembaga pengelola sampah ditingkat masyarakat
  - ❖ Tidak ada lembaga pengelola sampah di tingkat RT/RW
  - ❖ Masih banyak masyarakat membuang sampah ke sungai
  - ❖ Keterbatasan informasi marketing di masyarakat terkait pemasaran hasil composting
  - ❖ Belum ada keseragaman jam pembuangan sampah oleh masyarakat ke TPS
  - ❖ Masyarakat belum melakukan pemilahan sampah
  - ❖ Masyarakat belum mengetahui cara composting
  - ❖ Belum ada kerjasama pengelolaan sampah dengan kabupaten lain
  - ❖ Wilayah luas dan berkontur
  - ❖ Jumlah penduduk bertambah tidak diimbangi penyediaan sarpras
  - ❖ Kurangnya alternative pengemasan barang terkait penggunaan plastic
- Pengembang belum menyediakan tempat pengelolaan sampah

Pengembangan sektor sampah ditentukan oleh data jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, prosentase penduduk yang sampahnya terangkut dan luas are terbangun. Adapun hasil perhitungan dalam pentahapan persampahan adalah sebagai berikut :

**Gambar 3.2**  
**Zona sistem persampahan**

Zona persampahan						
	zona 1	Zone 2	zona 3	zona 4	zona 5	
Jumlah penduduk saat ini	: 24,195	911,437	58,687	357,153	-	orang
Pertumbuhan penduduk dalam zona	: 0.21%	0.56%	0.53%	0.67%	0.00%	
Persentase penduduk yang sampahnya terangkut	: 0.0%	0.1%	0.0%	21.5%	0.0%	
Luas total area terbangun	: 1,989	19,450	523	6,001	-	ha
Saran Pilihan Drop Down-Menu						
Apakah perkotaan akan dikembangkan (sekarang atau masa depan)?	pilih tidak	pilih tidak	pilih tidak	pilih ya		
Apakah saat ini daerah CBD?	pilih tidak	pilih tidak	pilih tidak	pilih ya		
Tingkat kerapatan penduduk	pilih <25 orang/ha	pilih 25-100 orang/ha	pilih > 100 orang/ha	pilih 25-100 orang/ha		

Sumber : Profil sanitasi Kabupaten Grobogan, 2016.

Tahapan pengembangan persampahan di Kabupaten Grobogan terbagi dalam 4 zona penanganan yang diperhitungkan dari prosentase jumlah penduduk dalam jangka menengah yaitu 5 tahun, zona tersebut adalah

1. Area kepadatan rendah,
2. 25-100 orang/Ha; Urban/rural
3. >100 orang/ha; bukan-urban,
4. CBD.

Wilayah zona 1 terdiri dari 7 Desa/Kel dengan prosentase sampah yang terangkut sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa diwilayah zona 1 masih banyak masyarakat yang belum terlayani dalam pengelolaan sampah dikarenakan masuk dalam kategori wilayah kepadatan rendah baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Zona 2 meliputi 206 Desa/Kel, dimana prosentase sampah yang telah terangkut sebesar 0.3 % dari jumlah penduduk. Meskipun jumlah sampah yang terangkut sudah lebih baik, namun masih beresiko dikarenakan sampah yang belum terangkut berpotensi mencemari lingkungan. Wilayah ini berada di daerah antara 25-100 orang/Ha; Urban/rural (kepadatan sedang).

Untuk wilayah zona 3 hanya terdiri dari 15 Desa/Kel dengan prosentase sampah yang terangkut mencapai 0%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian mengingat yang termasuk diwilayah ini termasuk kategori kepadatan tinggi dan berada diwilayah perdesaan.

Wilayah zona 4 terdiri dari 52 Desa/Kel dengan jumlah sampah terangkut mencapai 7,4 %. Daerah yang masuk dalam zona 5 adalah wilayah central business district (CBD), dimana jumlah timbulan sampah cukup besar dan harus menjadi prioritas dalam penanganan sampah.

Untuk lebih lengkapnya wilayah dan pembagian zona sanitasi sektor persampahan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4 Penyepakatan Wilayah Zona Persampahan**

No	Desa / Kel	Zona	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) 20 tahun mendatang; 1=urban 2 = rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Persentase jumlah sampah Rumah Tangga yang terkumpul dan terangkut (%)	Jumlah TPS yang ada (Units)	Jumlah TPS-3R yang ada (Units)	Jumlah Pasar	Mendapat Pelayanan (%)	Tidak Mendapat Pelayanan (%)
<b>Zona 1</b>													
1	Panimbo	1	2,178	686	2	2	2	0%	0	0	0	0	686
2	Wates	1	3,175	1,120	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,120
3	Karanganyar	1	2,300	897	2	2	2	0%	0	0	0	0	897
4	Keyongan	1	5,229	1,368	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,368
5	Suwatu	1	2,544	682	2	2	2	0%	0	0	0	0	682
6	Tlogotirto	1	4,367	1,233	1	1	1	0%	0	0	0	0	1,233
7	Katekan	1	4,353	1,549	1	1	1	0%	0	0	0	0	1,549
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>24,146</b>	<b>7,535</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7,535</b>
	<b>Perhitungan</b>											<b>0%</b>	<b>100%</b>
<b>Zona 2</b>													
1	Prigi	2	1,614	592	2	2	2	0%	0	0	0	0	592
2	Ngombak	2	2,929	944	2	2	2	0%	0	0	0	0	944
3	Kentengsari	2	2,792	1,022	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,022
4	Karanglangu	2	5,021	1,596	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,596
5	Padas	2	2,578	862	2	2	2	0%	0	0	1	0	862
6	Deras	2	3,616	1,244	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,244
7	Klitikan	2	1,175	408	2	2	2	0%	0	0	0	0	408
8	Kalimaro	2	5,177	1,447	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,447
9	Jumo	2	4,087	1,390	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,390



No	Desa / Kel	Zona	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) 20 tahun mendatang; 1=urban 2 = rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Persentase jumlah sampah Rumah Tangga yang terkumpul dan terangkut (%)	Jumlah TPS yang ada (Units)	Jumlah TPS-3R yang ada (Units)	Jumlah Pasar	Mendapat Pelayanan (%)	Tidak Mendapat Pelayanan (%)
10	Gunungtumpeng	2	3,457	1,019	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,019
11	Ketro	2	8,051	2,571	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,571
12	Sendangharjo	2	9,562	3,033	2	2	2	0%	0	0	1	0	3,033
13	Parakan	2	2,166	604	2	2	2	0%	0	0	0	0	604
14	Nampu	2	8,664	2,504	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,504
15	Karangsono	2	4,925	1,605	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,605
16	Jetis	2	2,443	705	2	2	2	0%	0	0	1	0	705
17	Telawah	2	2,938	981	2	2	2	0%	0	0	1	0	981
18	Cekel	2	2,676	757	2	2	2	0%	0	0	0	0	757
19	Mangin	2	6,496	2,063	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,063
20	Pangkalan	2	2,470	1,250	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,250
21	Rawoh	2	2,234	956	2	2	2	0%	0	0	0	0	956
22	Dempel	2	3,275	1,185	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,185
23	Termas	2	2,814	941	2	2	2	0%	0	0	0	0	941
24	Putatnganten	2	4,396	1,517	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,517
25	Temurejo	2	2,975	1,019	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,019
26	Lajer	2	7,225	2,189	2	2	2	0%	0	0	1	0	2,189
27	Sedadi	2	4,171	1,263	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,263
28	Bologarang	2	3,255	969	2	2	2	0%	0	0	0	0	969
29	Karangwader	2	3,092	1,185	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,185
30	Toko	2	1,196	926	2	2	2	0%	0	0	0	0	926
31	Pengkol	2	4,337	1,624	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,624

No	Desa / Kel	Zona	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) 20 tahun mendatang; 1=urban 2 = rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Persentase jumlah sampah Rumah Tangga yang terkumpul dan terangkut (%)	Jumlah TPS yang ada (Units)	Jumlah TPS-3R yang ada (Units)	Jumlah Pasar	Mendapat Pelayanan (%)	Tidak Mendapat Pelayanan (%)
32	Leyangan	2	2,939	847	2	2	2	0%	0	0	1	0	847
33	Watupawon	2	1,573	645	2	2	2	0%	0	0	0	0	645
34	Tunggu	2	1,388	545	2	2	2	0%	0	0	1	0	545
35	Jipang	2	2,639	906	2	2	2	0%	0	0	1	0	906
36	Kramat	2	3,024	1,066	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,066
37	Curut	2	1,238	525	2	2	2	0%	0	0	0	0	525
38	Wedoro	2	2,111	723	2	2	2	0%	0	0	1	0	723
39	Kluwan	2	3,898	1,490	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,490
40	Karangpaing	2	2,279	893	2	2	2	0%	0	0	0	0	893
41	Pulutan	2	2,830	1,041	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,041
42	Winong	2	2,301	818	2	2	2	0%	0	0	0	0	818
43	Dimoro	2	7,682	2,887	2	2	2	0%	0	0	1	0	2,887
44	Genengadal	2	5,933	2,479	2	2	2	0%	0	0	1	0	2,479
45	Bandungharjo	2	6,633	2,701	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,701
46	Genengsari	2	3,559	1,253	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,253
47	Kenteng	2	7,471	2,537	2	2	2	0%	0	0	1	0	2,537
48	Ngrandah	2	5,728	1,769	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,769
49	Tunggak	2	7,175	2,472	2	2	2	0%	0	0	1	0	2,472
50	Boloh	2	7,663	2,705	2	2	2	0%	1	0	1	0	2,705
51	Plosoharjo	2	5,595	1,849	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,849
52	Tambirejo	2	7,822	2,587	2	2	2	0%	0	0	1	0	2,587
53	Krangganharjo	2	4,892	1,740	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,740

No	Desa / Kel	Zona	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) 20 tahun mendatang; 1=urban 2 = rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Persentase jumlah sampah Rumah Tangga yang terkumpul dan terangkut (%)	Jumlah TPS yang ada (Units)	Jumlah TPS-3R yang ada (Units)	Jumlah Pasar	Mendapat Pelayanan (%)	Tidak Mendapat Pelayanan (%)
54	Sugihan	2	6,307	2,156	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,156
55	Katong	2	3,984	1,541	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,541
56	Rambat	2	2,187	668	2	2	2	0%	0	0	0	0	668
57	Kalangbancar	2	2,085	628	2	2	2	0%	0	0	0	0	628
58	Monggot	2	5,428	1,648	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,648
59	Bangsri	2	3,657	1,294	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,294
60	Karanganyar	2	6,890	3,247	2	2	2	0%	0	0	0	0	3,247
61	Asemrudung	2	5,001	2,184	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,184
62	Jambangan	2	6,203	2,375	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,375
63	Sobo	2	5,167	1,824	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,824
64	Suru	2	4,781	1,751	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,751
65	Randurejo	2	5,804	1,789	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,789
66	Mlowokarangtalun	2	5,605	1,120	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,120
67	Pojok	2	6,779	2,523	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,523
68	Jatiharjo	2	7,286	1,224	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,224
69	Sidorejo	2	9,223	3,109	2	2	2	0%	0	0	0	0	3,109
70	Jetaksari	2	5,816	2,951	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,951
71	Pulokulon	2	10,647	3,632	2	2	2	0%	0	0	0	0	3,632
72	Jambon	2	7,575	2,293	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,293
73	Karangharjo	2	7,530	2,393	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,393
74	Sembungharjo	2	7,995	2,451	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,451
75	Bago	2	3,273	1,095	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,095

No	Desa / Kel	Zona	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) 20 tahun mendatang; 1=urban 2 = rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Persentase jumlah sampah Rumah Tangga yang terkumpul dan terangkut (%)	Jumlah TPS yang ada (Units)	Jumlah TPS-3R yang ada (Units)	Jumlah Pasar	Mendapat Pelayanan (%)	Tidak Mendapat Pelayanan (%)
76	Simo	2	5,432	1,711	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,711
77	Rejosari	2	6,891	2,228	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,228
78	Pakis	2	7,500	2,297	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,297
79	Crewek	2	4,828	1,547	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,547
80	Kradenan	2	7,706	2,452	2	2	2	15%	3	0	0	367.8	2,084
81	Sambongbangi	2	5,376	2,033	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,033
82	Sengonwetan	2	3,626	1,402	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,402
83	Banjardowo	2	6,280	1,891	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,891
84	Kuwu	2	5,530	1,593	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,593
85	Tanjungsari	2	4,035	1,223	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,223
86	Gabus	2	3,302	2,310	2	2	2	0%	0	0	1	0	2,310
87	Pandanharum	2	6,426	2,257	2	2	2	0%	0	0	1	0	2,257
88	Tunggulrejo	2	5,476	2,198	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,198
89	Bendoharjo	2	5,573	2,168	2	2	2	0%	0	0	1	0	2,168
90	Kalipang	2	3,599	1,398	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,398
91	Banjarejo	2	5,642	2,127	2	2	2	0%	0	0	1	0	2,127
92	Sendangrejo	2	3,334	1,148	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,148
93	Sarirejo	2	3,743	1,308	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,308
94	Kalangdosari	2	4,522	2,555	2	2	2	0%	0	0	1	0	2,555
95	Kalanglundo	2	7,320	1,670	2	2	2	0%	0	0	2	0	1,670
96	Truwolu	2	7,498	2,448	2	2	2	0%	0	0	1	0	2,448
97	Pendem	2	4,042	1,356	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,356

No	Desa / Kel	Zona	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) 20 tahun mendatang; 1=urban 2 = rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Persentase jumlah sampah Rumah Tangga yang terkumpul dan terangkut (%)	Jumlah TPS yang ada (Units)	Jumlah TPS-3R yang ada (Units)	Jumlah Pasar	Mendapat Pelayanan (%)	Tidak Mendapat Pelayanan (%)
98	Bandungsari	2	8,614	2,203	2	2	2	0%	0	0	1	0	2,203
99	Ngarap-arap	2	4,944	1,625	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,625
100	Belor	2	4,878	1,591	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,591
101	Sumberagung	2	7,770	2,608	2	2	2	0%	0	0	1	0	2,608
102	Sambirejo	2	5,767	2,111	2	2	2	0%	0	0	1	0	2,111
103	Tanjungrejo	2	5,788	2,215	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,215
104	Tambahrejo	2	6,968	2,726	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,726
105	Kropak	2	4,039	1,648	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,648
106	Kalirejo	2	5,042	1,882	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,882
107	Dapurno	2	4,080	1,496	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,496
108	Mojorebo	2	4,989	1,768	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,768
109	Gedangan	2	4,274	1,530	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,530
110	Tambakselo	2	10,152	3,278	2	2	2	0%	0	0	1	0	3,278
111	Karangasem	2	9,250	3,096	2	2	2	0%	0	0	1	0	3,096
112	Dokoro	2	5,690	2,252	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,252
113	Tegalrejo	2	6,728	3,041	2	2	2	0%	0	0	1	0	3,041
114	Pulongrambe	2	2,818	1,039	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,039
115	Mayahan	2	5,631	1,765	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,765
116	Jono	2	4,025	1,476	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,476
117	Tarub	2	6,105	1,737	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,737
118	Plosorejo	2	6,482	2,215	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,215
119	Godan	2	5,957	1,755	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,755

No	Desa / Kel	Zona	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) 20 tahun mendatang; 1=urban 2 = rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Persentase jumlah sampah Rumah Tangga yang terkumpul dan terangkut (%)	Jumlah TPS yang ada (Units)	Jumlah TPS-3R yang ada (Units)	Jumlah Pasar	Mendapat Pelayanan (%)	Tidak Mendapat Pelayanan (%)
120	Kemadohbatur	2	3,954	1,143	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,143
121	Rejosari	2	5,808	1,703	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,703
122	Tanggungharjo	2	6,390	2,130	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,130
123	Teguhan	2	6,156	1,876	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,876
124	Putatsari	2	10,865	3,192	2	2	2	0%	0	0	1	0	3,192
125	Lebak	2	9,159	2,692	2	2	2	0%	0	0	1	0	2,692
126	Lebengjumuk	2	2,315	688	2	2	2	0%	0	0	0	0	688
127	Sedayu	2	3,712	1,153	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,153
128	Sumberjatipohon	2	6,016	1,565	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,565
129	Candisari	2	4,120	1,604	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,604
130	Genuksuran	2	4,397	1,176	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,176
131	Kandangan	2	5,442	1,954	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,954
132	Nambuhan	2	7,732	2,383	2	2	2	0%	0	0	1	0	2,383
133	Waru Karanganyar	2	4,213	1,385	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,385
134	Nglobar	2	4,149	1,389	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,389
135	Kedungrejo	2	5,663	1,774	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,774
136	Ngembak	2	6,071	2,109	2	2	2	0%	0	0	1	0	2,109
137	Cingkrong	2	6,289	2,190	2	2	2	0%	0	0	1	0	2,190
138	Pulorejo	2	3,567	1,098	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,098
139	Putat	2	5,092	1,366	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,366
140	Jangkungharjo	2	5,784	1,695	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,695
141	Temon	2	4,477	1,500	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,500

No	Desa / Kel	Zona	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) 20 tahun mendatang; 1=urban 2 = rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Persentase jumlah sampah Rumah Tangga yang terkumpul dan terangkut (%)	Jumlah TPS yang ada (Units)	Jumlah TPS-3R yang ada (Units)	Jumlah Pasar	Mendapat Pelayanan (%)	Tidak Mendapat Pelayanan (%)
142	Lemahputih	2	3,229	1,193	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,193
143	Tirem	2	4,703	1,514	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,514
144	Tegalsumur	2	3,100	982	2	2	2	0%	0	0	0	0	982
145	Kandangrejo	2	4,165	2,399	2	2	2	0%	0	0	0	0	2,399
146	Selojari	2	2,124	763	2	2	2	0%	0	0	0	0	763
147	Taruman	2	4,216	1,604	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,604
148	Terkesi	2	5,932	1,609	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,609
149	Jenengan	2	2,384	838	2	2	2	0%	0	0	0	0	838
150	Wandankemiri	2	1,910	626	2	2	2	0%	0	0	0	0	626
151	Tungu	2	1,947	624	2	2	2	0%	0	0	1	0	624
152	Pahesan	2	2,150	652	2	2	2	0%	0	0	0	0	652
153	Latak	2	4,427	1,226	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,226
154	Sumurgede	2	2,548	882	2	2	2	0%	0	0	0	0	882
155	Sambung	2	4,194	1,394	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,394
156	Ketangirejo	2	4,027	1,273	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,273
157	Anggaswangi	2	1,530	534	2	2	2	0%	0	0	0	0	534
158	Guci	2	1,757	673	2	2	2	0%	0	0	0	0	673
159	Werdoyo	2	1,951	648	2	2	2	0%	0	0	0	0	648
160	Guyangan	2	1,977	734	2	2	2	0%	0	0	0	0	734
161	Gundi	2	1,598	568	2	2	2	0%	0	0	0	0	568
162	Jatilor	2	2,669	941	2	2	2	0%	0	0	0	0	941
163	Sumberagung	2	1,630	566	2	2	2	0%	0	0	0	0	566

No	Desa / Kel	Zona	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) 20 tahun mendatang; 1=urban 2 = rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Persentase jumlah sampah Rumah Tangga yang terkumpul dan terangkut (%)	Jumlah TPS yang ada (Units)	Jumlah TPS-3R yang ada (Units)	Jumlah Pasar	Mendapat Pelayanan (%)	Tidak Mendapat Pelayanan (%)
164	Beringin	2	1,767	603	2	2	2	0%	0	0	0	0	603
165	Kemloko	2	4,206	1,503	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,503
166	Ketitang	2	1,764	567	2	2	2	0%	0	0	1	0	567
167	Kopek	2	1,505	563	2	2	2	0%	0	0	0	0	563
168	Dorolegi	2	2,789	957	2	2	2	0%	0	0	0	0	957
169	Rajek	2	2,279	834	2	2	2	0%	0	0	0	0	834
170	Harjowinangun	2	4,511	1,138	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,138
171	Karanggeneng	2	3,705	1,295	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,295
172	Wanutunggal	2	1,663	571	2	2	2	0%	0	0	0	0	571
173	Manggarwetan	2	3,166	1,103	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,103
174	Manggarmas	2	4,495	1,264	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,264
175	Tinanding	2	1,981	612	2	2	2	0%	0	0	0	0	612
176	Penadaran	2	4,346	887	2	2	2	0%	0	0	1	0	887
177	Gelapan	2	1,613	323	2	2	2	0%	0	0	0	0	323
178	Ngroto	2	5,223	1,240	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,240
179	Ginggangtani	2	4,361	844	2	2	2	0%	0	0	0	0	844
180	Jeketro	2	3,004	491	2	2	2	0%	0	0	1	0	491
181	Saban	2	1,767	410	2	2	2	0%	0	0	0	0	410
182	Mlilir	2	3,658	920	2	2	2	0%	0	0	0	0	920
183	Papanrejo	2	2,232	739	2	2	2	0%	0	0	0	0	739
184	Trisari	2	2,629	754	2	2	2	0%	0	0	0	0	754
185	Rowosari	2	2,409	1,004	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,004



No	Desa / Kel	Zona	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) 20 tahun mendatang; 1=urban 2 = rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Persentase jumlah sampah Rumah Tangga yang terkumpul dan terangkut (%)	Jumlah TPS yang ada (Units)	Jumlah TPS-3R yang ada (Units)	Jumlah Pasar	Mendapat Pelayanan (%)	Tidak Mendapat Pelayanan (%)
186	Jatipecaron	2	2,092	622	2	2	2	0%	0	0	0	0	622
187	Tambakan	2	3,185	1,114	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,114
188	Ringinkidul	2	1,795	573	2	2	2	0%	0	0	0	0	573
189	Ringinharjo	2	3,494	1,099	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,099
190	Tlogomulyo	2	4,362	1,420	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,420
191	Kebonagung	2	4,815	1,393	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,393
192	Tlogorejo	2	4,321	1,137	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,137
193	Medani	2	2,001	561	2	2	2	0%	0	0	0	0	561
194	Sukorejo	2	2,778	966	2	2	2	0%	0	0	0	0	966
195	Tanggirejo	2	1,405	483	2	2	2	0%	0	0	0	0	483
196	Gebangan	2	1,019	266	2	2	2	0%	0	0	0	0	266
197	Kejawen	2	1,560	546	2	2	2	0%	0	0	0	0	546
198	Karangpasar	2	2,522	718	2	2	2	0%	0	0	0	0	718
199	Cangkring	2	1,932	604	2	2	2	0%	0	0	0	0	604
200	Gaji	2	1,696	560	2	2	2	0%	0	0	0	0	560
201	Ringinpitu	2	4,000	1,381	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,381
202	Mrisi	2	4,598	1,460	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,460
203	Ngambakrejo	2	4,610	1,503	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,503
204	Kapung	2	2,377	773	2	2	2	0%	0	0	1	0	773
205	Kaliwenang	2	2,259	942	2	2	2	0%	0	0	0	0	942
206	Padang	2	3,894	1,260	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,260
	<b>Jumlah</b>	<b>412</b>	<b>906,402</b>	<b>303,133</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>368</b>	<b>302,765</b>

No	Desa / Kel	Zona	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) 20 tahun mendatang; 1=urban 2 = rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Persentase jumlah sampah Rumah Tangga yang terkumpul dan terangkut (%)	Jumlah TPS yang ada (Units)	Jumlah TPS-3R yang ada (Units)	Jumlah Pasar	Mendapat Pelayanan (%)	Tidak Mendapat Pelayanan (%)
	<b>Perhitungan</b>											<b>0.12%</b>	<b>99.88%</b>
	<b>Zona 3</b>												
1	Juworo	3	3,268	575	2	2	2	0%	0	0	0	0	575
2	Ngrandu	3	4,559	1,982	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,982
3	Nglinduk	3	3,522	1,318	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,318
4	Pelem	3	6,509	1,891	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,891
5	Karangrejo	3	4,436	1,781	2	2	2	0%	0	0	1	0	1,781
6	Menawan	3	4,515	1,600	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,600
7	Kunjeng	3	2,924	1,032	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,032
8	Baturagung	3	5,375	1,621	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,621
9	Mangunsari	3	2,737	720	2	2	2	0%	0	0	0	0	720
10	Tajemsari	3	2,733	758	2	2	2	0%	0	0	0	0	758
11	Kedungwungu	3	3,186	871	2	2	2	0%	0	0	0	0	871
12	Pepe	3	3,001	833	2	2	2	0%	0	0	0	0	833
13	Curug	3	2,022	575	2	2	2	0%	0	0	0	0	575
14	Tunjungharjo	3	4,370	1,213	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,213
15	Brabo	3	5,235	1,467	2	2	2	0%	0	0	0	0	1,467
	<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>58,392</b>	<b>18,237</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>18,237</b>
	<b>Perhitungan</b>											<b>0%</b>	<b>100%</b>
	<b>Zona 4</b>												
1	Kedungjati	4	5,479	1,798	1	1	1	0%	0	0	1	0	1,798
2	Sumberjosari	4	11,467	4,044	1	1	1	0%	0	0	1	0	4,044

No	Desa / Kel	Zona	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) 20 tahun mendatang; 1=urban 2 = rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Persentase jumlah sampah Rumah Tangga yang terkumpul dan terangkut (%)	Jumlah TPS yang ada (Units)	Jumlah TPS-3R yang ada (Units)	Jumlah Pasar	Mendapat Pelayanan (%)	Tidak Mendapat Pelayanan (%)
3	Mojoangung	4	6,391	2,191	1	1	1	0%	0	0	1	0	2,191
4	Wolo	4	4,029	1,421	1	1	1	0%	0	0	0	0	1,421
5	Ngeluk	4	2,422	967	1	1	1	0%	0	0	0	0	967
6	Penawangan	4	2,837	984	1	1	1	0%	0	0	1	0	984
7	Sindurejo	4	8,280	3,179	1	1	1	15%	0	0	1	476.85	2,702
8	Depok	4	12,809	4,274	1	1	1	0%	0	0	1	0	4,274
9	Pilangpayung	4	5,240	2,202	1	1	1	0%	0	0	1	0	2,202
10	Geyer	4	5,272	1,793	1	1	1	0%	0	0	0	0	1,793
11	Ledokdawan	4	5,726	1,989	1	1	1	0%	0	0	0	0	1,989
12	Tuko	4	10,174	2,285	1	1	1	0%	0	0	0	0	2,285
13	Panunggalan	4	10,162	2,231	1	1	1	0%	0	0	0	0	2,231
14	Mangunrejo	4	6,092	2,298	1	1	1	0%	0	0	0	0	2,298
15	Banjarsari	4	5,369	1,603	1	1	1	0%	0	0	0	0	1,603
16	Kalisari	4	6,469	1,911	1	1	1	0%	0	0	0	0	1,911
17	Grabagan	4	3,807	1,262	1	1	1	0%	0	0	0	0	1,262
18	Sulursari	4	6,664	2,038	1	1	1	0%	0	0	2	0	2,038
19	Tahunan	4	4,577	1,497	1	1	1	0%	0	0	0	0	1,497
20	Ngaringan	4	2,801	1,077	1	1	1	0%	0	0	1	0	1,077
21	Tanjungharjo	4	6,781	2,297	1	1	1	0%	0	0	1	0	2,297
22	Kunden	4	8,000	2,979	1	1	1	50%	1	0	1	1489.5	1,490
23	Wirosari	4	5,040	1,855	1	1	1	50%	2	0	1	927.5	928
24	Selo	4	8,373	2,900	1	1	1	0%	0	0	2	0	2,900

No	Desa / Kel	Zona	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) 20 tahun mendatang; 1=urban 2 = rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Persentase jumlah sampah Rumah Tangga yang terkumpul dan terangkut (%)	Jumlah TPS yang ada (Units)	Jumlah TPS-3R yang ada (Units)	Jumlah Pasar	Mendapat Pelayanan (%)	Tidak Mendapat Pelayanan (%)
25	Tawangharjo	4	4,883	1,750	1	1	1	18%	1	0	1	315	1,435
26	Pojok	4	5,553	2,049	1	1	1	0%	0	0	0	0	2,049
27	Getasrejo	4	5,874	1,474	1	1	1	0%	0	0	0	0	1,474
28	Ngabenrejo	4	4,898	1,206	1	1	1	0%	0	0	0	0	1,206
29	Grobogan	4	7,418	2,500	1	1	1	15%	2	0	1	375	2,125
30	Karangrejo	4	5,995	1,631	1	1	1	0%	0	0	0	0	1,631
31	Danyang	4	9,429	2,596	1	1	1	80%	0	1	0	2076.8	519
32	Kalongan	4	10,475	3,430	1	1	1	80%	0	0	1	2744	686
33	Ngraji	4	9,413	2,718	1	1	1	0%	0	0	1	0	2,718
34	Karanganyar	4	5,936	1,749	1	1	1	0%	0	0	1	0	1,749
35	Purwodadi	4	23,555	6,353	1	1	1	80%	0	0	2	5082.4	1,271
36	Kuripan	4	18,811	4,924	1	1	1	80%	0	0	2	3939.2	985
37	Menduran	4	8,056	2,112	1	1	1	0%	0	0	0	0	2,112
38	Karangsari	4	4,897	1,778	1	1	1	0%	0	0	1	0	1,778
39	Kronggen	4	7,588	2,254	1	1	1	0%	0	0	1	0	2,254
40	Penganten	4	3,804	1,441	1	1	1	0%	0	0	0	0	1,441
41	Klambu	4	5,591	2,051	1	1	1	20%	1	1	1	410.2	1,641
42	Klampok	4	2,838	837	1	1	1	0%	0	0	0	0	837
43	Godong	4	6,274	2,078	1	1	1	50%	2	0	1	1039	1,039
44	Bugel	4	3,423	1,073	1	1	1	50%	1	0	1	536.5	537
45	Kemiri	4	2,891	1,010	1	1	1	0%	0	0	0	0	1,010
46	Kuwaron	4	8,605	2,265	1	1	1	60%	1	0	0	1359	906

No	Desa / Kel	Zona	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) 20 tahun mendatang; 1=urban 2 = rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Persentase jumlah sampah Rumah Tangga yang terkumpul dan terangkut (%)	Jumlah TPS yang ada (Units)	Jumlah TPS-3R yang ada (Units)	Jumlah Pasar	Mendapat Pelayanan (%)	Tidak Mendapat Pelayanan (%)
47	Gubug	4	8,773	3,079	1	1	1	60%	3	0	1	1847.4	1,232
48	Pranten	4	1,967	605	1	1	1	0%	0	0	0	0	605
49	Tegowanu Wetan	4	6,546	1,659	1	1	1	0%	0	0	0	0	1,659
50	Tegowanu Kulon	4	4,627	1,309	1	1	1	0%	0	0	1	0	1,309
51	Sugihmanik	4	6,285	1,781	1	1	1	0%	0	0	1	0	1,781
52	Tanggungharjo	4	6,158	2,104	1	1	1	0%	0	0	1	0	2,104
	<b>Jumlah</b>	<b>208</b>	<b>354,824</b>	<b>110,891</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>22,618</b>	<b>88,273</b>
	<b>Perhitungan</b>											<b>20.40%</b>	<b>79.60%</b>

Sumber : Profil Sanitasi Kab. Grobogan, diolah, 2016.

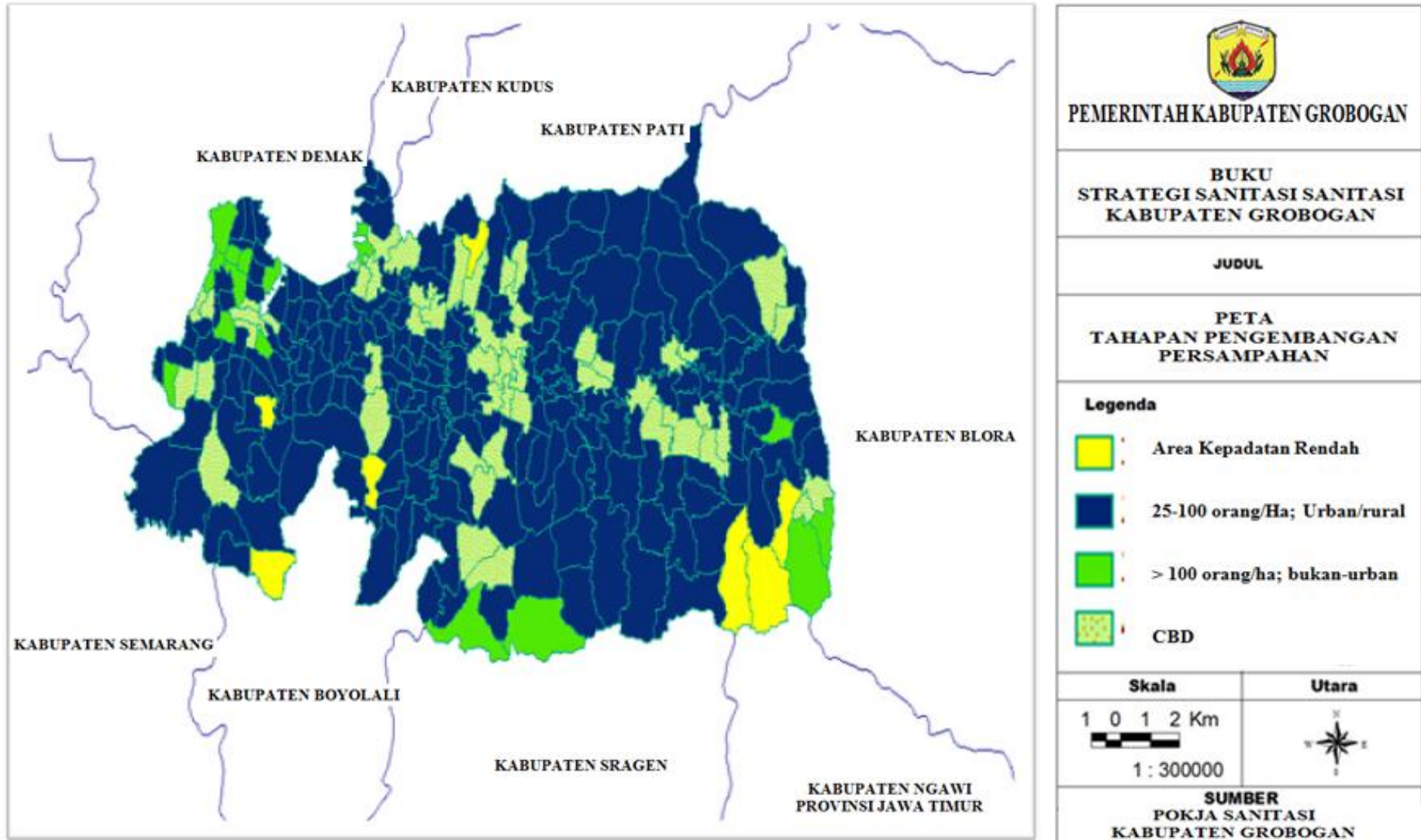
Tabel 3.5. Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Grobogan

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Cakupan layanan (%)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
			(1-2 tahun)	(5 tahun)	(10-15 tahun)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	<b>Zona 1</b>				
1	Prosentase sampah yang terangkut ke TPA	0%	5%	10%	15%
2	Prosentasi sampah tereduksi melalui 3R	0%	2%	3%	5%
3	Prosentasi sampah dikelola mandiri oleh masyarakat di sumber	0%	2%	5%	10%
4	Prosentasi sampah tidak terolah	100%	91%	82%	70%
	<b>Sub total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Zona 2</b>				
1	Prosentase sampah yang terangkut ke TPA	0.12%	10%	15%	20%
2	Prosentasi sampah tereduksi melalui 3R	0%	3%	4%	6%
3	Prosentasi sampah dikelola mandiri oleh masyarakat di sumber	0%	3%	5%	10%
4	Prosentasi sampah tidak terolah	99.88%	84%	76%	64%
	<b>Sub total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Zona 3</b>				
1	Prosentase sampah yang terangkut ke TPA	0%	3%	5%	8%
2	Prosentasi sampah tereduksi melalui 3R	0%	2%	5%	8%
3	Prosentasi sampah dikelola mandiri oleh masyarakat di sumber	0%	3%	6%	10%
4	Prosentasi sampah tidak terolah	100%	92%	84%	74%
	<b>Sub total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Zona 4</b>				
1	Prosentase sampah yang terangkut ke TPA	20%	25%	40%	60%
2	Prosentasi sampah tereduksi melalui 3R	0%	5%	10%	15%
3	Prosentasi sampah dikelola mandiri oleh masyarakat di sumber	0%	2%	3%	5%
4	Prosentasi sampah tidak terolah	80%	68%	47%	20%
	<b>Sub total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Profil Sanitasi Kab. Grobogan, diolah, 2016.

Peta 3.2

Peta Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Grobogan



### C. Tahapan Pengembangan Sanitasi Drainase Perkotaan

Untuk membuat pentahapan pembangunan sanitasi sektor drainase, perlu dilihat terlebih dahulu hasil identifikasi permasalahan utama yang telah dirumuskan dalam study diagram sistem sanitasi (DSS). Adapun permasalahan utama yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- ❖ Belum ada regulasi yang mengatur tentang drainase
- ❖ Pengelolaan drainase masih ditangani tingkat eselon IV, idealnya eselon III
- ❖ Rendahnya biaya operasional
- ❖ Anggaran APBD II masih terbatas
- ❖ Media komunikasi yang kurang
- ❖ Kesadaran masyarakat dalam hal drainase masih kurang
- ❖ Peran serta perusahaan/ swasta belum optimal
- ❖ Partisipasi masyarakat masih rendah
- ❖ Masyarakat membuang sampah di saluran drainase
- ❖ Sulitnya medan dan letak lokasi yang naik turun

Pengembangan sektor drainase ditentukan oleh instrumen dengan melihat data area terbangun, jumlah penduduk, fungsi perkotaan dan area permukiman terdampak genangan dengan melihat estimasi genangan, data genangan dan luas area permukiman rawan genangan banjir. Adapun hasil perhitungan dari profil sanitasi Kabupaten Kendal untuk sektor drainase adalah sebagai berikut :

Gambar 3.3 Zona Sistem Drainase

<b>Zona Drainase</b>	
	zona 1
Jumlah penduduk saat ini	: 1,351,412
Luas area permukiman yang rawan banjir	: 628
Saran Pilihan Drop Down-Menu	:
Tipe Kab/Kota	: kabkot besar
Rata-rata kemiringan lahan	: POKJA yang menentukan
Apakah area terpengaruh pasang surut	: tidak
Bagaimana tingkat risiko banjir yang disebutkan di Buku Putih?	: rendah

Sumber : Data Profil Sanitasi Kab. Grobogan, 2016



Secara umum, terdapat 628 Ha wilayah permukiman di Kabupaten Grobogan yang rawan banjir. Penyebab banjir tersebut bukan hanya dikarenakan kondisi drainase yang tidak baik namun juga dikarenakan pengaruh musim hujan.

Hasil pemetaan zona resiko sektor drainase di Kabupaten Grobogan terbagi menjadi resiko tinggi dan resiko rendah berdasarkan hasil olah data dalam profil sanitasi Kabupaten Grobogan 2016. Wilayah yang mendapatkan nilai 1 dan 2 termasuk dalam zona resiko rendah sedangkan wilayah yang mendapatkan nilai 3 dan 4 dimasukkan dalam tingkat resiko tinggi.

**Tabel 3.6 Penyepakatan Wilayah Zona Drainase**

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan
<b>Zona 1 - 2 ( Resiko Rendah )</b>										
1	Prigi	1	1,518	55	1,614	2	2	2	0	0%
2	Ngombak	1	1,419	54	2,929	2	2	2	1	10%
3	Kentengsari	1	1,106	95	2,792	2	2	2	0	0%
4	Karanglangu	1	1,281	172	5,021	2	2	2	1	10%
5	Panimbo	1	1,386	100	2,178	2	2	2	0	0%
6	Deras	1	1,259	75	3,616	2	2	2	1	10%
7	Klitikan	1	148	47	1,175	2	2	2	0	0%
8	Kedungjati	1	1,634	95	5,479	1	1	2	1	10%
9	Kalimaro	1	1,351	124	5,177	2	2	2	0	0%
10	Jumo	1	366	95	4,087	2	2	2	1	10%
11	Wates	1	386	142	3,175	2	2	2	1	10%
12	Gunungtumpeng	1	1,156	109	3,457	2	2	2	0	0%
13	Ketro	1	1,648	171	8,051	2	2	2	0	0%
14	Sendangharjo	1	1,245	288	9,562	2	2	2	0	0%
15	Karanganyar	1	386	103	2,300	2	2	2	0	0%
16	Parakan	1	192	42	2,166	2	2	2	0	0%
17	Nampu	1	1,886	171	8,664	2	2	2	0	0%

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan
18	Karangsono	1	492	174	4,925	2	2	2	0	0%
19	Jetis	1	203	46	2,443	2	2	2	0	0%
20	Telawah	1	323	74	2,938	2	2	2	0	0%
21	Cekel	1	473	66	2,676	2	2	2	0	0%
22	Mangin	1	1,027	84	6,496	2	2	2	1	10%
23	Sumberjosari	1	1,345	205	11,467	1	1	2	0	0%
24	Mojoangung	1	549	118	6,391	1	1	2	1	10%
25	Pangkalan	1	276	56	2,470	2	2	2	1	10%
26	Rawoh	1	239	38	2,234	2	2	2	1	10%
27	Dempel	1	321	91	3,275	2	2	2	0	0%
28	Termas	1	691	63	2,814	2	2	2	0	0%
29	Putatnganten	1	615	104	4,396	2	2	2	0	0%
30	Temurejo	1	994	83	2,975	2	2	2	0	0%
31	Lajer	1	795	149	7,225	2	2	2	0	0%
32	Sedadi	1	401	75	4,171	2	2	2	0	0%
33	Bologarang	1	665	81	3,255	2	2	2	0	0%
34	Karangwader	1	427	60	3,092	2	2	2	0	0%
35	Toko	1	254	42	1,196	2	2	2	0	0%
36	Pengkol	1	662	89	4,337	2	2	2	0	0%
37	Leyangan	1	207	48	2,939	2	2	2	0	0%
38	Watupawon	1	308	37	1,573	2	2	2	0	0%
39	Tunggu	1	208	31	1,388	2	2	2	0	0%
40	Jipang	1	279	59	2,639	2	2	2	0	0%
41	Kramat	1	410	90	3,024	2	2	2	0	0%

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan
42	Curut	1	147	33	1,238	2	2	2	0	0%
43	Wedoro	1	229	60	2,111	2	2	2	0	0%
44	Kluwan	1	389	86	3,898	2	2	2	0	0%
45	Karangpaing	1	292	49	2,279	2	2	2	0	0%
46	Pulutan	1	224	45	2,830	2	2	2	0	0%
47	Winong	1	294	50	2,301	2	2	2	0	0%
48	Wolo	1	434	64	4,029	1	1	2	0	0%
49	Ngeluk	1	354	32	2,422	1	1	2	0	0%
50	Penawangan	1	441	63	2,837	1	1	2	0	0%
51	Dimoro	1	948	173	7,682	2	2	2	0	0%
52	Genengadal	1	493	93	5,933	2	2	2	0	0%
53	Sindurejo	1	895	169	8,280	1	1	2	0	0%
54	Bandungharjo	1	1,406	174	6,633	2	2	2	1	10%
55	Genengsari	1	832	118	3,559	2	2	2	1	10%
56	Kenteng	1	1,288	214	7,471	2	2	2	0	0%
57	Ngrandah	1	718	156	5,728	2	2	2	0	0%
58	Tunggak	1	792	144	7,175	2	2	2	1	10%
59	Boloh	1	859	178	7,663	2	2	2	0	0%
60	Plosoharjo	1	450	144	5,595	2	2	2	0	0%
61	Tambirejo	1	546	134	7,822	2	2	2	0	0%
62	Depok	1	762	174	12,809	1	1	2	0	0%
63	Krangganharjo	1	414	79	4,892	2	2	2	0	0%
64	Sugihan	1	582	113	6,307	2	2	2	0	0%
65	Pilangpayung	1	496	96	5,240	1	1	2	0	0%

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan
66	Katong	1	451	82	3,984	2	2	2	0	0%
67	Rambat	1	708	41	2,187	2	2	2	0	0%
68	Kalambangancar	1	1,198	33	2,085	2	2	2	0	0%
69	Juworo	1	1,241	27	3,268	2	2	2	0	0%
70	Monggot	1	1,460	61	5,428	2	2	2	0	0%
71	Ngrandu	1	2,588	35	4,559	2	2	2	0	0%
72	Bangsri	1	1,635	75	3,657	2	2	2	0	0%
73	Jambangan	1	2,417	123	6,203	2	2	2	1	10%
74	Geyer	1	824	43	5,272	1	1	2	0	0%
75	Ledokdawan	1	1,906	159	5,726	1	1	2	0	0%
76	Sobo	1	1,103	85	5,167	2	2	2	0	0%
77	Suru	1	656	67	4,781	2	2	2	0	0%
78	Randurejo	1	2,663	173	5,804	2	2	2	0	0%
79	Mlowokarangtalun	1	1,712	127	5,605	2	2	2	0	0%
80	Pojok	1	1,439	183	6,779	2	2	2	0	0%
81	Jatiharjo	1	1,011	123	7,286	2	2	2	0	0%
82	Sidorejo	1	1,023	252	9,223	2	2	2	0	0%
83	Tuko	1	858	162	10,174	1	1	2	0	0%
84	Panunggalan	1	692	180	10,162	1	1	2	0	0%
85	Mangunrejo	1	762	135	6,092	1	1	2	0	0%
86	Jetaksari	1	550	98	5,816	2	2	2	0	0%
87	Pulokulon	1	833	235	10,647	2	2	2	0	0%
88	Jambon	1	628	160	7,575	2	2	2	0	0%
89	Sembungharjo	1	594	178	7,995	2	2	2	0	0%

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan
90	Bago	1	1,209	64	3,273	2	2	2	0	0%
91	Simo	1	1,397	221	5,432	2	2	2	0	0%
92	Rejosari	1	1,791	122	6,891	2	2	2	0	0%
93	Pakis	1	985	199	7,500	2	2	2	0	0%
94	Crewek	1	653	147	4,828	2	2	2	0	0%
95	Banjarsari	1	495	145	5,369	1	1	2	0	0%
96	Kradenan	1	1,178	194	7,706	2	2	2	0	0%
97	Sambongbangi	1	497	148	5,376	2	2	2	0	0%
98	Sengonwetan	1	365	53	3,626	2	2	2	0	0%
99	Banjardowo	1	515	143	6,280	2	2	2	0	0%
100	Kalisari	1	475	213	6,469	1	1	2	0	0%
101	Kuwu	1	286	135	5,530	2	2	2	0	0%
102	Grabagan	1	469	116	3,807	1	1	2	0	0%
103	Tanjungsari	1	460	118	4,035	2	2	2	0	0%
104	Keyongan	1	3,011	606	5,229	2	2	2	0	0%
105	Suwatu	1	3,104	651	2,544	2	2	2	0	0%
106	Nglinduk	1	2,020	34	3,522	2	2	2	0	0%
107	Pelem	1	1,306	47	6,509	2	2	2	0	0%
108	Sulursari	1	246	44	6,664	1	1	2	0	0%
109	Tlogotirto	1	819	189	4,367	1	1	2	0	0%
110	Gabus	1	416	44	3,302	2	2	2	0	0%
111	Pandanharum	1	1,591	78	6,426	2	2	2	0	0%
112	Tahunan	1	724	35	4,577	1	1	2	0	0%
113	Bendoharjo	1	601	75	5,573	2	2	2	0	0%

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan
114	Kalipang	1	492	42	3,599	2	2	2	0	0%
115	Karangrejo	1	432	36	4,436	2	2	2	0	0%
116	Sendangrejo	1	410	95	3,334	2	2	2	0	0%
117	Sarirejo	1	578	118	3,743	2	2	2	0	0%
118	Kalangdosari	1	1,011	70	4,522	2	2	2	0	0%
119	Kalanglundo	1	1,081	133	7,320	2	2	2	0	0%
120	Truwolu	1	605	133	7,498	2	2	2	0	0%
121	Pendem	1	370	64	4,042	2	2	2	0	0%
122	Bandungsari	1	1,660	129	8,614	2	2	2	0	0%
123	Ngaringan	1	357	81	2,801	1	1	2	0	0%
124	Ngarap-arap	1	662	59	4,944	2	2	2	0	0%
125	Belor	1	642	147	4,878	2	2	2	0	0%
126	Tanjungharjo	1	2,056	140	6,781	1	1	2	0	0%
127	Sumberagung	1	2,239	183	7,770	2	2	2	0	0%
128	Sambirejo	1	1,402	201	5,767	2	2	2	0	0%
129	Tanjungrejo	1	634	144	5,788	2	2	2	0	0%
130	Kunden	1	410	77	8,000	1	1	2	0	0%
131	Tambahrejo	1	714	163	6,968	2	2	2	0	0%
132	Kropak	1	389	88	4,039	2	2	2	0	0%
133	Kalirejo	1	417	114	5,042	2	2	2	0	0%
134	Dapurno	1	386	108	4,080	2	2	2	0	0%
135	Mojorebo	1	1,928	110	4,989	2	2	2	0	0%
136	Wirosari	1	207	64	5,040	1	1	2	0	0%
137	Gedangan	1	1,397	79	4,274	2	2	2	0	0%

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan
138	Tambakselo	1	2,831	190	10,152	2	2	2	0	0%
139	Karangasem	1	1,778	134	9,250	2	2	2	0	0%
140	Dokoro	1	1,561	184	5,690	2	2	2	0	0%
141	Tegalrejo	1	1,378	141	6,728	2	2	2	0	0%
142	Pulongrambe	1	297	70	2,818	2	2	2	0	0%
143	Mayahan	1	448	104	5,631	2	2	2	0	0%
144	Jono	1	410	83	4,025	2	2	2	0	0%
145	Selo	1	495	177	8,373	1	1	2	0	0%
146	Tawangharjo	1	247	117	4,883	1	1	2	0	0%
147	Tarub	1	690	162	6,105	2	2	2	0	0%
148	Pojok	1	543	111	5,553	1	1	2	0	0%
149	Plosorejo	1	1,229	91	6,482	2	2	2	0	0%
150	Godan	1	2,384	70	5,957	2	2	2	0	0%
151	Kemadohatur	1	1,617	77	3,954	2	2	2	0	0%
152	Getasrejo	1	416	152	5,874	1	1	2	0	0%
153	Rejosari	1	623	122	5,808	2	2	2	0	0%
154	Tanggungharjo	1	1,163	108	6,390	2	2	2	0	0%
155	Teguhan	1	436	138	6,156	2	2	2	0	0%
156	Ngabenrejo	1	387	112	4,898	1	1	2	0	0%
157	Grobogan	1	300	158	7,418	1	1	2	0	0%
158	Karangrejo	1	614	125	5,995	1	1	2	0	0%
159	Putatsari	1	968	175	10,865	2	2	2	0	0%
160	Lebak	1	1,963	175	9,159	2	2	2	0	0%
161	Lebengjumuk	1	1,282	95	2,315	2	2	2	0	0%



No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan
162	Sedayu	1	901	126	3,712	2	2	2	0	0%
163	Sumberjatipohon	1	1,403	249	6,016	2	2	2	0	0%
164	Candisari	1	555	167	4,120	2	2	2	0	0%
165	Genuksuran	1	327	70	4,397	2	2	2	0	0%
166	Kalongan	1	302	137	10,475	1	1	2	1	10%
167	Ngraji	1	572	128	9,413	1	1	2	1	10%
168	Kandangan	1	503	113	5,442	2	2	2	1	10%
169	Nambuhan	1	680	136	7,732	2	2	2	1	10%
170	Waru Karanganyar	1	461	90	4,213	2	2	2	0	0%
171	Nglobar	1	435	111	4,149	2	2	2	1	10%
172	Kedungrejo	1	454	84	5,663	2	2	2	1	10%
173	Karanganyar	1	354	105	5,936	1	1	2	1	10%
174	Ngembak	1	432	125	6,071	2	2	2	0	0%
175	Cingkrong	1	570	194	6,289	2	2	2	0	0%
176	Pulorejo	1	421	107	3,567	2	2	2	1	10%
177	Putat	1	475	76	5,092	2	2	2	1	10%
178	Menduran	1	552	123	8,056	1	1	2	1	10%
179	Jangkunharjo	1	396	117	5,784	2	2	2	1	10%
180	Temon	1	318	88	4,477	2	2	2	1	10%
181	Lemahputih	1	323	63	3,229	2	2	2	1	10%
182	Tirem	1	547	84	4,703	2	2	2	0	0%
183	Karangsari	1	492	85	4,897	1	1	2	1	10%
184	Kronggen	1	962	155	7,588	1	1	2	1	10%
185	Katekan	1	1,088	198	4,353	1	1	2	0	0%

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan
186	Tegalsumur	1	811	133	3,100	2	2	2	0	0%
187	Kandangrejo	1	488	55	4,165	2	2	2	1	10%
188	Selojari	1	304	48	2,124	2	2	2	1	10%
189	Taruman	1	857	140	4,216	2	2	2	0	0%
190	Penganten	1	655	90	3,804	1	1	2	0	0%
191	Klambu	1	517	64	5,591	1	1	2	1	10%
192	Menawan	1	299	45	4,515	2	2	2	1	10%
193	Terkesi	1	831	65	5,932	2	2	2	0	0%
194	Jenangan	1	471	37	2,384	2	2	2	0	0%
195	Wandankemiri	1	234	38	1,910	2	2	2	0	0%
196	Tungu	1	230	42	1,947	2	2	2	0	0%
197	Pahesan	1	234	40	2,150	2	2	2	0	0%
198	Latak	1	449	78	4,427	2	2	2	0	0%
199	Sumurgede	1	392	54	2,548	2	2	2	0	0%
200	Sambung	1	468	72	4,194	2	2	2	0	0%
201	Ketangirejo	1	482	65	4,027	2	2	2	0	0%
202	Anggaswangi	1	213	26	1,530	2	2	2	1	10%
203	Guci	1	274	25	1,757	2	2	2	1	10%
204	Werdoyo	1	225	23	1,951	2	2	2	1	10%
205	Guyangan	1	348	29	1,977	2	2	2	1	10%
206	Gundi	1	210	25	1,598	2	2	2	0	0%
207	Jatilor	1	340	52	2,669	2	2	2	0	0%
208	Sumberagung	1	256	21	1,630	2	2	2	1	10%
209	Beringin	1	274	41	1,767	2	2	2	0	0%

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan
210	Klampok	1	367	45	2,838	1	1	2	1	10%
211	Kemloko	1	498	64	4,206	2	2	2	1	10%
212	Godong	1	470	208	6,274	1	1	2	1	10%
213	Ketitang	1	257	31	1,764	2	2	2	1	10%
214	Kopek	1	156	21	1,505	2	2	2	0	0%
215	Dorolegi	1	335	49	2,789	2	2	2	0	0%
216	Rajek	1	302	37	2,279	2	2	2	0	0%
217	Harjowinangun	1	430	87	4,511	2	2	2	0	0%
218	Karanggeneng	1	334	48	3,705	2	2	2	0	0%
219	Wanutunggal	1	168	38	1,663	2	2	2	0	0%
220	Manggarwetan	1	294	45	3,166	2	2	2	0	0%
221	Manggarmas	1	380	59	4,495	2	2	2	0	0%
222	Tinanding	1	233	36	1,981	2	2	2	0	0%
223	Penadaran	1	1,057	81	4,346	2	2	2	0	0%
224	Gelapan	1	407	48	1,613	2	2	2	1	10%
225	Ngroto	1	335	124	5,223	2	2	2	1	10%
226	Ginggangtani	1	235	78	4,361	2	2	2	1	10%
227	Jeketro	1	271	56	3,004	2	2	2	1	10%
228	Saban	1	198	65	1,767	2	2	2	1	10%
229	Mlilir	1	320	109	3,658	2	2	2	1	10%
230	Kemiri	1	220	55	2,891	1	1	2	1	10%
231	Papanrejo	1	228	60	2,232	2	2	2	1	10%
232	Kunjeng	1	295	23	2,924	2	2	2	0	0%
233	Trisari	1	277	82	2,629	2	2	2	1	10%

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan
234	Rowosari	1	344	51	2,409	2	2	2	1	10%
235	Pranten	1	204	28	1,967	1	1	2	1	10%
236	Jatipecaron	1	187	63	2,092	2	2	2	1	10%
237	Baturagung	1	420	45	5,375	2	2	2	1	10%
238	Tambakan	1	295	53	3,185	2	2	2	0	0%
239	Ringinkidul	1	158	38	1,795	2	2	2	0	0%
240	Ringinharjo	1	358	65	3,494	2	2	2	1	10%
241	Tlogomulyo	1	420	120	4,362	2	2	2	0	0%
242	Tlogorejo	1	327	53	4,321	2	2	2	1	10%
243	Medani	1	199	48	2,001	2	2	2	1	10%
244	Sukorejo	1	376	66	2,778	2	2	2	1	10%
245	Tegowanu Wetan	1	362	31	6,546	1	1	2	0	0%
246	Tegowanu Kulon	1	182	31	4,627	1	1	2	0	0%
247	Kedungwungu	1	414	36	3,186	2	2	2	1	10%
248	Pepe	1	228	31	3,001	2	2	2	1	10%
249	Curug	1	212	23	2,022	2	2	2	1	10%
250	Gaji	1	213	22	1,696	2	2	2	0	0%
251	Tunjungharjo	1	447	48	4,370	2	2	2	1	10%
252	Ringinpitu	1	1,728	72	4,000	2	2	2	0	0%
253	Mrisi	1	612	95	4,598	2	2	2	0	0%
254	Ngambakrejo	1	498	107	4,610	2	2	2	0	0%
255	Kapung	1	270	64	2,377	2	2	2	0	0%
256	Kaliwenang	1	343	90	2,259	2	2	2	0	0%
257	Sugihmanik	1	1,287	183	6,285	1	1	2	0	0%

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan
258	Tanggungharjo	1	607	88	6,158	1	1	2	0	0%
259	Brabo	1	457	44	5,235	2	2	2	0	0%
260	Padang	1	262	73	3,894	2	2	2	0	0%
261	Padas	2	1,182	87	2,578	2	2	2	1	10%
262	Karanganyar	2	2,838	73	6,890	2	2	2	0	0%
263	Asemrudung	2	1,548	68	5,001	2	2	2	1	10%
264	Karangharjo	2	598	164	7,530	2	2	2	0	0%
265	Tunggulrejo	2	711	92	5,476	2	2	2	0	0%
266	Banjarejo	2	1,064	64	5,642	2	2	2	0	0%
267	Danyang	2	325	70	9,429	1	1	2	1	10%
268	Purwodadi	2	356	218	23,555	1	1	2	1	10%
269	Kuwaron	2	480	210	8,605	1	1	2	1	10%
270	Gubug	2	402	149	8,773	1	1	2	1	10%
271	Kebonagung	2	412	55	4,815	2	2	2	1	10%
272	Tanggirejo	2	228	29	1,405	2	2	2	1	10%
273	Gebangan	2	115	17	1,019	2	2	2	1	10%
274	Kejawen	2	141	22	1,560	2	2	2	1	10%
275	Tajemsari	2	401	26	2,733	2	2	2	1	10%
276	Karangpasar	2	305	38	2,522	2	2	2	1	10%
277	Cangkring	2	317	25	1,932	2	2	2	1	10%
	<b>Jumlah</b>		<b>197,200</b>	<b>27,703</b>	<b>1,318,793</b>					
	<b>Zona 3 - 4 ( Resiko Tinggi )</b>									
1	Bugel	3	58	25	3,423	1	1	2	0	0%
2	Mangunsari	3	288	24	2,737	2	2	2	1	10%

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan
3	Kuripan	4	543	210	18,811	1	1	2	1	10%
	<b>Jumlah</b>		<b>889</b>	<b>260</b>	<b>24,971</b>					

Sumber : Profil Sanitasi Kab. Grobogan, 2016

Permasalahan genangan di Kabupaten Grobogan bukan hanya disebabkan oleh sarana drainase namun juga oleh faktor alam yaitu pada saat turunnya musim hujan. Oleh karena itu, dalam penyelesaian permasalahan genangan bukan hanya dilihat dari sarana dan prasarana drainase saja namun juga dilihat dari fungsi wilayah termasuk *central business district* (CBD) dan luas genangan. Hal ini dikarenakan ada sebagian wilayah yang sudah mempunyai sarana drainase yang cukup baik, namun karena berada di wilayah yang kontur tanahnya rendah sehingga masih terjadi genangan dikarenakan adanya faktor alam. Wilayah yang termasuk dalam CBD tentunya akan menjadi perhatian dalam penanganan masalah genangan, dikarenakan dengan terganggunya daerah CBD tersebut akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian masyarakat.

Penanganan permasalahan drainase terutama berkaitan dengan permasalahan genangan akan dibagi menjadi 3 zona penyelesaian masalah, yaitu :

1. Penanganan jangka pendek (1 – 2 tahun).
2. Penanganan jangka menengah (5 tahun)
3. Penanganan jangka panjang (10 – 15 tahun)

Adapun data tahapan pengembangan penanganan permasalahan genangan seperti terlihat pada tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7 Tahapan Pengembangan Penanganan Genangan

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK) 2015	Kepadatan Penduduk (org/Ha) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan	Luas Genangan (Ha)
<b>Wilayah 1 : Penanganan Jangka Pendek ke Jangka Menengah ( 1 - 5 th )</b>														
1	Kedungjati	1	1,634	95	0.05%	5,479	1,798	58	1	1	2	1	10%	10
2	Mojoagung	1	549	118	0.54%	6,391	2,191	54	1	1	2	1	10%	12
3	Danyang	2	325	70	1.02%	9,429	2,596	135	1	1	2	1	10%	7
4	Kalongan	1	302	137	1.02%	10,475	3,430	76	1	1	2	1	10%	14
5	Ngraji	1	572	128	1.02%	9,413	2,718	74	1	1	2	1	10%	13
6	Karanganyar	1	354	105	1.02%	5,936	1,749	57	1	1	2	1	10%	11
7	Purwodadi	2	356	218	1.02%	23,555	6,353	108	1	1	2	1	10%	22
8	Kuripan	4	543	210	1.02%	18,811	4,924	90	1	1	2	1	10%	21
9	Menduran	1	552	123	0.67%	8,056	2,112	66	1	1	2	1	10%	12
10	Karangsari	1	492	85	0.67%	4,897	1,778	58	1	1	2	1	10%	9
11	Kronggen	1	962	155	0.67%	7,588	2,254	49	1	1	2	1	10%	16
12	Klambu	1	517	64	0.41%	5,591	2,051	88	1	1	2	1	10%	6
13	Klampok	1	367	45	0.48%	2,838	837	63	1	1	2	1	10%	4
14	Godong	1	470	208	0.48%	6,274	2,078	30	1	1	2	1	10%	21
15	Kemiri	1	220	55	0.50%	2,891	1,010	53	1	1	2	1	10%	5
16	Kuwaron	2	480	210	0.50%	8,605	2,265	41	1	1	2	1	10%	21
17	Gubug	2	402	149	0.50%	8,773	3,079	59	1	1	2	1	10%	15

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK) 2015	Kepadatan Penduduk (org/Ha) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan	Luas Genangan (Ha)
18	Pranten	1	204	28	0.50%	1,967	605	71	1	1	2	1	10%	3
	<b>Jumlah</b>		<b>9,301</b>	<b>2,202</b>		<b>146,969</b>	<b>43,828</b>	<b>1,228</b>						<b>220</b>
<b>Wilayah 2 : Penanganan Jangka Menengah ke Jangka Panjang ( 5 - 10 th )</b>														
1	Ngombak	1	1,419	54	0.05%	2,929	944	54	2	2	2	1	10%	5
2	Karanglangu	1	1,281	172	0.05%	5,021	1,596	29	2	2	2	1	10%	17
3	Padas	2	1,182	87	0.05%	2,578	862	30	2	2	2	1	10%	9
4	Deras	1	1,259	75	0.05%	3,616	1,244	48	2	2	2	1	10%	8
5	Jumo	1	366	95	0.05%	4,087	1,390	43	2	2	2	1	10%	10
6	Wates	1	386	142	0.05%	3,175	1,120	22	2	2	2	1	10%	14
7	Mangin	1	1,027	84	0.54%	6,496	2,063	78	2	2	2	1	10%	8
8	Pangkalan	1	276	56	0.54%	2,470	1,250	44	2	2	2	1	10%	6
9	Rawoh	1	239	38	0.54%	2,234	956	59	2	2	2	1	10%	4
10	Bandungharjo	1	1,406	174	0.49%	6,633	2,701	38	2	2	2	1	10%	17
11	Genengsari	1	832	118	0.49%	3,559	1,253	30	2	2	2	1	10%	12
12	Tunggak	1	792	144	0.49%	7,175	2,472	50	2	2	2	1	10%	14
13	Asemrudung	2	1,548	68	0.05%	5,001	2,184	74	2	2	2	1	10%	7
14	Jambangan	1	2,417	123	0.05%	6,203	2,375	50	2	2	2	1	10%	12
15	Kandangan	1	503	113	1.02%	5,442	1,954	48	2	2	2	1	10%	11
16	Nambuhan	1	680	136	1.02%	7,732	2,383	57	2	2	2	1	10%	14
17	Nglobar	1	435	111	1.02%	4,149	1,389	37	2	2	2	1	10%	11



No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK) 2015	Kepadatan Penduduk (org/Ha) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1=ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan	Luas Genangan (Ha)
18	Kedungrejo	1	454	84	1.02%	5,663	1,774	67	2	2	2	1	10%	8
19	Pulorejo	1	421	107	1.02%	3,567	1,098	33	2	2	2	1	10%	11
20	Putat	1	475	76	1.02%	5,092	1,366	67	2	2	2	1	10%	8
21	Jangkunharjo	1	396	117	0.67%	5,784	1,695	50	2	2	2	1	10%	12
22	Temon	1	318	88	0.67%	4,477	1,500	51	2	2	2	1	10%	9
23	Lemahputih	1	323	63	0.67%	3,229	1,193	51	2	2	2	1	10%	6
24	Kandangrejo	1	488	55	0.41%	4,165	2,399	76	2	2	2	1	10%	6
25	Selojari	1	304	48	0.41%	2,124	763	45	2	2	2	1	10%	5
26	Menawan	1	299	45	0.41%	4,515	1,600	100	2	2	2	1	10%	5
27	Anggaswangi	1	213	26	0.48%	1,530	534	58	2	2	2	1	10%	3
28	Guci	1	274	25	0.48%	1,757	673	72	2	2	2	1	10%	2
29	Werdoyo	1	225	23	0.48%	1,951	648	85	2	2	2	1	10%	2
30	Guyangan	1	348	29	0.48%	1,977	734	67	2	2	2	1	10%	3
31	Sumberagung	1	256	21	0.48%	1,630	566	76	2	2	2	1	10%	2
32	Kemloko	1	498	64	0.48%	4,206	1,503	65	2	2	2	1	10%	6
33	Ketitang	1	257	31	0.48%	1,764	567	57	2	2	2	1	10%	3
34	Gelapan	1	407	48	0.50%	1,613	323	33	2	2	2	1	10%	5
35	Ngroto	1	335	124	0.50%	5,223	1,240	42	2	2	2	1	10%	12
36	Ginggangtani	1	235	78	0.50%	4,361	844	56	2	2	2	1	10%	8
37	Jeketro	1	271	56	0.50%	3,004	491	54	2	2	2	1	10%	6
38	Saban	1	198	65	0.50%	1,767	410	27	2	2	2	1	10%	6

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK) 2015	Kepadatan Penduduk (org/Ha) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan	Luas Genangan (Ha)
39	Milir	1	320	109	0.50%	3,658	920	34	2	2	2	1	10%	11
40	Papanrejo	1	228	60	0.50%	2,232	739	37	2	2	2	1	10%	6
41	Trisari	1	277	82	0.50%	2,629	754	32	2	2	2	1	10%	8
42	Rowosari	1	344	51	0.50%	2,409	1,004	48	2	2	2	1	10%	5
43	Jatipecaron	1	187	63	0.50%	2,092	622	33	2	2	2	1	10%	6
44	Baturagung	1	420	45	0.50%	5,375	1,621	120	2	2	2	1	10%	4
45	Ringinharjo	1	358	65	0.50%	3,494	1,099	53	2	2	2	1	10%	7
46	Kebonagung	2	412	55	1.11%	4,815	1,393	88	2	2	2	1	10%	5
47	Tlogorejo	1	327	53	1.11%	4,321	1,137	81	2	2	2	1	10%	5
48	Medani	1	199	48	1.11%	2,001	561	42	2	2	2	1	10%	5
49	Sukorejo	1	376	66	1.11%	2,778	966	42	2	2	2	1	10%	7
50	Tanggirejo	2	228	29	1.11%	1,405	483	48	2	2	2	1	10%	3
51	Mangunsari	3	288	24	1.11%	2,737	720	112	2	2	2	1	10%	2
52	Gebangan	2	115	17	1.11%	1,019	266	60	2	2	2	1	10%	2
53	Kejawen	2	141	22	1.11%	1,560	546	72	2	2	2	1	10%	2
54	Tajemsari	2	401	26	1.11%	2,733	758	107	2	2	2	1	10%	3
55	Karangpasar	2	305	38	1.11%	2,522	718	66	2	2	2	1	10%	4
56	Kedungwungu	1	414	36	1.11%	3,186	871	89	2	2	2	1	10%	4
57	Pepe	1	228	31	1.11%	3,001	833	98	2	2	2	1	10%	3
58	Curug	1	212	23	1.11%	2,022	575	90	2	2	2	1	10%	2
59	Cangkring	2	317	25	1.11%	1,932	604	77	2	2	2	1	10%	3

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK) 2015	Kepadatan Penduduk (org/Ha) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1=ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan	Luas Genangan (Ha)
60	Tunjungharjo	1	447	48	1.11%	4,370	1,213	91	2	2	2	1	10%	5
	<b>Jumlah</b>		<b>29,584</b>	<b>4,076</b>		<b>210,190</b>	<b>68,460</b>	<b>3,544</b>						<b>408</b>
<b>Wilayah 3 : Penanganan Jangka Panjang ( 10 - 15 th )</b>														
1	Prigi	1	1,518	55	0.05%	1,614	592	30	2	2	2	0	0%	0
2	Kentengsari	1	1,106	95	0.05%	2,792	1,022	29	2	2	2	0	0%	0
3	Panimbo	1	1,386	100	0.05%	2,178	686	22	2	2	2	0	0%	0
4	Klitikan	1	148	47	0.05%	1,175	408	25	2	2	2	0	0%	0
5	Kalimaro	1	1,351	124	0.05%	5,177	1,447	42	2	2	2	0	0%	0
6	Gunungtumpeng	1	1,156	109	0.54%	3,457	1,019	32	2	2	2	0	0%	0
7	Ketro	1	1,648	171	0.54%	8,051	2,571	47	2	2	2	0	0%	0
8	Sendangharjo	1	1,245	288	0.54%	9,562	3,033	33	2	2	2	0	0%	0
9	Karanganyar	1	386	103	0.54%	2,300	897	22	2	2	2	0	0%	0
10	Parakan	1	192	42	0.54%	2,166	604	51	2	2	2	0	0%	0
11	Nampu	1	1,886	171	0.54%	8,664	2,504	51	2	2	2	0	0%	0
12	Karangsono	1	492	174	0.54%	4,925	1,605	28	2	2	2	0	0%	0
13	Jetis	1	203	46	0.54%	2,443	705	53	2	2	2	0	0%	0
14	Telawah	1	323	74	0.54%	2,938	981	40	2	2	2	0	0%	0
15	Cekel	1	473	66	0.54%	2,676	757	41	2	2	2	0	0%	0
16	Dempel	1	321	91	0.54%	3,275	1,185	36	2	2	2	0	0%	0
17	Termas	1	691	63	0.54%	2,814	941	45	2	2	2	0	0%	0
18	Putatnganten	1	615	104	0.54%	4,396	1,517	42	2	2	2	0	0%	0

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK) 2015	Kepadatan Penduduk (org/Ha) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan	Luas Genangan (Ha)
19	Temurejo	1	994	83	0.54%	2,975	1,019	36	2	2	2	0	0%	0
20	Lajer	1	795	149	0.52%	7,225	2,189	48	2	2	2	0	0%	0
21	Sedadi	1	401	75	0.52%	4,171	1,263	56	2	2	2	0	0%	0
22	Bologarang	1	665	81	0.52%	3,255	969	40	2	2	2	0	0%	0
23	Karangwader	1	427	60	0.52%	3,092	1,185	51	2	2	2	0	0%	0
24	Toko	1	254	42	0.52%	1,196	926	28	2	2	2	0	0%	0
25	Pengkol	1	662	89	0.52%	4,337	1,624	49	2	2	2	0	0%	0
26	Leyangan	1	207	48	0.52%	2,939	847	61	2	2	2	0	0%	0
27	Watupawon	1	308	37	0.52%	1,573	645	42	2	2	2	0	0%	0
28	Tunggu	1	208	31	0.52%	1,388	545	45	2	2	2	0	0%	0
29	Jipang	1	279	59	0.52%	2,639	906	45	2	2	2	0	0%	0
30	Kramat	1	410	90	0.52%	3,024	1,066	34	2	2	2	0	0%	0
31	Curut	1	147	33	0.52%	1,238	525	38	2	2	2	0	0%	0
32	Wedoro	1	229	60	0.52%	2,111	723	35	2	2	2	0	0%	0
33	Kluwan	1	389	86	0.52%	3,898	1,490	45	2	2	2	0	0%	0
34	Karangpaing	1	292	49	0.52%	2,279	893	47	2	2	2	0	0%	0
35	Pulutan	1	224	45	0.52%	2,830	1,041	62	2	2	2	0	0%	0
36	Winong	1	294	50	0.52%	2,301	818	46	2	2	2	0	0%	0
37	Dimoro	1	948	173	0.49%	7,682	2,887	44	2	2	2	0	0%	0
38	Genengadal	1	493	93	0.49%	5,933	2,479	64	2	2	2	0	0%	0
39	Kenteng	1	1,288	214	0.49%	7,471	2,537	35	2	2	2	0	0%	0

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK) 2015	Kepadatan Penduduk (org/Ha) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1=ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan	Luas Genangan (Ha)
40	Ngrandah	1	718	156	0.49%	5,728	1,769	37	2	2	2	0	0%	0
41	Boloh	1	859	178	0.49%	7,663	2,705	43	2	2	2	0	0%	0
42	Plosoharjo	1	450	144	0.49%	5,595	1,849	39	2	2	2	0	0%	0
43	Tambirejo	1	546	134	0.49%	7,822	2,587	58	2	2	2	0	0%	0
44	Krangganharjo	1	414	79	0.49%	4,892	1,740	62	2	2	2	0	0%	0
45	Sugihan	1	582	113	0.49%	6,307	2,156	56	2	2	2	0	0%	0
46	Katong	1	451	82	0.49%	3,984	1,541	49	2	2	2	0	0%	0
47	Rambat	1	708	41	0.05%	2,187	668	53	2	2	2	0	0%	0
48	Kalangbancar	1	1,198	33	0.05%	2,085	628	63	2	2	2	0	0%	0
49	Juworo	1	1,241	27	0.05%	3,268	575	121	2	2	2	0	0%	0
50	Monggot	1	1,460	61	0.05%	5,428	1,648	89	2	2	2	0	0%	0
51	Ngrandu	1	2,588	35	0.05%	4,559	1,982	130	2	2	2	0	0%	0
52	Bangsri	1	1,635	75	0.05%	3,657	1,294	49	2	2	2	0	0%	0
53	Karanganyar	2	2,838	73	0.05%	6,890	3,247	94	2	2	2	0	0%	0
54	Sobo	1	1,103	85	0.05%	5,167	1,824	61	2	2	2	0	0%	0
55	Suru	1	656	67	0.05%	4,781	1,751	71	2	2	2	0	0%	0
56	Randurejo	1	2,663	173	0.45%	5,804	1,789	34	2	2	2	0	0%	0
57	Mlowokarangtalun	1	1,712	127	0.45%	5,605	1,120	44	2	2	2	0	0%	0
58	Pojok	1	1,439	183	0.45%	6,779	2,523	37	2	2	2	0	0%	0
59	Jatiharjo	1	1,011	123	0.45%	7,286	1,224	59	2	2	2	0	0%	0
60	Sidorejo	1	1,023	252	0.45%	9,223	3,109	37	2	2	2	0	0%	0

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK) 2015	Kepadatan Penduduk (org/Ha) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan	Luas Genangan (Ha)
61	Jetaksari	1	550	98	0.45%	5,816	2,951	59	2	2	2	0	0%	0
62	Pulokulon	1	833	235	0.45%	10,647	3,632	45	2	2	2	0	0%	0
63	Jambon	1	628	160	0.45%	7,575	2,293	47	2	2	2	0	0%	0
64	Karangharjo	2	598	164	0.45%	7,530	2,393	46	2	2	2	0	0%	0
65	Sembungharjo	1	594	178	0.45%	7,995	2,451	45	2	2	2	0	0%	0
66	Bago	1	1,209	64	0.44%	3,273	1,095	51	2	2	2	0	0%	0
67	Simo	1	1,397	221	0.44%	5,432	1,711	25	2	2	2	0	0%	0
68	Rejosari	1	1,791	122	0.44%	6,891	2,228	56	2	2	2	0	0%	0
69	Pakis	1	985	199	0.44%	7,500	2,297	38	2	2	2	0	0%	0
70	Crewek	1	653	147	0.44%	4,828	1,547	33	2	2	2	0	0%	0
71	Kradenan	1	1,178	194	0.44%	7,706	2,452	40	2	2	2	0	0%	0
72	Sambongbangi	1	497	148	0.44%	5,376	2,033	36	2	2	2	0	0%	0
73	Sengonwetan	1	365	53	0.44%	3,626	1,402	69	2	2	2	0	0%	0
74	Banjardowo	1	515	143	0.44%	6,280	1,891	44	2	2	2	0	0%	0
75	Kuwu	1	286	135	0.44%	5,530	1,593	41	2	2	2	0	0%	0
76	Tanjungsari	1	460	118	0.44%	4,035	1,223	34	2	2	2	0	0%	0
77	Keyongan	1	3,011	606	0.04%	5,229	1,368	9	2	2	2	0	0%	0
78	Suwatu	1	3,104	651	0.04%	2,544	682	4	2	2	2	0	0%	0
79	Nglinduk	1	2,020	34	0.04%	3,522	1,318	104	2	2	2	0	0%	0
80	Pelem	1	1,306	47	0.04%	6,509	1,891	138	2	2	2	0	0%	0
81	Gabus	1	416	44	0.04%	3,302	2,310	75	2	2	2	0	0%	0

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK) 2015	Kepadatan Penduduk (org/Ha) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1=ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan	Luas Genangan (Ha)
82	Pandanharum	1	1,591	78	0.04%	6,426	2,257	82	2	2	2	0	0%	0
83	Tunggulrejo	2	711	92	0.04%	5,476	2,198	60	2	2	2	0	0%	0
84	Bendoharjo	1	601	75	0.04%	5,573	2,168	74	2	2	2	0	0%	0
85	Kalipang	1	492	42	0.04%	3,599	1,398	86	2	2	2	0	0%	0
86	Karangrejo	1	432	36	0.04%	4,436	1,781	123	2	2	2	0	0%	0
87	Banjarejo	2	1,064	64	0.04%	5,642	2,127	88	2	2	2	0	0%	0
88	Sendangrejo	1	410	95	0.72%	3,334	1,148	35	2	2	2	0	0%	0
89	Sarirejo	1	578	118	0.72%	3,743	1,308	32	2	2	2	0	0%	0
90	Kalangdosari	1	1,011	70	0.72%	4,522	2,555	65	2	2	2	0	0%	0
91	Kalanglundo	1	1,081	133	0.72%	7,320	1,670	55	2	2	2	0	0%	0
92	Truwolu	1	605	133	0.72%	7,498	2,448	57	2	2	2	0	0%	0
93	Pendem	1	370	64	0.72%	4,042	1,356	63	2	2	2	0	0%	0
94	Bandungsari	1	1,660	129	0.72%	8,614	2,203	67	2	2	2	0	0%	0
95	Ngarap-arap	1	662	59	0.72%	4,944	1,625	84	2	2	2	0	0%	0
96	Belor	1	642	147	0.72%	4,878	1,591	33	2	2	2	0	0%	0
97	Sumberagung	1	2,239	183	0.72%	7,770	2,608	42	2	2	2	0	0%	0
98	Sambirejo	1	1,402	201	0.64%	5,767	2,111	29	2	2	2	0	0%	0
99	Tanjungrejo	1	634	144	0.64%	5,788	2,215	40	2	2	2	0	0%	0
100	Tambahrejo	1	714	163	0.64%	6,968	2,726	43	2	2	2	0	0%	0
101	Kropak	1	389	88	0.64%	4,039	1,648	46	2	2	2	0	0%	0
102	Kalirejo	1	417	114	0.64%	5,042	1,882	44	2	2	2	0	0%	0

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK) 2015	Kepadatan Penduduk (org/Ha) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan	Luas Genangan (Ha)
103	Dapurno	1	386	108	0.64%	4,080	1,496	38	2	2	2	0	0%	0
104	Mojorebo	1	1,928	110	0.64%	4,989	1,768	45	2	2	2	0	0%	0
105	Gedangan	1	1,397	79	0.64%	4,274	1,530	54	2	2	2	0	0%	0
106	Tambakselo	1	2,831	190	0.64%	10,152	3,278	53	2	2	2	0	0%	0
107	Karangasem	1	1,778	134	0.64%	9,250	3,096	69	2	2	2	0	0%	0
108	Dokoro	1	1,561	184	0.64%	5,690	2,252	31	2	2	2	0	0%	0
109	Tegalrejo	1	1,378	141	0.64%	6,728	3,041	48	2	2	2	0	0%	0
110	Pulongrambe	1	297	70	0.69%	2,818	1,039	40	2	2	2	0	0%	0
111	Mayahan	1	448	104	0.69%	5,631	1,765	54	2	2	2	0	0%	0
112	Jono	1	410	83	0.69%	4,025	1,476	49	2	2	2	0	0%	0
113	Tarub	1	690	162	0.69%	6,105	1,737	38	2	2	2	0	0%	0
114	Plosorejo	1	1,229	91	0.69%	6,482	2,215	71	2	2	2	0	0%	0
115	Godan	1	2,384	70	0.69%	5,957	1,755	85	2	2	2	0	0%	0
116	Kemadohbatur	1	1,617	77	0.69%	3,954	1,143	51	2	2	2	0	0%	0
117	Rejosari	1	623	122	1.03%	5,808	1,703	48	2	2	2	0	0%	0
118	Tanggungharjo	1	1,163	108	1.03%	6,390	2,130	59	2	2	2	0	0%	0
119	Teguhan	1	436	138	1.03%	6,156	1,876	45	2	2	2	0	0%	0
120	Putatsari	1	968	175	1.03%	10,865	3,192	62	2	2	2	0	0%	0
121	Lebak	1	1,963	175	1.03%	9,159	2,692	52	2	2	2	0	0%	0
122	Lebengjumuk	1	1,282	95	1.03%	2,315	688	24	2	2	2	0	0%	0
123	Sedayu	1	901	126	1.03%	3,712	1,153	29	2	2	2	0	0%	0



No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK) 2015	Kepadatan Penduduk (org/Ha) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan	Luas Genangan (Ha)
124	Sumberjatipohon	1	1,403	249	1.03%	6,016	1,565	24	2	2	2	0	0%	0
125	Candisari	1	555	167	1.02%	4,120	1,604	25	2	2	2	0	0%	0
126	Genuksuran	1	327	70	1.02%	4,397	1,176	63	2	2	2	0	0%	0
127	Waru Karanganyar	1	461	90	1.02%	4,213	1,385	47	2	2	2	0	0%	0
128	Ngembak	1	432	125	1.02%	6,071	2,109	49	2	2	2	0	0%	0
129	Cingkrong	1	570	194	1.02%	6,289	2,190	32	2	2	2	0	0%	0
130	Tirem	1	547	84	0.67%	4,703	1,514	56	2	2	2	0	0%	0
131	Tegalsumur	1	811	133	0.67%	3,100	982	23	2	2	2	0	0%	0
132	Taruman	1	857	140	0.41%	4,216	1,604	30	2	2	2	0	0%	0
133	Terkesi	1	831	65	0.41%	5,932	1,609	91	2	2	2	0	0%	0
134	Jenengan	1	471	37	0.41%	2,384	838	65	2	2	2	0	0%	0
135	Wandankemiri	1	234	38	0.41%	1,910	626	51	2	2	2	0	0%	0
136	Tungu	1	230	42	0.48%	1,947	624	47	2	2	2	0	0%	0
137	Pahesan	1	234	40	0.48%	2,150	652	53	2	2	2	0	0%	0
138	Latak	1	449	78	0.48%	4,427	1,226	57	2	2	2	0	0%	0
139	Sumurgede	1	392	54	0.48%	2,548	882	47	2	2	2	0	0%	0
140	Sambung	1	468	72	0.48%	4,194	1,394	58	2	2	2	0	0%	0
141	Ketangirejo	1	482	65	0.48%	4,027	1,273	61	2	2	2	0	0%	0
142	Gundi	1	210	25	0.48%	1,598	568	63	2	2	2	0	0%	0
143	Jatilor	1	340	52	0.48%	2,669	941	52	2	2	2	0	0%	0
144	Beringin	1	274	41	0.48%	1,767	603	43	2	2	2	0	0%	0

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK) 2015	Kepadatan Penduduk (org/Ha) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan	Luas Genangan (Ha)
145	Kopek	1	156	21	0.48%	1,505	563	70	2	2	2	0	0%	0
146	Dorolegi	1	335	49	0.48%	2,789	957	57	2	2	2	0	0%	0
147	Rajek	1	302	37	0.48%	2,279	834	62	2	2	2	0	0%	0
148	Harjowinangun	1	430	87	0.48%	4,511	1,138	52	2	2	2	0	0%	0
149	Karanggeneng	1	334	48	0.48%	3,705	1,295	78	2	2	2	0	0%	0
150	Wanutunggal	1	168	38	0.48%	1,663	571	44	2	2	2	0	0%	0
151	Manggarwetan	1	294	45	0.48%	3,166	1,103	70	2	2	2	0	0%	0
152	Manggarmas	1	380	59	0.48%	4,495	1,264	76	2	2	2	0	0%	0
153	Tinanding	1	233	36	0.48%	1,981	612	55	2	2	2	0	0%	0
154	Penadaran	1	1,057	81	0.50%	4,346	887	54	2	2	2	0	0%	0
155	Kunjeng	1	295	23	0.50%	2,924	1,032	126	2	2	2	0	0%	0
156	Tambakan	1	295	53	0.50%	3,185	1,114	60	2	2	2	0	0%	0
157	Ringinkidul	1	158	38	0.50%	1,795	573	47	2	2	2	0	0%	0
158	Tlogomulyo	1	420	120	0.50%	4,362	1,420	36	2	2	2	0	0%	0
159	Gaji	1	213	22	1.11%	1,696	560	79	2	2	2	0	0%	0
160	Ringinpitu	1	1,728	72	0.48%	4,000	1,381	56	2	2	2	0	0%	0
161	Mrisi	1	612	95	0.48%	4,598	1,460	48	2	2	2	0	0%	0
162	Ngambakrejo	1	498	107	0.48%	4,610	1,503	43	2	2	2	0	0%	0
163	Kapung	1	270	64	0.48%	2,377	773	37	2	2	2	0	0%	0
164	Kaliwenang	1	343	90	0.48%	2,259	942	25	2	2	2	0	0%	0
165	Brabo	1	457	44	0.48%	5,235	1,467	118	2	2	2	0	0%	0

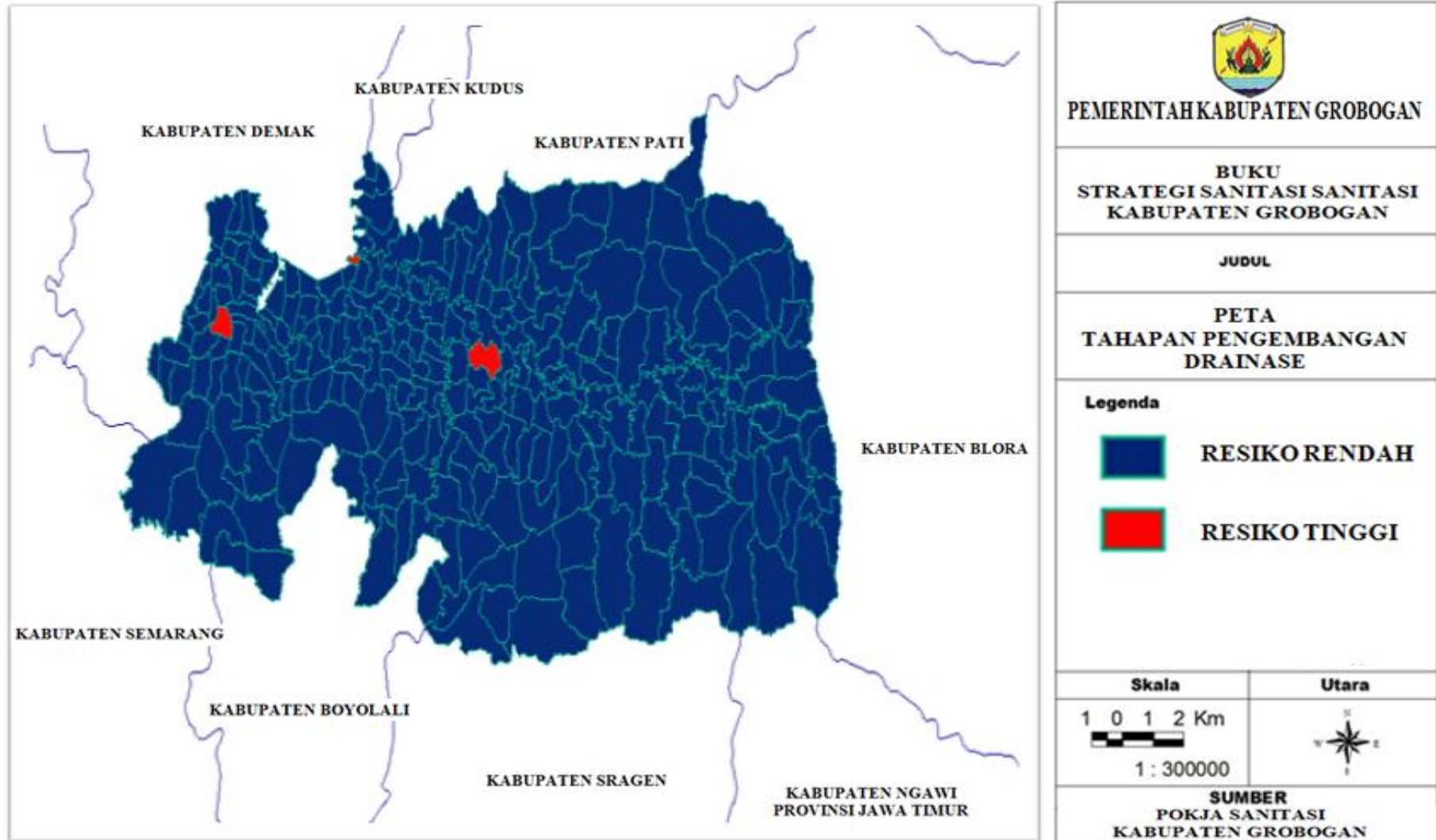
No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK) 2015	Kepadatan Penduduk (org/Ha) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan	Luas Genangan (Ha)
166	Padang	1	262	73	0.48%	3,894	1,260	54	2	2	2	0	0%	0
167	Sumberjosari	1	1,345	205	0.54%	11,467	4,044	56	1	1	2	0	0%	0
168	Wolo	1	434	64	0.52%	4,029	1,421	63	1	1	2	0	0%	0
169	Ngeluk	1	354	32	0.52%	2,422	967	76	1	1	2	0	0%	0
170	Penawangan	1	441	63	0.52%	2,837	984	45	1	1	2	0	0%	0
171	Sindurejo	1	895	169	0.49%	8,280	3,179	49	1	1	2	0	0%	0
172	Depok	1	762	174	0.49%	12,809	4,274	74	1	1	2	0	0%	0
173	Pilangpayung	1	496	96	0.49%	5,240	2,202	55	1	1	2	0	0%	0
174	Geyer	1	824	43	0.05%	5,272	1,793	123	1	1	2	0	0%	0
175	Ledokdawan	1	1,906	159	0.05%	5,726	1,989	36	1	1	2	0	0%	0
176	Tuko	1	858	162	0.45%	10,174	2,285	63	1	1	2	0	0%	0
177	Panunggalan	1	692	180	0.45%	10,162	2,231	56	1	1	2	0	0%	0
178	Mangunrejo	1	762	135	0.45%	6,092	2,298	45	1	1	2	0	0%	0
179	Banjarsari	1	495	145	0.44%	5,369	1,603	37	1	1	2	0	0%	0
180	Kalisari	1	475	213	0.44%	6,469	1,911	30	1	1	2	0	0%	0
181	Grabagan	1	469	116	0.44%	3,807	1,262	33	1	1	2	0	0%	0
182	Sulursari	1	246	44	0.04%	6,664	2,038	151	1	1	2	0	0%	0
183	Tlogotirto	1	819	189	0.04%	4,367	1,233	23	1	1	2	0	0%	0
184	Tahunan	1	724	35	0.04%	4,577	1,497	131	1	1	2	0	0%	0
185	Ngaringan	1	357	81	0.72%	2,801	1,077	35	1	1	2	0	0%	0
186	Tanjungharjo	1	2,056	140	0.72%	6,781	2,297	49	1	1	2	0	0%	0

No	Desa / Kel	Zona	Luas Administratif (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Penduduk (org) 2015	Jumlah Kepala Keluarga (KK) 2015	Kepadatan Penduduk (org/Ha) 2015	Klasifikasi Perkotaan (urban) - Pedesaan (rural) saat ini; 1=urban 2=rural	Apakah terdapat area CBD saat ini. 1=ya 2=tidak	Apakah area terpengaruh oleh pasang surut : 1= ya; 2= tidak	Estimasi area permukiman rawan genangan	Persentase luas area permukiman rawan genangan	Luas Genangan (Ha)
187	Kunden	1	410	77	0.64%	8,000	2,979	104	1	1	2	0	0%	0
188	Wirosari	1	207	64	0.64%	5,040	1,855	79	1	1	2	0	0%	0
189	Selo	1	495	177	0.69%	8,373	2,900	47	1	1	2	0	0%	0
190	Tawangharjo	1	247	117	0.69%	4,883	1,750	42	1	1	2	0	0%	0
191	Pojok	1	543	111	0.69%	5,553	2,049	50	1	1	2	0	0%	0
192	Getasrejo	1	416	152	1.03%	5,874	1,474	39	1	1	2	0	0%	0
193	Ngabenrejo	1	387	112	1.03%	4,898	1,206	44	1	1	2	0	0%	0
194	Grobogan	1	300	158	1.03%	7,418	2,500	47	1	1	2	0	0%	0
195	Karangrejo	1	614	125	1.03%	5,995	1,631	48	1	1	2	0	0%	0
196	Katekan	1	1,088	198	0.67%	4,353	1,549	22	1	1	2	0	0%	0
197	Penganten	1	655	90	0.41%	3,804	1,441	42	1	1	2	0	0%	0
198	Bugel	3	58	25	0.48%	3,423	1,073	135	1	1	2	0	0%	0
199	Tegowanu Wetan	1	362	31	1.11%	6,546	1,659	214	1	1	2	0	0%	0
200	Tegowanu Kulon	1	182	31	1.11%	4,627	1,309	147	1	1	2	0	0%	0
201	Sugihmanik	1	1,287	183	0.48%	6,285	1,781	34	1	1	2	0	0%	0
202	Tanggungharjo	1	607	88	0.48%	6,158	2,104	70	1	1	2	0	0%	0
	<b>Jumlah</b>		<b>159,204</b>	<b>21,685</b>		<b>986,605</b>	<b>327,508</b>	<b>11,017</b>						<b>0</b>

Sumber : Profil Sanitasi Kab. Grobogan, 2016

Peta 3.3

Peta Tahapan Pengembangan Drainase Kabupaten Grobogan



Tahapan pengembangan drainase untuk mengatasi genangan di Kabupaten Grobogan merupakan gambaran kondisi yang ideal dan untuk mencapai kondisi tersebut perlu dibuat rencana tahapan pengembangan drainase ke depan yang akan dijabarkan dalam program kerja SKPD terkait.

Selama ini sistem pembuangan air hujan dan *grey water* di Kabupaten Grobogan berjalan dengan sistem gravitasi. Pelayanan sarana drainase saat ini belum optimal mengingat keterbatasan anggaran dalam pembangunannya sehingga selama ini lebih diitik beratkan di daerah perkotaan dan wilayah permukiman padat penduduk lainnya. Belum tersedianya *main drain* juga menjadi kendala dalam pembuatan jaringan drainase perkotaan di Kabupaten Grobogan.

Untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan drainase akan dibuat tahapan pengembangan sektor drainase agar dapat diketahui dengan pasti wilayah genangan dan jangka waktu penyelesaian masalah sehingga dapat dibuat perencanaan pembangunan drainase yang lebih baik.

**Tabel 3.8 Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kabupaten Grobogan**

No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas genangan eksisting di Area Permukiman (ha)	Pengurangan luas genangan (ha)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
<b>Wilayah 1 : Penanganan Jangka Pendek ke Jangka Menengah ( 1 - 5 th )</b>					
1	Kedungjati	10	5	0	0
2	Mojoangung	12	6	0	0
3	Danyang	7	4	0	0
4	Kalongan	14	7	0	0
5	Ngraji	13	6	0	0
6	Karanganyar	11	5	0	0
7	Purwodadi	22	11	0	0
8	Kuripan	21	10	0	0
9	Menduran	12	6	0	0
10	Karangsari	9	4	0	0
11	Kronggen	16	8	0	0
12	Klambu	6	3	0	0
13	Klampok	4	2	0	0
14	Godong	21	10	0	0
15	Kemiri	5	3	0	0
16	Kuwaron	21	10	0	0
17	Gubug	15	7	0	0
18	Pranten	3	2	0	0
<b>Jumlah Wilayah 1</b>		<b>220</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wilayah 2 : Penanganan Jangka Menengah ke Jangka Panjang ( 5 - 10 th )</b>					
1	Ngombak	5	3	2	0
2	Karanglangu	17	10	7	0
3	Padas	9	5	4	0

No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas genangan eksisting di Area Permukiman (ha)	Pengurangan luas genangan (ha)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
4	Deras	8	5	3	0
5	Jumo	10	6	4	0
6	Wates	14	8	6	0
7	Mangin	8	5	3	0
8	Pangkalan	6	4	2	0
9	Rawoh	4	2	2	0
10	Bandungharjo	17	10	7	0
11	Genengsari	12	7	5	0
12	Tunggak	14	8	6	0
13	Asemrudung	7	4	3	0
14	Jambangan	12	7	5	0
15	Kandangan	11	6	5	0
16	Nambuhan	14	8	6	0
17	Nglobar	11	6	5	0
18	Kedungrejo	8	5	3	0
19	Pulorejo	11	6	5	0
20	Putat	8	5	3	0
21	Jangkungharjo	12	7	5	0
22	Temon	9	5	4	0
23	Lemahputih	6	4	2	0
24	Kandangrejo	6	4	2	0
25	Selojari	5	3	2	0
26	Menawan	5	3	2	0
27	Anggaswangi	3	2	1	0
28	Guci	2	1	1	0
29	Werdoyo	2	1	1	0
30	Guyangan	3	2	1	0
31	Sumberagung	2	1	1	0
32	Kemloko	6	4	2	0
33	Ketitang	3	2	1	0
34	Gelapan	5	3	2	0
35	Ngroto	12	7	5	0
36	Ginggangtani	8	5	3	0
37	Jeketro	6	4	2	0
38	Saban	6	4	2	0
39	Milir	11	6	5	0
40	Papanrejo	6	4	2	0
41	Trisari	8	5	3	0
42	Rowosari	5	3	2	0
43	Jatipecaron	6	4	2	0

No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas genangan eksisting di Area Permukiman (ha)	Pengurangan luas genangan (ha)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
44	Baturagung	4	3	1	0
45	Ringinharjo	7	4	3	0
46	Kebonagung	5	3	2	0
47	Tlogorejo	5	3	2	0
48	Medani	5	3	2	0
49	Sukorejo	7	4	3	0
50	Tanggirejo	3	2	1	0
51	Mangunsari	2	1	1	0
52	Gebangan	2	1	1	0
53	Kejawen	2	1	1	0
54	Tajemsari	3	2	1	0
55	Karangpasar	4	3	1	0
56	Kedungwungu	4	3	1	0
57	Pepe	3	2	1	0
58	Curug	2	1	1	0
59	Cangkring	3	2	1	0
60	Tunjungharjo	5	3	2	0
<b>Jumlah Wilayah 2</b>		<b>408</b>	<b>244</b>	<b>164</b>	<b>0</b>
<b>Wilayah 3 : Penanganan Jangka Panjang ( 10 - 15 th )</b>					
1	Prigi	0	0	0	0
2	Kentengsari	0	0	0	0
3	Panimbo	0	0	0	0
4	Klitikan	0	0	0	0
5	Kalimaro	0	0	0	0
6	Gunungtumpeng	0	0	0	0
7	Ketro	0	0	0	0
8	Sendangharjo	0	0	0	0
9	Karanganyar	0	0	0	0
10	Parakan	0	0	0	0
11	Nampu	0	0	0	0
12	Karangsono	0	0	0	0
13	Jetis	0	0	0	0
14	Telawah	0	0	0	0
15	Cekel	0	0	0	0
16	Dempel	0	0	0	0
17	Termas	0	0	0	0
18	Putatnganten	0	0	0	0
19	Temurejo	0	0	0	0
20	Lajer	0	0	0	0
21	Sedadi	0	0	0	0



No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas genangan eksisting di Area Permukiman (ha)	Pengurangan luas genangan (ha)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
22	Bologarang	0	0	0	0
23	Karangwader	0	0	0	0
24	Toko	0	0	0	0
25	Pengkol	0	0	0	0
26	Leyangan	0	0	0	0
27	Watupawon	0	0	0	0
28	Tunggu	0	0	0	0
29	Jipang	0	0	0	0
30	Kramat	0	0	0	0
31	Curut	0	0	0	0
32	Wedoro	0	0	0	0
33	Kluwan	0	0	0	0
34	Karangpaing	0	0	0	0
35	Pulutan	0	0	0	0
36	Winong	0	0	0	0
37	Dimoro	0	0	0	0
38	Genengadal	0	0	0	0
39	Kenteng	0	0	0	0
40	Ngrandah	0	0	0	0
41	Boloh	0	0	0	0
42	Plosoharjo	0	0	0	0
43	Tambirejo	0	0	0	0
44	Krangganharjo	0	0	0	0
45	Sugihan	0	0	0	0
46	Katong	0	0	0	0
47	Rambat	0	0	0	0
48	Kalangbancar	0	0	0	0
49	Juworo	0	0	0	0
50	Monggot	0	0	0	0
51	Ngrandu	0	0	0	0
52	Bangsri	0	0	0	0
53	Karanganyar	0	0	0	0
54	Sobo	0	0	0	0
55	Suru	0	0	0	0
56	Randurejo	0	0	0	0
57	Mlowokarangtalun	0	0	0	0
58	Pojok	0	0	0	0
59	Jatiharjo	0	0	0	0
60	Sidorejo	0	0	0	0
61	Jetaksari	0	0	0	0

No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas genangan eksisting di Area Permukiman (ha)	Pengurangan luas genangan (ha)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
62	Pulokulon	0	0	0	0
63	Jambon	0	0	0	0
64	Karangharjo	0	0	0	0
65	Sembungharjo	0	0	0	0
66	Bago	0	0	0	0
67	Simo	0	0	0	0
68	Rejosari	0	0	0	0
69	Pakis	0	0	0	0
70	Crewek	0	0	0	0
71	Kradenan	0	0	0	0
72	Sambongbangi	0	0	0	0
73	Sengonwetan	0	0	0	0
74	Banjardowo	0	0	0	0
75	Kuwu	0	0	0	0
76	Tanjungsari	0	0	0	0
77	Keyongan	0	0	0	0
78	Suwatu	0	0	0	0
79	Nglinduk	0	0	0	0
80	Pelem	0	0	0	0
81	Gabus	0	0	0	0
82	Pandanharum	0	0	0	0
83	Tunggulrejo	0	0	0	0
84	Bendoharjo	0	0	0	0
85	Kalipang	0	0	0	0
86	Karangrejo	0	0	0	0
87	Banjarejo	0	0	0	0
88	Sendangrejo	0	0	0	0
89	Sarirejo	0	0	0	0
90	Kalangdosari	0	0	0	0
91	Kalanglundo	0	0	0	0
92	Truwolu	0	0	0	0
93	Pendem	0	0	0	0
94	Bandungsari	0	0	0	0
95	Ngarap-arap	0	0	0	0
96	Belor	0	0	0	0
97	Sumberagung	0	0	0	0
98	Sambirejo	0	0	0	0
99	Tanjungrejo	0	0	0	0
100	Tambahrejo	0	0	0	0
101	Kropak	0	0	0	0

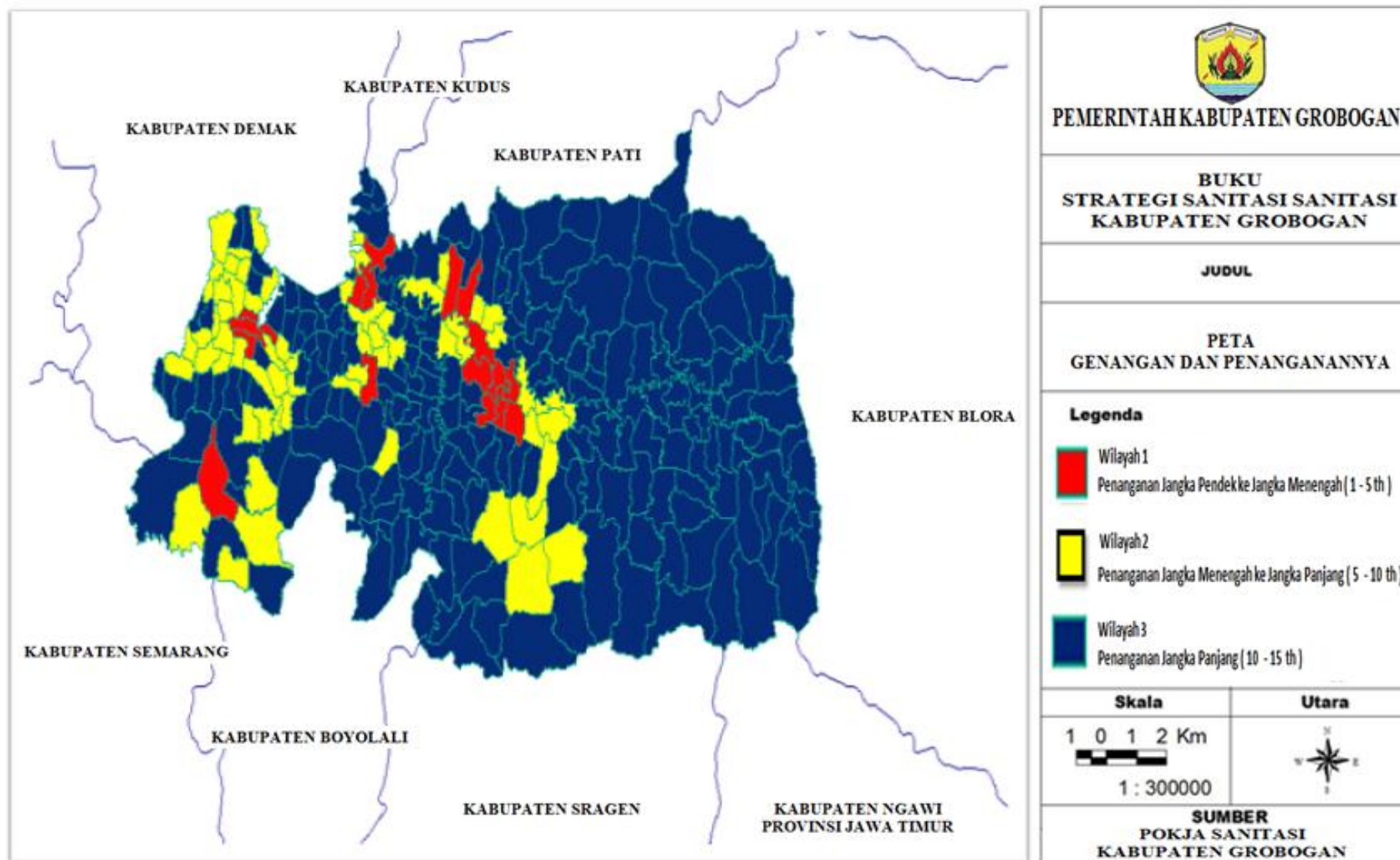
No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas genangan eksisting di Area Permukiman (ha)	Pengurangan luas genangan (ha)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
102	Kalirejo	0	0	0	0
103	Dapurno	0	0	0	0
104	Mojorebo	0	0	0	0
105	Gedangan	0	0	0	0
106	Tambakselo	0	0	0	0
107	Karangasem	0	0	0	0
108	Dokoro	0	0	0	0
109	Tegalrejo	0	0	0	0
110	Pulongrambe	0	0	0	0
111	Mayahan	0	0	0	0
112	Jono	0	0	0	0
113	Tarub	0	0	0	0
114	Plosorejo	0	0	0	0
115	Godan	0	0	0	0
116	Kemadohatur	0	0	0	0
117	Rejosari	0	0	0	0
118	Tanggungharjo	0	0	0	0
119	Teguhan	0	0	0	0
120	Putatsari	0	0	0	0
121	Lebak	0	0	0	0
122	Lebengjumuk	0	0	0	0
123	Sedayu	0	0	0	0
124	Sumberjatipohon	0	0	0	0
125	Candisari	0	0	0	0
126	Genuksuran	0	0	0	0
127	Waru Karanganyar	0	0	0	0
128	Ngembak	0	0	0	0
129	Cingkrong	0	0	0	0
130	Tirem	0	0	0	0
131	Tegalsumur	0	0	0	0
132	Taruman	0	0	0	0
133	Terkesi	0	0	0	0
134	Jenengan	0	0	0	0
135	Wandankemiri	0	0	0	0
136	Tungu	0	0	0	0
137	Pahesan	0	0	0	0
138	Latak	0	0	0	0
139	Sumurgede	0	0	0	0
140	Sambung	0	0	0	0
141	Ketangirejo	0	0	0	0

No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas genangan eksisting di Area Permukiman (ha)	Pengurangan luas genangan (ha)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
142	Gundi	0	0	0	0
143	Jatilor	0	0	0	0
144	Beringin	0	0	0	0
145	Kopek	0	0	0	0
146	Dorolegi	0	0	0	0
147	Rajek	0	0	0	0
148	Harjowinangun	0	0	0	0
149	Karanggeneng	0	0	0	0
150	Wanutunggal	0	0	0	0
151	Manggarwetan	0	0	0	0
152	Manggarmas	0	0	0	0
153	Tinanding	0	0	0	0
154	Penadaran	0	0	0	0
155	Kunjeng	0	0	0	0
156	Tambakan	0	0	0	0
157	Ringinkidul	0	0	0	0
158	Tlogomulyo	0	0	0	0
159	Gaji	0	0	0	0
160	Ringinpitu	0	0	0	0
161	Mrisi	0	0	0	0
162	Ngambakrejo	0	0	0	0
163	Kapung	0	0	0	0
164	Kaliwenang	0	0	0	0
165	Brabo	0	0	0	0
166	Padang	0	0	0	0
167	Sumberjosari	0	0	0	0
168	Wolo	0	0	0	0
169	Ngeluk	0	0	0	0
170	Penawangan	0	0	0	0
171	Sindurejo	0	0	0	0
172	Depok	0	0	0	0
173	Pilangpayung	0	0	0	0
174	Geyer	0	0	0	0
175	Ledokdawan	0	0	0	0
176	Tuko	0	0	0	0
177	Panunggalan	0	0	0	0
178	Mangunrejo	0	0	0	0
179	Banjarsari	0	0	0	0
180	Kalisari	0	0	0	0
181	Grabagan	0	0	0	0

No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas genangan eksisting di Area Permukiman (ha)	Pengurangan luas genangan (ha)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
182	Sulursari	0	0	0	0
183	Tlogotirto	0	0	0	0
184	Tahunan	0	0	0	0
185	Ngaringan	0	0	0	0
186	Tanjungharjo	0	0	0	0
187	Kunden	0	0	0	0
188	Wirosari	0	0	0	0
189	Selo	0	0	0	0
190	Tawangharjo	0	0	0	0
191	Pojok	0	0	0	0
192	Getasrejo	0	0	0	0
193	Ngabenrejo	0	0	0	0
194	Grobogan	0	0	0	0
195	Karangrejo	0	0	0	0
196	Katekan	0	0	0	0
197	Penganten	0	0	0	0
198	Bugel	0	0	0	0
199	Tegowanu Wetan	0	0	0	0
200	Tegowanu Kulon	0	0	0	0
201	Sugihmanik	0	0	0	0
202	Tanggungharjo	0	0	0	0
<b>Jumlah Wilayah 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Wilayah 1, 2 dan 3</b>		<b>628</b>	<b>353</b>	<b>164</b>	<b>0</b>

Sumber : Profil Sanitasi Kab. Grobogan, diolah, 2016

Peta 3.4.  
Peta Lokasi Genangan dan Penanganannya Kabupaten Grobogan



### 3.2.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, selain visi dan misi sanitasi juga diperlukan penajaman dari visi dan misi tersebut yang dituangkan menjadi sebuah tujuan, sasaran serta strategi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah disusun.

Di dalam sub sektor air limbah domestik, terdapat beberapa tujuan dan sasaran serta strategi yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

#### 3.2.2.1. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik

**Tabel 3.9. Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Air Limbah Domestik**

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Mengoptimalkan pengelolaan air limbah di perkotaan dan perdesaan yang bersih, sehat dan berwawasan lingkungan untuk perbaikan kesehatan masyarakat	Optimalisasi dan efektifitas pelayanan penyedotan lumpur tinja ke IPLT Ngembak dengan menambah cakupan pelayanan dari 30% menjadi 45% pada Tahun 2021.	Kondisi eksisting 11,4 % RT yang melakukan penyedotan tinja tetapi yang dikirim ke IPLT hanya 2 %. Selebihnya diindikasikan dibuang di pekarangan/sungai). Indikator sasaran menambah cakupan pelayan menjadi 45 % RT melakukan penyedotan tangki septic maksimal 5 tahun sekali pada tahun 2021.
	Hilangnya BABS (ODF) di wilayah Kabupaten Grobogan pada tahun 2017	Data BABS di Kab Grobogan sudah 0% (ODF) pada tahun 2016
	Meningkatkan cakupan kepemilikan jamban keluarga dengan penggunaan tangki septic dari 68% menjadi 80% pada akhir tahun 2017.	80 % masyarakat Grobogan memiliki jamban pribadi dengan septic tank
	Meningkatnya jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah secara komunal dari 20 unit menjadi 100 unit di wilayah padat kumuh miskin di akhir tahun 2017	20 unit IPAL Komunal Kawasan Kumuh/padat penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2016.
Pengembangan perangkat peraturan perundangan dan perencanaan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman	Tersedianya perencanaan pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga skala perkotaan pada akhir tahun 2017	tersusunnya dokumen masterplan dan DED Pengelolaan Air Limbah skala Kota
Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman.	Meningkatkan anggaran Anggaran APBD/APBD-Desa untuk air limbah sebesar 3% pada tiap tahunnya	Jumlah dana pengelolaan air limbah domestik.
	Meningkatkan jumlah dana sektor swasta baik dengan dana CSR maupun penanaman modal investasi	Jumlah dana pengelolaan air limbah domestik.
meningkatkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan air limbah	Peningkatan Jumlah Jamban yang dibangun secara swadaya/non-subsidi oleh masyarakat sebesar 10 Milyar selama lima tahun sampai Tahun 2017	Jumlah dana swadaya dalam penyediaan jamban keluarga.

Sumber : Hasil analisis Pokja Sanitasi, 2016

### 3.2.2.2. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Persampahan

Di dalam sub sektor persampahan, terdapat beberapa tujuan dan sasaran serta strategi yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.10 Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Persampahan**

<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Data Dasar</i>
Peningkatan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan perkotaan	Peningkatan sampah wilayah perkotaan yang dapat terangkut/dikelola di TPA menjadi 80% di tahun 2017	Jumlah penduduk yang dilayani pengelolaan persampahan di Perkotaan dari 57% menjadi 80%.
	Penyediaan sarana prasarana TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) di 6 (enam) ibu kota kecamatan pada tahun 2017	Jumlah TPST di Kabupaten Grobogan
Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan	Penetapan Perda dan Perbup yang mengatur pedoman teknis tentang pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana persampahan pada Tahun 2016.	Tersusunnya Perda
	Meningkatkan Status dan kapasitas institusi pengelola dalam penerapan Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat	Jumlah personil yang terampil dalam pengelolaan persampahan.
Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan sistem 3R skala rumah tangga dari 1,7 % menjadi 5% pada tahun 2017	masyarakat melakukan pengolahan sampah menjadi 5%.
	Terbentuknya dan terbinanya kelompok pengelola sarana prasarana persampahan di lingkungan permukiman dan sekolah.	19 kelompok pengelola persampahan di 19 Ibu Kota Kecamatan (IKK).
Pengembangan alternatif sumber pendanaan	Meningkatnya jumlah dana dari APBD Propinsi dan APBN sebesar 10 Milyar dalam peningkatan pengelolaan Persampahan di Kabupaten Grobogan pada Tahun 2017.	Jumlah Dana dari APBD-Propinsi/APBN
	Meningkatnya dana CSR dan investasi sektor swasta dalam pengelolaan persampahan	Jumlah dana baik in cash/in kind dalam pengelolaan persampahan.

Sumber : Hasil analisis Pokja Sanitasi, 2016



### 3.2.2.3. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan

Di dalam sub sektor drainase, terdapat beberapa tujuan dan sasaran serta strategi yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.11. Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Drainase Perkotaan**

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peraturan perundang-undangan mengenai Drainase Lingkungan	Tersedianya Regulasi drainase lingkungan pada tahun 2015.	Perda maupun Perbup terkait pengelolaan drainase lingkungan.
Meningkatkan perencanaan pengelolaan sistem drainase secara menyeluruh dan terpadu dalam penanganan banjir dan genangan.	Tersedianya dokumen perencanaan sistem drainase kota yang terintegrasi di akhir tahun 2017	Tersusunya Masterplan dan DED Drainase di 8 IKK Rawan Banjir/Genangan Kabupaten Grobogan di Tahun 2017
Berkurangnya luas genangan di Kabupaten Grobogan memprioritaskan penanganan di wilayah permukiman di akhir Tahun 2017	Berkurangnya luas genangan di Kabupaten Grobogan sebesar 15% dengan memprioritaskan penanganan di wilayah permukiman di akhir Tahun 2017	Pengurangan Luas Genangan di Permukiman dari 26 % menjadi 15 %
Meningkatnya intensitas upaya penyadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara terus menerus di sub drainase lingkungan.	Meningkatnya peran media dan masyarakat dalam penyadaran perilaku hidup bersih dan sehat di 30 desa/kelurahan rawan banjir pada akhir tahun 2017.	Jumlah masyarakat yang menerima informasi pengelolaan drainase lingkungan.
Pengembangan alternatif sumber pendanaan	Meningkatnya jumlah dana dari APBD Propinsi dan APBN sebesar 5 Milyar dalam peningkatan pengelolaan Persampahan di Kabupaten Grobogan pada Tahun 2017.	Jumlah Dana dari APBD-Propinsi/APBN

Sumber : Hasil analisis Pokja Sanitasi, 2016

### 3.2.3. Skenario Pencapaian Sasaran

Dalam rangka meningkatkan adanya skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses untuk setiap tahun selama 5 tahun, dapat kita jelas kan dalam tabel sebagai berikut

**Tabel 3.12**  
**Tabel Skenario Pencapaian Sasaran**

Komponen	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Air Limbah Domestik</b>							
Zona 1 :							
- Buang air besar sembarangan (BABS)	0.02%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- Cubluk/Tangki septik individual belum aman	41%	34.70%	32%	30%	24.35%	20%	15%
- Tangki septik individual	50.38%	56.70%	59.00%	61.40%	67%	71.31%	76.30%
- Tangki septik komunal (≤ 10 kk)	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%
- MCK	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- Tangki septik komunal (≥ 10 kk)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- IPAL Komunal	0.10%	0.10%	0.50%	0.10%	0.15%	0.19%	0.20%
- IPAL Kawasan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- IPAL Kota	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Zona 2 :							
- Buang air besar sembarangan (BABS)	0.02%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- Cubluk/Tangki septik individual belum aman	35.38%	33%	30%	25%	22%	20%	17.70%
- Tangki septik individual	60%	62.40%	65%	69.50%	72.30%	74.20%	76.30%
- Tangki septik komunal (≤ 10 kk)	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%
- MCK	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- Tangki septik komunal (≥ 10 kk)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- IPAL Komunal	0.10%	0.10%	0.50%	1%	1.20%	1.30%	1.50%
- IPAL Kawasan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- IPAL Kota	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Zona 3							
- Buang air besar sembarangan (BABS)	0.02%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- Cubluk/Tangki septik individual belum aman	40%	37.20%	31.40%	26.40%	23.20%	20.90%	17.70%

Komponen	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Tangki septik individual	54.78%	57.60%	62%	65.50%	68%	70%	72.70%
- Tangki septik komunal ( $\leq$ 10 kk)	5.10%	5.10%	5.10%	5.10%	5.10%	5.10%	5.10%
- MCK	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- Tangki septik komunal ( $\geq$ 10 kk)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- IPAL Komunal	0.10%	0.10%	0.50%	1%	1.20%	1.30%	1.50%
- IPAL Kawasan	0%	0%	1%	2%	2.50%	2.70%	3%
- IPAL Kota	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Zona 4</b>							
- Buang air besar sembarangan (BABS)	0.02%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- Cubluk/Tangki septik individual belum aman	35.38%	32.10%	30%	25%	23.30%	22.20%	17%
- Tangki septik individual	60%	63.30%	65%	69.50%	71%	72%	73%
- Tangki septik komunal ( $\leq$ 10 kk)	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%
- MCK	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- Tangki septik komunal ( $\geq$ 10 kk)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- IPAL Komunal	0.10%	0.10%	0.50%	1%	1.20%	1.30%	1.50%
- IPAL Kawasan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- IPAL Kota	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Persampahan</b>							
<b>Zona 1 :</b>							
- Prosentase sampah yang terangkut ke TPA	0%	0%	3%	5%	8%	9%	10%
- Prosentasi sampah tereduksi melalui 3R	0%	0%	1%	2%	2%	2.50%	3%
- Prosentasi sampah dikelola mandiri oleh masyarakat di sumber	0%	0%	1%	2%	3%	4%	5%
- Prosentasi sampah tidak terolah	100%	100%	95%	91%	87%	84%	82%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Zona 2 :</b>							
- Prosentase sampah yang terangkut ke TPA	5%	5%	7%	10%	13%	14%	15%
- Prosentasi sampah tereduksi melalui 3R	0%	0%	1%	3%	3.40%	3.60%	4%
- Prosentasi sampah dikelola mandiri oleh masyarakat di sumber	0%	0%	2%	3%	3.50%	4.50%	5%
- Prosentasi sampah tidak terolah	95%	95%	90%	84%	80%	78%	76%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Komponen	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zona 3 :							
- Prosentase sampah yang terangkut ke TPA	1%	1%	3%	3%	3.50%	4.50%	5%
- Prosentasi sampah tereduksi melalui 3R	0%	0%	1%	2%	3%	4%	5%
- Prosentasi sampah dikelola mandiri oleh masyarakat di sumber	0%	0%	2%	3%	4%	5%	6%
- Prosentasi sampah tidak terolah	99%	99%	94%	92%	89%	86%	84%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Zona 4 :							
- Prosentase sampah yang terangkut ke TPA	11%	11%	20%	25%	31%	37%	40%
- Prosentasi sampah tereduksi melalui 3R	0%	0%	2%	5%	7%	9%	10%
- Prosentasi sampah dikelola mandiri oleh masyarakat di sumber	0%	0%	1%	2%	2.40%	2.80%	3%
- Prosentasi sampah tidak terolah	89%	89%	77%	68%	60%	51%	47%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Drainase</b>							
Luas wilayah genangan	0.35%	0.32%	0.25%	0.19%	0.12%	0.06%	0%

Sumber : Hasil analisis Pokja Sanitasi, 2016

### **3.3. KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI DAERAH**

Berdasarkan kebutuhan dan merujuk pada beberapa dokumen strategis daerah seperti APBD 5 tahun terakhir, LKPJ Bupati, RPJMD, dan RPIJM Kabupaten Grobogan, maka Pokja Sanitasi Kabupaten Grobogan melakukan proyeksi dan perhitungan tentang pendanaan sanitasi Kabupaten Grobogan 5 tahun kedepan.

Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran jelas mengenai kemampuan daerah dalam pendanaan sanitasi sebagaimana diidentifikasi didalam dokumen SSK ini. Untuk mendapatkan gambaran ini, maka analisis difokuskan pada aspek belanja dalam APBD Kabupaten Grobogan. Dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten Grobogan, tergambar beberapa sumber pendanaan dan besaran nilai pendanaan yang direncanakan akan termuat dalam APBD Kabupaten Grobogan maupun bantuan provinsi. Analisis belanja diterus pinjaman/diterus hibahkan ke kabupaten/kota, bantuan keuangan provinsi yang dipergunakan untuk pembangunan sanitasi, ataupun dana pendampingan untuk kegiatan sanitasi dari Pusat/Provinsi. Pengurangan ini akan menunjukkan belanja sanitasi yang didanai oleh APBD murni kabupaten/kota, sehingga estimasi besaran pendanaan yang dihasilkan dapat lebih rasional.

Pendanaan untuk sanitasi yang didanai dari APBD Kabupaten baik dari Dana Alokasi Umum maupun dari Dana Alokasi Khusus pada kurun waktu 5 tahun terakhir (2016 sampai 2020) cenderung kecil. Khusus untuk belanja air limbah domestik dan drainase lingkungan rata-rata pertumbuhannya cenderung minus. Untuk tahun 2020 belanja sanitasi Kabupaten Grobogan sebesar Rp18.419.484.860.

**Tabel 3.13**  
**Tabel Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/kota untuk Sanitasi**

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016*	
<b>1</b>	<b>Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )</b>	13,797,256,000	14,967,771,900	23,090,625,000	18,857,600,000	13,980,000,000	5%
<b>1.1</b>	<b>Air Limbah Domestik</b>	2,866,731,000	2,254,240,000	827,500,000	933,100,000	1,795,000,000	5%
<b>1.2</b>	<b>Sampah rumah tangga</b>	9,638,075,000	11,093,531,900	14,558,125,000	10,591,500,000	8,185,000,000	-1%
<b>1.3</b>	<b>Drainase Perkotaan</b>	1,292,450,000	1,620,000,000	7,705,000,000	7,333,000,000	4,000,000,000	50%
<b>2</b>	<b>Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 )</b>	-	1,832,350,000	668,125,000	-	1,655,650,000	0%
<b>2.1</b>	<b>DAK Sanitasi</b>	0	1,377,600,000	-	-	-	0%
<b>2.2</b>	<b>DAK Lingkungan Hidup</b>	0	454,750,000	668,125,000	-	1,655,650,000	50%
<b>2.3</b>	<b>DAK Perumahan dan Permukiman</b>	0	0	-	-	-	0%
<b>3</b>	<b>Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)</b>		13,797,256,000	13,135,421,900	22,422,500,000	18,857,600,000	12,324,350,000	5%
<b>Total Belanja Langsung</b>		416,586,436,009	591,433,318,740	691,035,152,900	776,202,805,277	883,871,646,000	21%
<b>% APBD murni terhadap Belanja Langsung</b>		3.31%	2.22%	3.24%	2.43%	1.39%	-13.6%

Tabel 3.14 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Perkiraan Belanja Langsung	939.807.449.500	956.001.672.985	962.681.723.175	989.862.174.870	997.558.040.116	3,906,103,611,146
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	12,940,567,500	13,587,595,875	14,266,975,669	14,980,324,452	15,729,340,675	71,504,804,171
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	12,940,567,500	13,587,595,875	14,266,975,669	14,980,324,452	15,729,340,675	71,504,804,171

Sumber: DPPKAD Kabupaten Grobogan 2016

**Tabel 3.15. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi**

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Pertumbuhan rata-rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
<b>1</b>	<b>Belanja Sanitasi</b>						
<b>1.1</b>	<b>Air Limbah Domestik</b>						
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (justified)	125.000.000	150.000.000	155.000.000	175.000.000	12%	125.000.000
<b>1.2</b>	<b>Sampah rumah tangga</b>						
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan (justified)	1.562.659.500	1.570.000.000	1.575.000.000	1.665.000.000	2%	1.562.659.500
<b>1.3</b>	<b>Drainase Perkotaan</b>						
1.3.1	Biaya operasional/pemeliharaan (justified)	240.000.000	250.000.000	150.000.000	230.000.000	6%	240.000.000

Sumber: DPPKAD Kabupaten Grobogan 2016



Tabel 3.16

Tabel Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2021

No	Uraian	Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.)					Total Pendanaan
		2017	2018	2019	2020	2021	
<b>1</b>	<b>Belanja Sanitasi</b>						
<b>1.1</b>	<b>Air Limbah Domestik</b>						
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (justified)	210.000.000	252.000.000	302.400.000	362.880.000	435.456.000	1.562.736.000
<b>1.2</b>	<b>Sampah rumah tangga</b>						
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan (justified)	1.831.500.000	2.014.650.000	2.216.115.000	2.437.726.500	2.681.499.150	11.181.490.650
<b>1.3</b>	<b>Drainase Perkotaan</b>						
1.3.1	Biaya operasional/pemeliharaan (justified)	253.000.000	278.300.000	306.130.000	336.743.000	370.417.300	1.544.590.300

Sumber: DPPKAD Kabupaten Grobogan 2016

Kabupaten Grobogan berkomitmen untuk lebih meningkatkan pendanaan dari APBD untuk mendanai sanitasi ke depan baik untuk kebutuhan operasional/ pemeliharaan, APBD murni untuk sanitasi dan komitmen pendanaan sanitasi.

Tabel 3.17 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Kendal dalam Mendanai Program/ Kegiatan SSK

No	Uraian	Pendanaan (Rp.)					Total Pendanaan
		2017	2018	2019	2020	2021	
<b>1</b>	<b>Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan</b>	2.294.500.000	2.544.950.000	2.824.645.000	3.137.349.500	3.487.372.450	14.288.816.950
<b>2</b>	<b>Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi</b>	13.838.831.600	15.222.714.760	16.744.986.236	18.419.484.860	20.261.433.346	84.487.450.801
<b>3</b>	<b>Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi</b>	15.000.000.000	17.250.000.000	20.700.000.000	24.840.000.000	29.808.000.000	107.598.000.000
<b>4</b>	<b>Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)</b>	11.544.331.600	12.677.764.760	13.920.341.236	15.282.135.360	16.774.060.896	70.198.633.851
<b>5</b>	<b>Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)</b>	12.705.500.000	14.705.050.000	17.875.355.000	21.702.650.500	26.320.627.550	93.309.183.050

Sumber: DPPKAD Kabupaten Grobogan 2016

# BAB IV

## STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Dalam membuat strategi pengembangan sanitasi di Kabupaten Grobogan, digunakan metode SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu perencanaan. Keempat faktor itulah yang membentuk istilah SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). Proses ini melibatkan pemangku kepentingan masing – masing sektor dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Adapun tahapan pelaksanaan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman)
2. Dilakukan FGD penyepakatan bobot masing – masing faktor dengan menggunakan *software expert choice*. Dalam penentuan bobot isu – isu yang ada dengan menggunakan *analytical hierarchy process* (AHP). Tahapan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan metode AHP adalah :
  - Definisi masalah, merupakan tahapan dimana suatu permasalahan yang akan diselesaikan dapat didefinisikan.
  - Dekomposisi (Decomposition), yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsur dibawahnya.
  - *Comparative Judgement*, prinsip ini dilakukan dengan membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat diatasnya. Hasil dari penilaian ini dituliskan dalam matriks yang disebut dengan *matriks pairwise comparison*.
  - *Synthesis Of Priority*, dengan melakukan langkah sebagai berikut :
    - a. Menentukan matriks yang telah dinormalisasi dari *matriks pairwise comparison*.
    - b. Menentukan *logical consistency* dari masing-masing penilaian, yaitu mengukur seluruh konsistensi penilaian dengan menggunakan *Consistency Ratio* (CR)
    - c. Menentukan bobot prioritas dari masing-masing elemen.

3. Menentukan tingkat pengaruh dari masing – masing isu
4. Menyusun matrik *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) dan *Eksternal Factor Analysis Summary* (EFAS)
5. Membuat kuadran posisi pengelolaan sub sektor
6. Membuat matrik strategi SWOT

#### 4.1 AIR LIMBAH DOMESTIK

Walaupun di Kabupaten Grobogan sudah ODF dengan 0% BABS di tahun 2016 ini tetapi permasalahan pengelolaan air limbah masih perlu untuk mendapatkan perhatian. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan cubluk/tangki septik individual belum aman sebanyak 149.315 KK di Kabupaten Grobogan. Pengelolaan limbah tinja dalam instalasi pengolahan lumpur tinja juga masih terdapat permasalahan, dimana IPLT tidak maksimal.

##### A. Identifikasi isu – isu strategis

Dengan melihat permasalahan pengelolaan air limbah tersebut, dilakukan identifikasi isu – isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pengelolaan limbah di Kabupaten Grobogan. Adapun isu – isu pengelolaan air limbah adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Isu – Isu Strategis Pengelolaan Air Limbah**

NO	ELEMEN
<b>INTERNAL FACTOR ANALYSIS SUMMARY (IFAS)</b>	
<b>KEKUATAN (STRENGTH)</b>	
1	Sudah ada dinas yang menangani air limbah domestic (Dinas Ciptaru)
2	Tersedianya dana penunjang dan pendamping dari APBD Kabupaten
3	KSM dalam pengelolaan IPAL komunal sudah berjalan dengan baik
4	Adanya program Sanimas dalam pembangunan IPAL komunal
5	Adanya program STBM
6	Tersedianya lahan oleh Masyarakat dalam pembangunan IPAL Komunal dan MCK
<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>	
1	Fungsi IPLT tidak Optimal
2	Master Plan pengelolaan air limbah tidak dipakai secara maksimal
3	Kualitas SDM kurang
4	Dukungan pendanaan dari swasta sangat minim
5	Pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan meningkatnya volume air

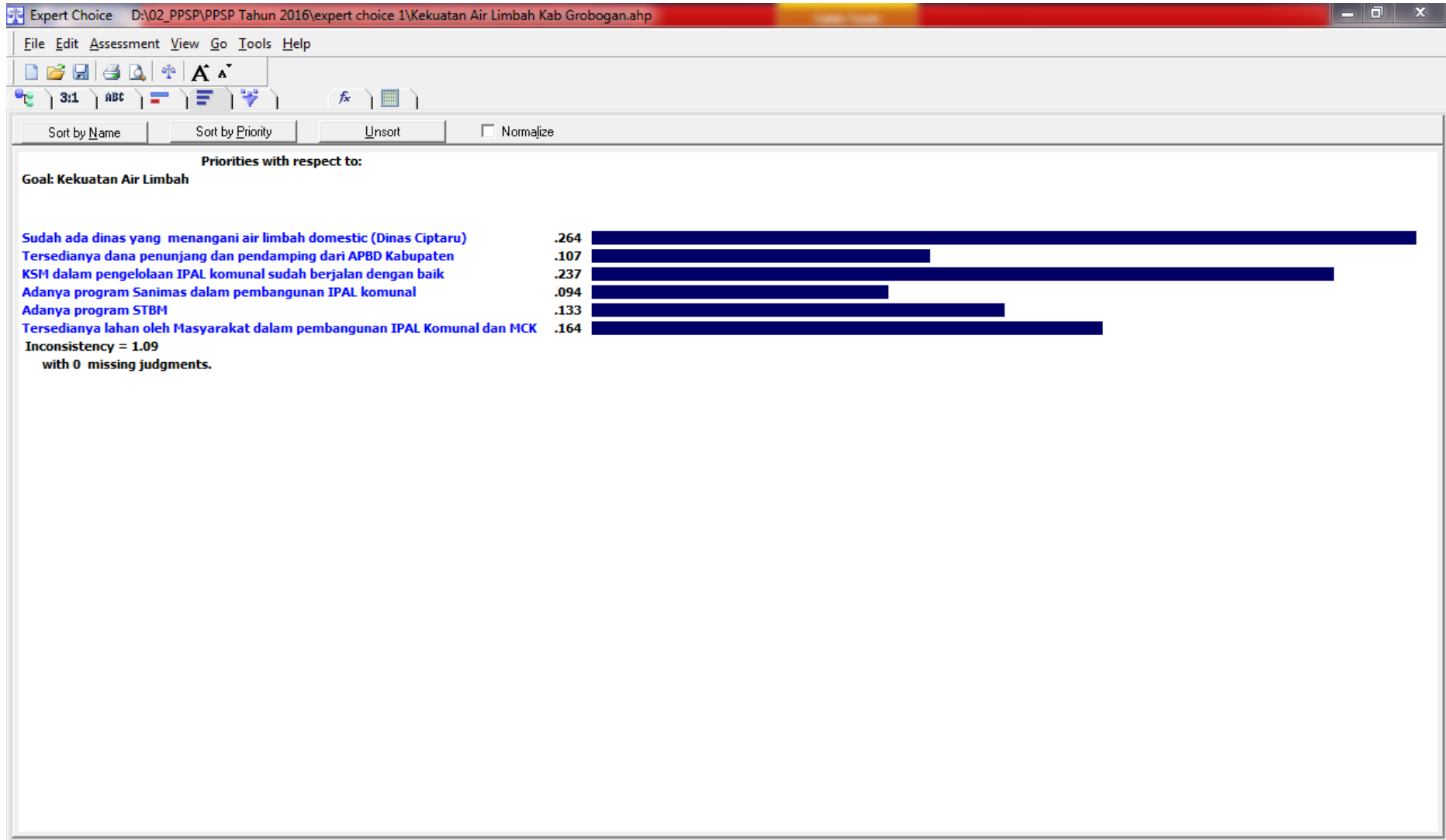
NO	ELEMEN
	limbah
6	Masih banyaknya penggunaan cubluk/tangki septik individual belum aman
<b>EKSTERNAL FACTOR ANALYSIS SUMMARY (EFAS)</b>	
<b>PELUANG (OPPORTUNITY)</b>	
1	Banyaknya perusahaan yang dapat memberikan CSR untuk pembangunan sanitasi
2	Adanya jasa penyedotan tinja swasta
3	Adanya program 100 - 0 - 100
4	Adanya DAK untuk pengelolaan air limbah domestik
5	Adanya KSM pengelola IPAL komunal
<b>ANCAMAN (THREATH)</b>	
1	Masih terdapat masyarakat yang memiliki akses terhadap jamban yang tidak sehat
2	Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi disektor air limbah
3	Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat
4	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga

Sumber : FGD Pokja Sanitasi 2016

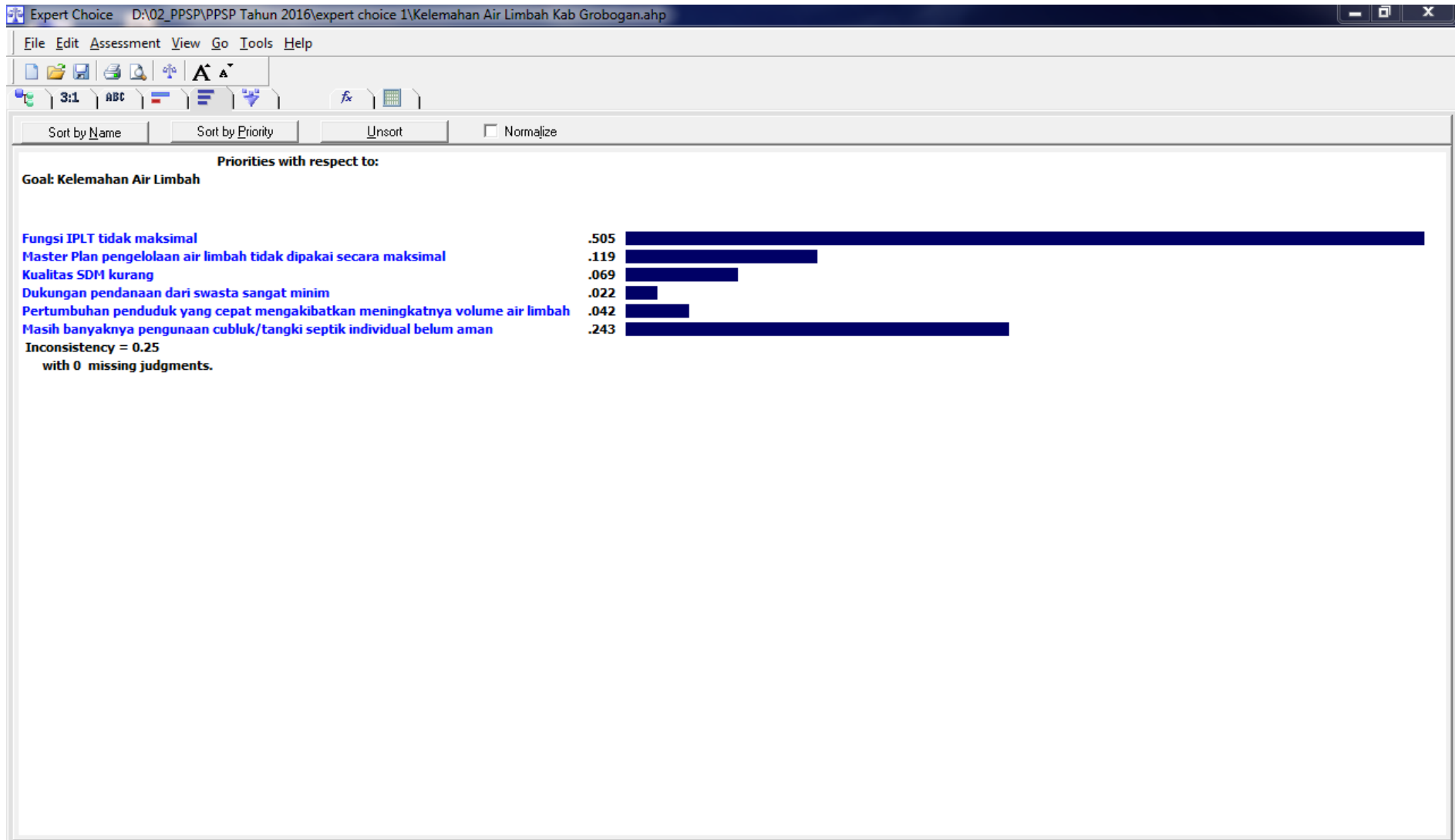
## B. Pembobotan

Pembobotan dilakukan dengan cara melakukan FGD untuk melakukan pembobotan dengan menggunakan software *expert choice*, Adapun hasil pembobotan adalah sebagai berikut :

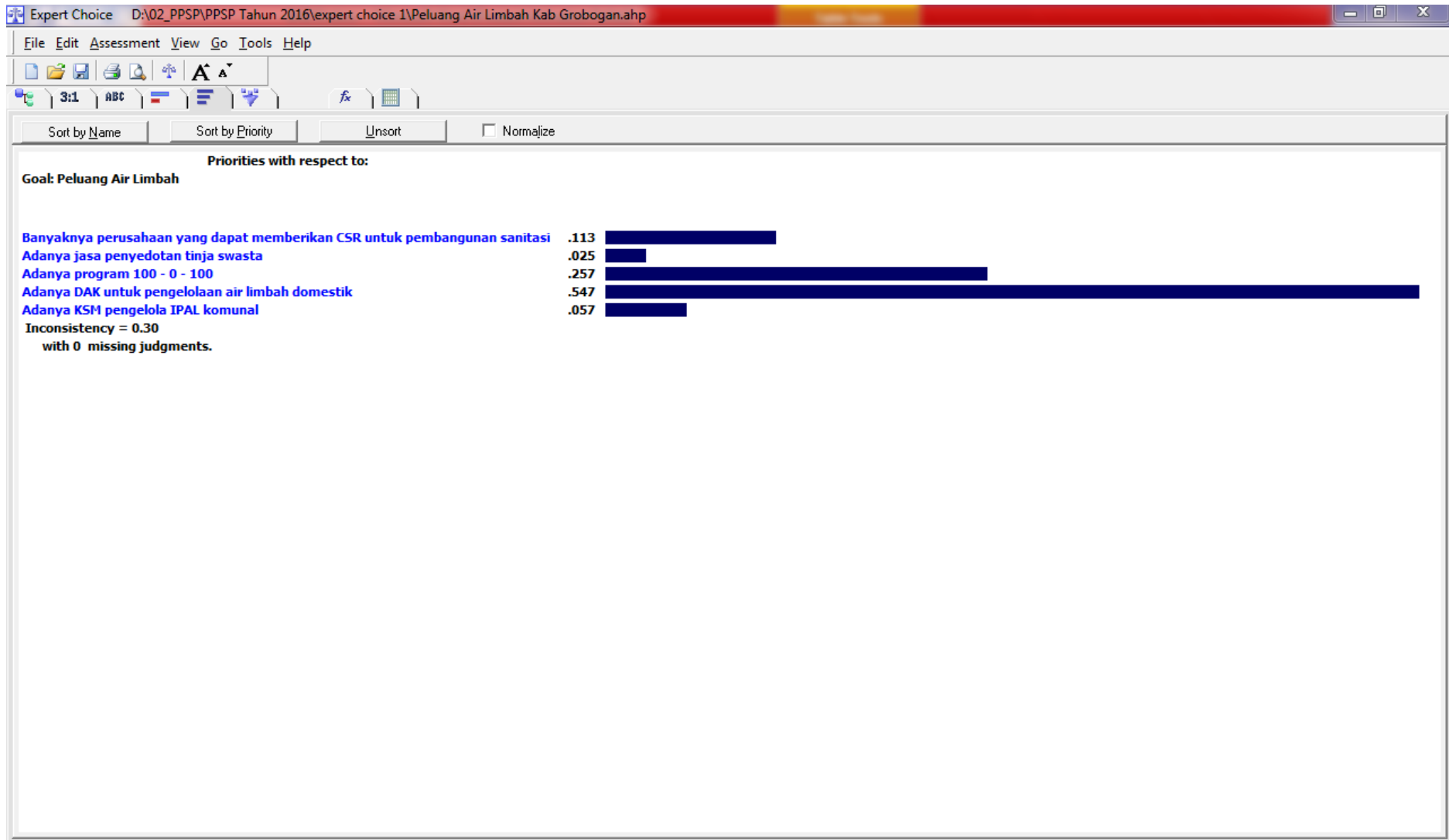
# 1. Pembobotan Kekuatan



## 2. Pembobotan Kelemahan

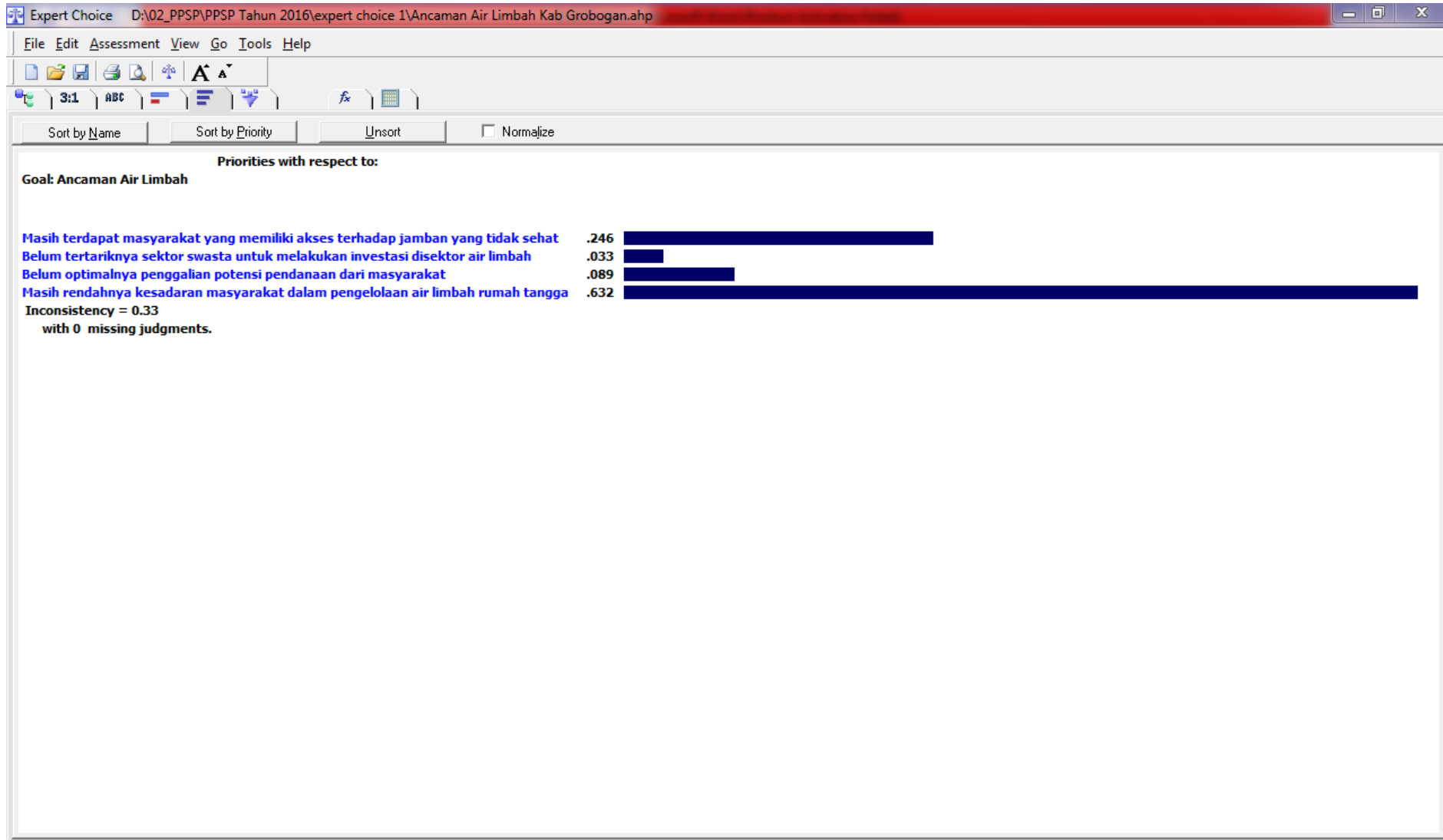


### 3. Pembobotan Peluang





#### 4. Pembobotan Ancaman

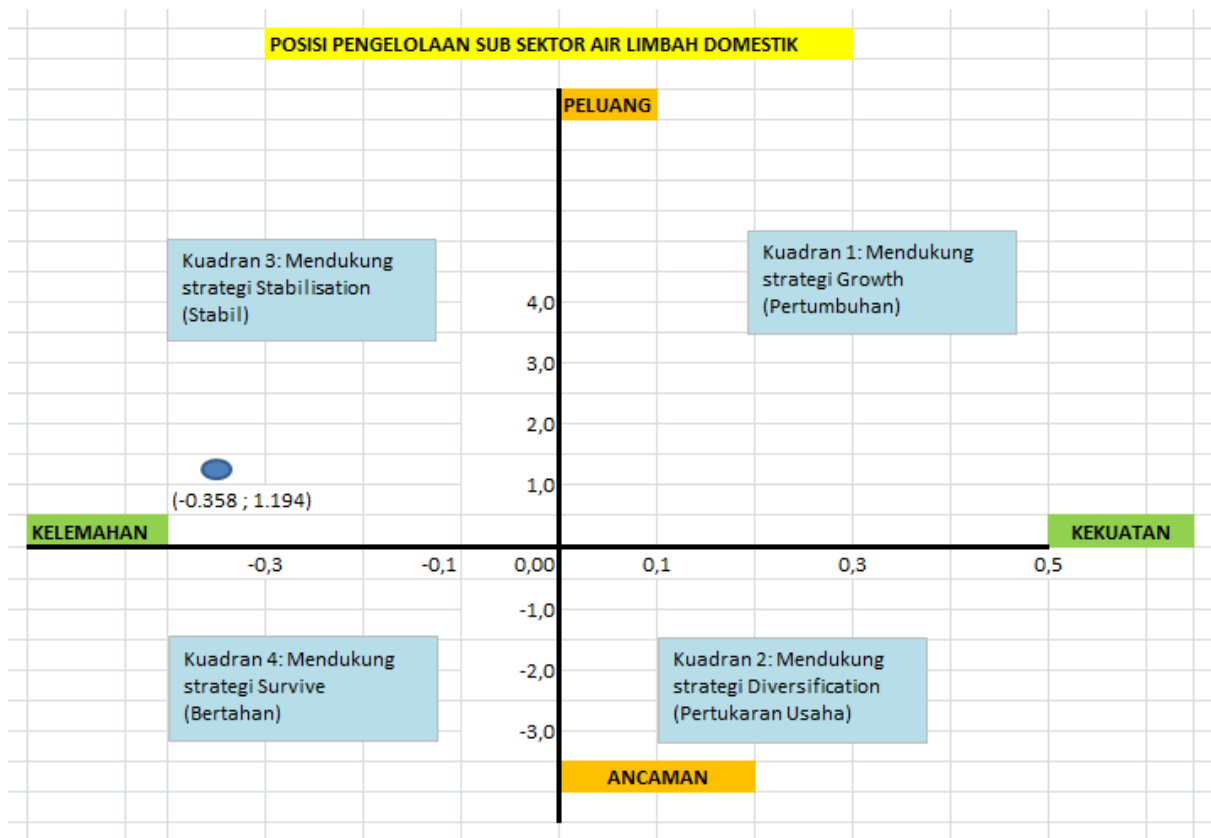


### C. Pembuatan matrik IFAS dan EFAS

N O	ELEMEN	BOBOT	TING- KAT PENGAR UH	PERKALIAN BOBOT DAN TINGKAT PENGARUH	KET
<b>INTERNAL FACTOR ANALYSIS SUMMARY (IFAS)</b>					
<b>KEKUATAN (STRENGTH)</b>					
1	Sudah ada dinas yang menangani air limbah domestic (Dinas Ciptaru)	26.40%	4	1.056	
2	Tersedianya dana penunjang dan pendamping dari APBD Kabupaten	10.70%	4	0.428	
3	KSM dalam pengelolaan IPAL komunal sudah berjalan dengan baik	23.70%	3	0.711	
4	Adanya program Sanimas dalam pembangunan IPAL komunal	9.40%	3	0.282	
5	Adanya program STBM	13.30%	3	0.399	
6	Tersedianya lahan oleh Masyarakat dalam pembangunan IPAL Komunal dan MCK	16.40%	3	0.492	
<b>Total</b>		<b>100%</b>		<b>3.368</b>	
<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>					
1	Fungsi IPLT tidak maksimal	50.50%	4	2.020	
2	Master Plan pengelolaan air limbah tidak dipakai secara maksimal	11.90%	3	0.357	
3	Kualitas SDM kurang	6.90%	3	0.207	
4	Dukungan pendanaan dari swasta sangat minim	2.20%	2	0.044	
5	Pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan meningkatnya volume air limbah	4.20%	3	0.126	
6	Masih banyaknya penggunaan cubluk/tangki septik individual belum aman	24.30%	4	0.972	
<b>Total</b>		<b>100%</b>		<b>3.726</b>	
<b>Selisih Kekuatan dan Kelemahan</b>				<b>-0.358</b>	
<b>EKSTERNAL FACTOR ANALYSIS SUMMARY (EFAS)</b>					
<b>PELUANG (OPPORTUNITY)</b>					
1	Banyaknya perusahaan yang dapat memberikan CSR untuk pembangunan sanitasi	11.30%	3	0.339	
2	Adanya jasa penyedotan tinja swasta	2.50%	2	0.050	
3	Adanya program 100 - 0 - 100	25.70%	4	1.028	

<b>N O</b>	<b>ELEMEN</b>	<b>BOBOT</b>	<b>TING- KAT PENGAR UH</b>	<b>PERKALIAN BOBOT DAN TINGKAT PENGARUH</b>	<b>KET</b>
4	Adanya DAK untuk pengelolaan air limbah domestik	54.70%	4	2.188	
5	Adanya KSM pengelola IPAL komunal	5.70%	2	0.114	
<b>Total</b>		<b>100%</b>		<b>3.719</b>	
<b>ANCAMAN (THREATH)</b>					
1	Masih terdapat masyarakat yang memiliki akses terhadap jamban yang tidak sehat	24.60%	4	0.984	
2	Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi disektor air limbah	3.30%	3	0.099	
3	Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat	8.90%	2	0.178	
4	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga	63.20%	2	1.264	
<b>Total</b>		<b>100%</b>		<b>2.525</b>	
<b>Selisih Peluang dan Ancaman</b>				<b>1.194</b>	

#### D. Membuat Kuadran Posisi Pengelolaan Sub Sektor Air Limbah Domestik



#### E. Matrik strategi SWOT

Berdasarkan hasil analisis SWOT, posisi pengelolaan air limbah domestik masuk di kuadran 3, sehingga strategi yang direkomendasikan adalah strategi Kelemahan (Weakness) dan Peluang (opportunity) atau dikenal dengan strategi WO, yaitu gunakan peluang untuk mengatasi kelemahan.

**Tabel 4.2 Matrik strategi pengelolaan air limbah domestik**

No	Strategi
1	Meningkatkan kinerja Dinas Ciptaru yang merupakan SKPD yang menangani Air Limbah dalam upaya mencapai target 100% sanitasi layak
2	Meningkatkan komitmen pendanaan dana dari APBD dan DAK untuk pengelolaan air limbah domestik
3	Meningkatkan peran serta KSM dalam pengelolaan IPAL
4	Memanfaatkan peluang program Sanimas dalam pembangunan IPAL komunal
5	Tersedianya lahan oleh Masyarakat dalam pembangunan IPAL Komunal dan MCK
6	Meningkatkan partisipasi perusahaan yang dapat memberikan CSR untuk pembangunan sanitasi dan penggunaan jasa penyedotan tinja
7	Meningkatkan akses pendanaan masyarakat melalui Paguyupan Penggiat Sanitasi dan Kredit Sanitasi oleh Bank BKK Purwodadi

Sumber : FGD Pokja Sanitasi Kab Grobogan, 2016

## **4.2 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

Permasalahan persampahan di Kabupaten Grobogan terutama berkaitan dengan cakupan wilayah pelayanan, dimana sampai saat ini jumlah sampah yang terangkut baru 9 Kecamatan dari 19 Kecamatan yang ada. Hal ini terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang perlu untuk terus ditingkatkan. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan identifikasi isu – isu terkait pengelolaan persampahan di Kabupaten Grobogan.

### **A. Identifikasi isu – isu strategis**

Pokja Sanitasi telah membuat daftar isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pengelolaan persampahan. Adapun isu – isu pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Isu – Isu Strategis Pengelolaan Persampahan

NO	ELEMEN
<b>INTERNAL FACTOR ANALYSIS SUMMARY (IFAS)</b>	
<b>KEKUATAN (STRENGTH)</b>	
1	Sudah Memiliki TPA
2	Sudah ada Perda pengelolaan sampah
3	Sudah ada retribusi/ jasa umum mengenai sampah
4	Sudah ada SKPD yang mengelola sampah
5	Tersedianya dana APBD untuk pengelolaan sampah
6	Ada KSM pengelola sampah
	Total

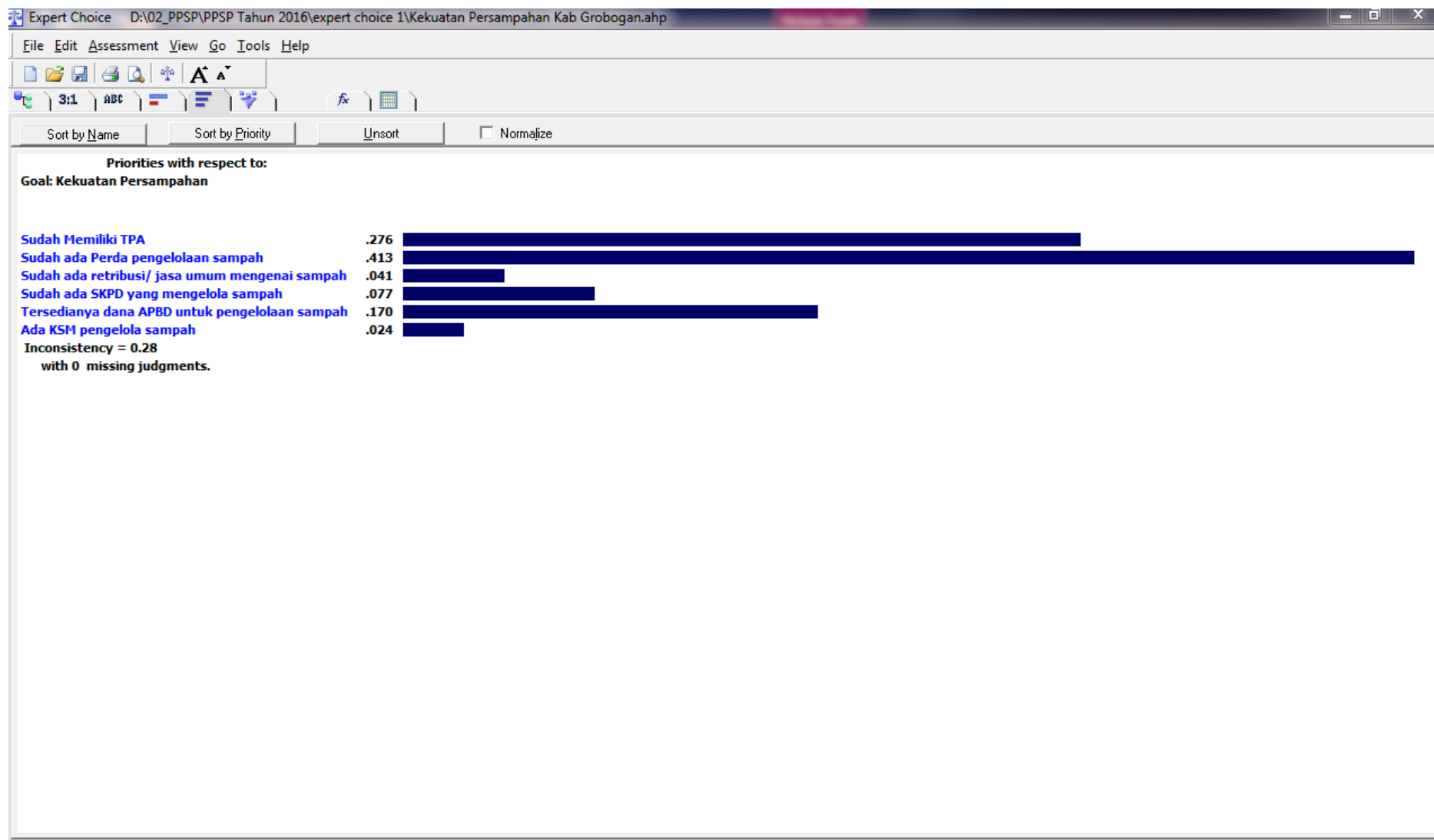
NO	ELEMEN
<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>	
1	Belum ada TPA yang memadai dan memenuhi syarat sesuai UU no. 18/2008
2	Kurangnya kapasitas TPA
3	Tidak ada penyediaan TPS 3 R oleh SKPD
4	Masyarakat belum melakukan pemilahan sampah
<b>EKSTERNAL FACTOR ANALYSIS SUMMARY (EFAS)</b>	
<b>PELUANG (OPPORTUNITY)</b>	
1	Adanya dana DAK dalam pengelolaan sampah
2	Adanya usaha sampah (rosok)
3	Pengelolaan sampah secara swadaya oleh masyarakat
4	Lomba kota Adipura
	Total
<b>ANCAMAN (THREAT)</b>	
1	Kesadaran untuk pemilahan sampah rumah tangga masih rendah
2	Masih banyak sampah yang dibakar sehingga menyebabkan polusi
3	Masih banyak warga yang membuang sampah di sungai
4	Pengelolaan 3R belum optimal
5	Masih rendahnya investasi dunia usaha ataupun pihak swasta

Sumber : FGD Pokja Sanitasi Kab Grobogan 2016

## **B. Pembobotan**

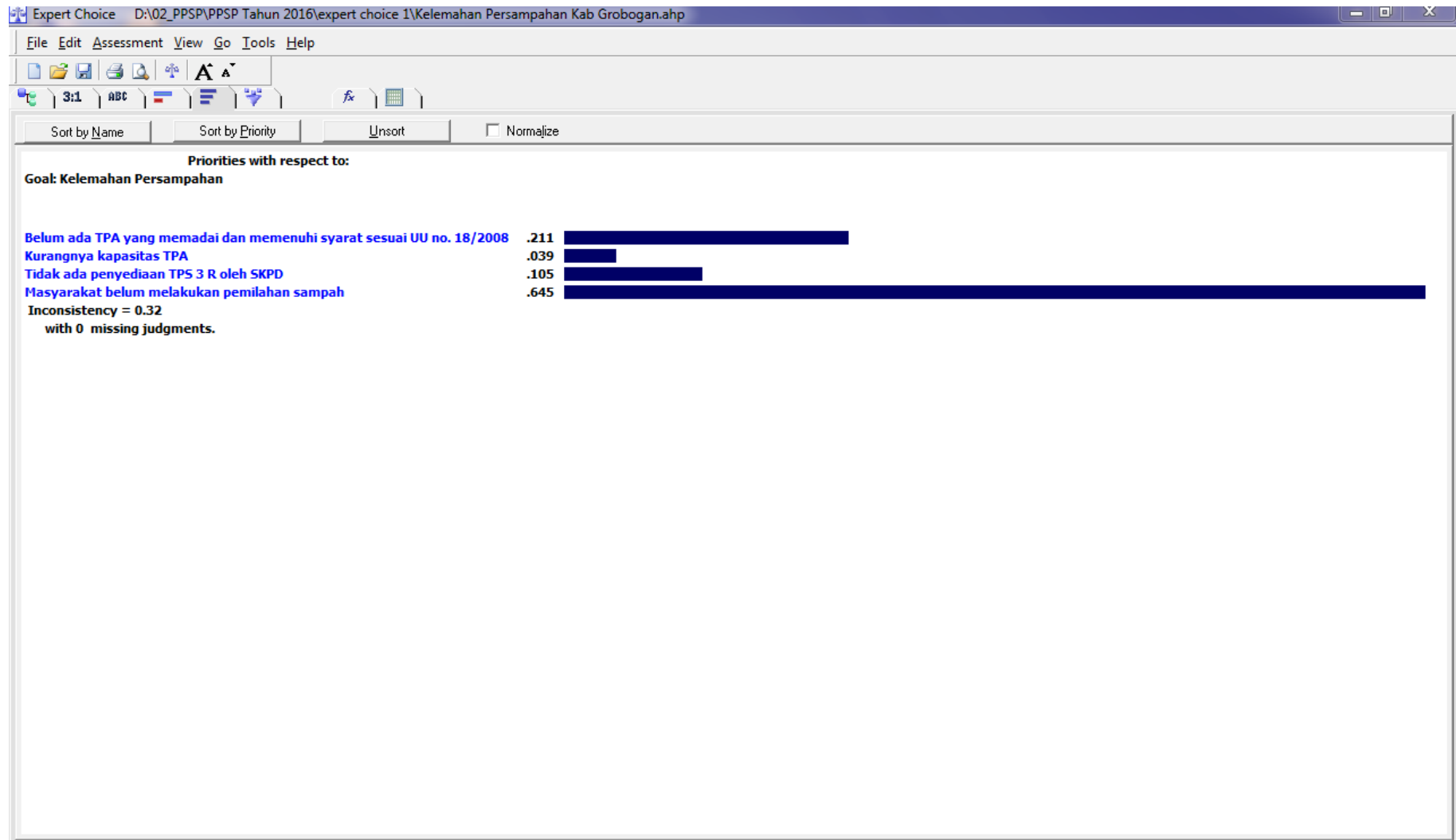
Pembobotan dilakukan dengan cara melakukan FGD untuk melakukan pembobotan dengan menggunakan software *expert choice*, Adapun hasil pembobotan adalah sebagai berikut :

## 5. Pembobotan Kekuatan

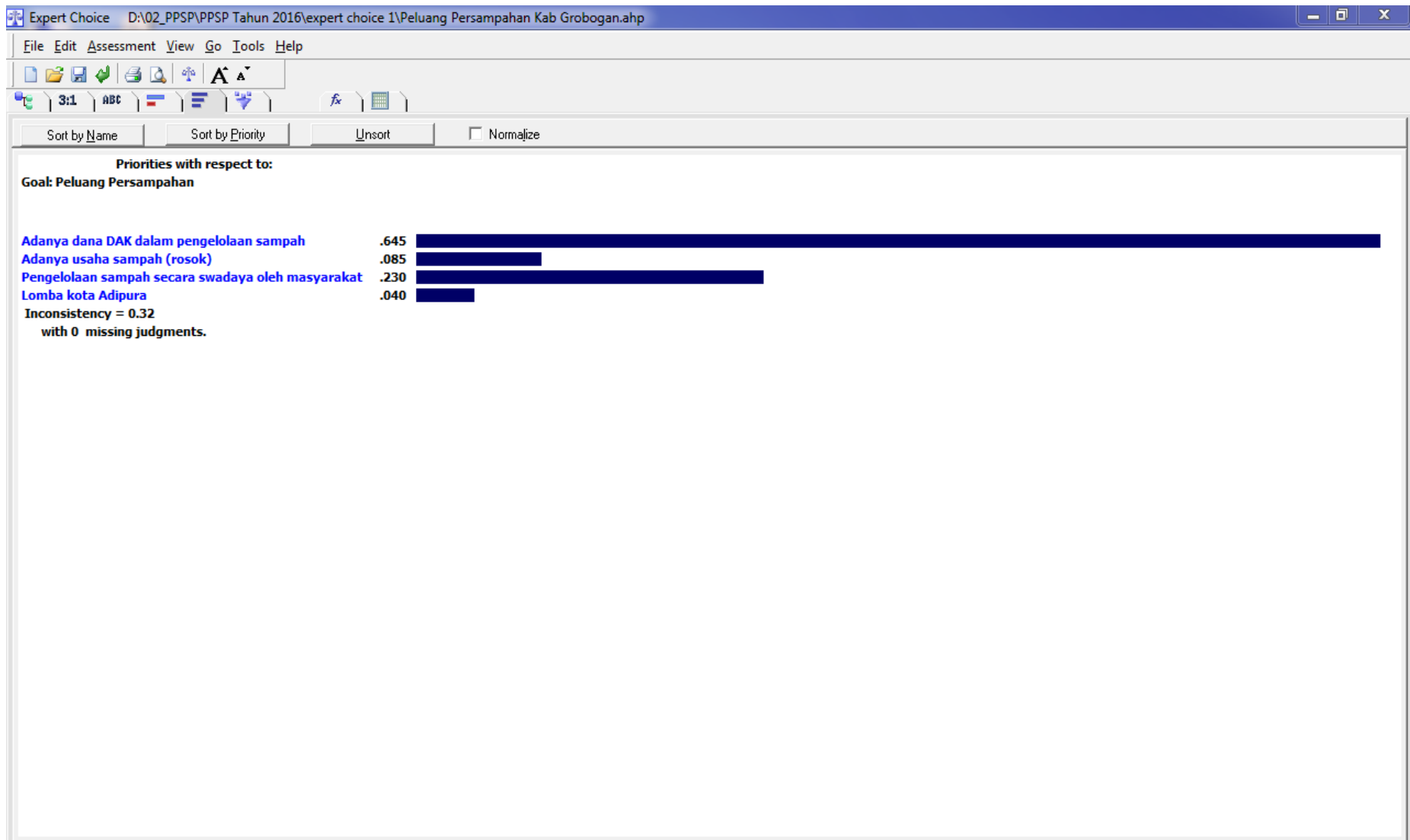




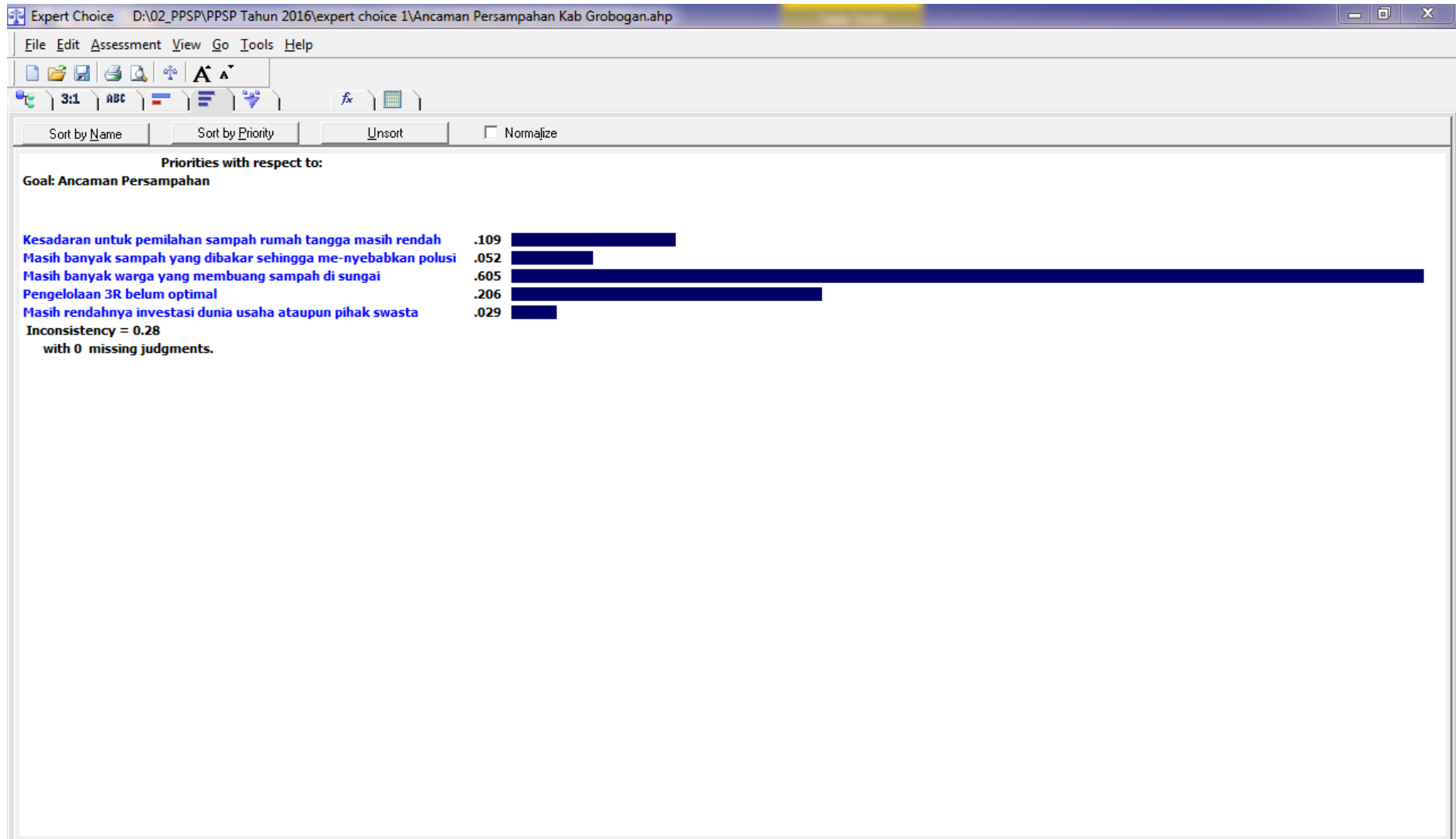
## 6. Pembobotan Kelemahan



## 7. Pembobotan Peluang



## 8. Pembobotan Ancaman

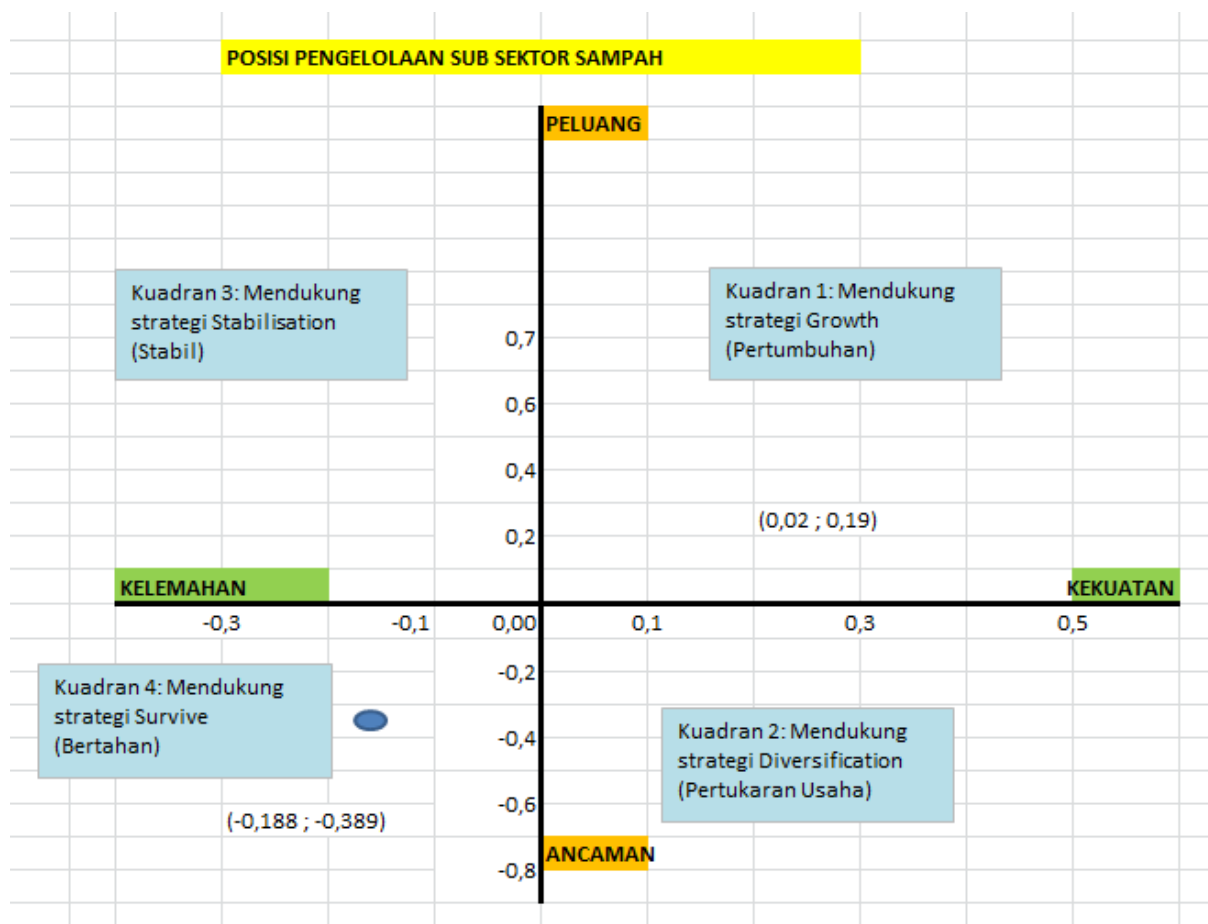


### C. Pembuatan matrik IFAS dan EFAS

NO	ELEMEN	BOBOT	TINGKAT PENGARUH	PERKALIAN BOBOT DAN TINGKAT PENGARUH	KET
<b>INTERNAL FACTOR ANALYSIS SUMMARY (IFAS)</b>					
<b>KEKUATAN (STRENGTH)</b>					
1	Sudah Memiliki TPA	27.60%	4	1.104	
2	Sudah ada Perda pengelolaan sampah	41.30%	4	1.652	
3	Sudah ada retribusi/ jasa umum mengenai sampah	4.10%	3	0.123	
4	Sudah ada SKPD yang mengelola sampah	7.70%	3	0.231	
5	Tersedianya dana APBD untuk pengelolaan sampah	17.00%	3	0.510	
6	Ada KSM pengelola sampah	2.40%	2	0.048	
<b>Total</b>		<b>100%</b>		<b>3.668</b>	
<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>					
1	Belum ada TPA yang memadai dan memenuhi syarat sesuai UU no. 18/2008	21.10%	4	0.844	
2	Kurangnya kapasitas TPA	3.90%	3	0.117	
3	Tidak ada penyediaan TPS 3 R oleh SKPD	10.50%	3	0.315	
4	Masyarakat belum melakukan pemilahan sampah	64.50%	4	2.580	
<b>Total</b>		<b>100%</b>		<b>3.856</b>	
Selisih Kekuatan dan Kelemahan				<b>-0.188</b>	
<b>EKSTERNAL FACTOR ANALYSIS SUMMARY (EFAS)</b>					
<b>PELUANG (OPPORTUNITY)</b>					
1	Adanya dana DAK dalam pengelolaan sampah	64.50%	3	1.935	
2	Adanya usaha sampah (rosok)	8.50%	3	0.255	
3	Pengelolaan sampah secara swadaya oleh masyarakat	23.00%	4	0.920	
4	Lomba kota Adipura	4.00%	2	0.080	
<b>Total</b>		<b>100%</b>		<b>3.190</b>	

NO	ELEMEN	BOBOT	TINGKAT PENGARUH	PERKALIAN BOBOT DAN TINGKAT PENGARUH	KET
<b>ANCAMAN (THREATH)</b>					
1	Kesadaran untuk pemilahan sampah rumah tangga masih rendah	10.90%	3	0.327	
2	Masih banyak sampah yang dibakar sehingga menyebabkan polusi	5.20%	3	0.156	
3	Masih banyak warga yang membuang sampah di sungai	60.50%	4	2.420	
4	Pengelolaan 3R belum optimal	20.60%	3	0.618	
5	Masih rendahnya investasi dunia usaha ataupun pihak swasta	2.90%	2	0.058	
<b>Total</b>		<b>100%</b>		<b>3.579</b>	
<b>Selisih Peluang dan Ancaman</b>				<b>-0.389</b>	

#### D. Membuat kuadran posisi pengelolaan sub sektor Persampahan



#### E. Matrik Strategi SWOT

Berdasarkan hasil analisis SWOT, posisi pengelolaan persampahan masuk di kuadran IV, sehingga strategi yang direkomendasikan adalah strategi Kelemahan (Weakness) dan Ancaman (Threat) atau dikenal dengan strategi WT, yaitu bertahan dalam menghadapi kelemahan dan ancaman.

**Tabel 4.4 Matrik strategi pengelolaan persampahan**

No	Strategi
1	Meningkatkan peran serta masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai ataupun dibakar maka tetap menggunakan TPA ada dengan sosialisasi/ Promosi/Lomba Lingkungan Bersih Sehat
2	Mengoptimalkan 3R (pemilahan) agar sampah yg masuk ke TPA dapat di kurangi
3	Mempromosikan masterplan persampahan agar menarik pihak swasta
4	Mengajukan TPS 3 R oleh SKPD agar kesadaran masyarakat untuk pemilahan sampah rumah tangga muncul
5	Peningkatan SDM SKPD Pengelola Persampahan

### 4.3 PENGELOLAAN DRAINASE

Kondisi geografis Kabupaten Grobogan sangat rentan terhadap terjadinya genangan, terutama pada musim hujan. Dengan adanya Sungai Lusi dan Tuntang menyebabkan resiko terjadinya genangan, terutama akibat limpasan air sungai pada musim hujan. Hal ini ditambah dengan aliran air drainase kurang berjalan dengan lancar. Dengan melihat hal tersebut, Pokja Sanitasi/AMPL telah membuat isu – isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan drainase di Kabupaten Grobogan.

#### A. Identifikasi isu – isu strategis

POKJA AMPL telah membuat daftar isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pengelolaan drainase. Adapun isu – isu pengelolaan drainase adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Isu – Isu strategis pengelolaan drainase**

NO	ELEMEN
<b>INTERNAL FACTOR ANALYSIS SUMMARY (IFAS)</b>	
<b>KEKUATAN (STRENGTH)</b>	
1	Drainase sudah ditangani oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
2	Tersedianya dana anggaran APBD
3	Sudah ada jaringan primer dan sekunder
4	Sudah ada SDM bidang drainase
5	Adanya dokumen RPJMD sektor drainase
<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>	
1	Saluran air belum ideal sehingga terjadi sedimentasi diselokan
2	Pada umumnya, sitem drainase masih menjadi satu antara pembuangan air hujan dan saluran limbah rumah tangga (grey water)
3	Kurangnya sosialisasi dan kampanye tentang pengelolaan drainase
4	Area cakupan yang luas terbentur dengan SDM yang ada di Dinas Cipkataru
5	Informasi mengenai saluran yang rusak belum optimal
6	Kualitas SDM kurang
7	Anggaran masih rendah
<b>EKSTERNAL FACTOR ANALYSIS SUMMARY (EFAS)</b>	
<b>PELUANG (OPPORTUNITY)</b>	
1	Adanya swadaya masyarakat membangun drainase
2	Adanya program 100 - 0 - 100
3	Bantuan Sarpras dari swasta
4	Partisipasi masyarakat dalam perawatan drainase

NO	ELEMEN
5	Adanya dana APBD untuk drainase
	<b>ANCAMAN (THREATH)</b>
1	Masyarakat membuang sampah di saluran drainase
2	Banjir dan genangan yang terjadi setiap tahun
3	Kepedulian masyarakat dalam memelihara saluran drainase kurang
4	Bangunan diatas drainase
5	Daya dukung drainase dengan air yg masuk tidak memadai
6	Pemukiman tidak memiliki saluran drainase

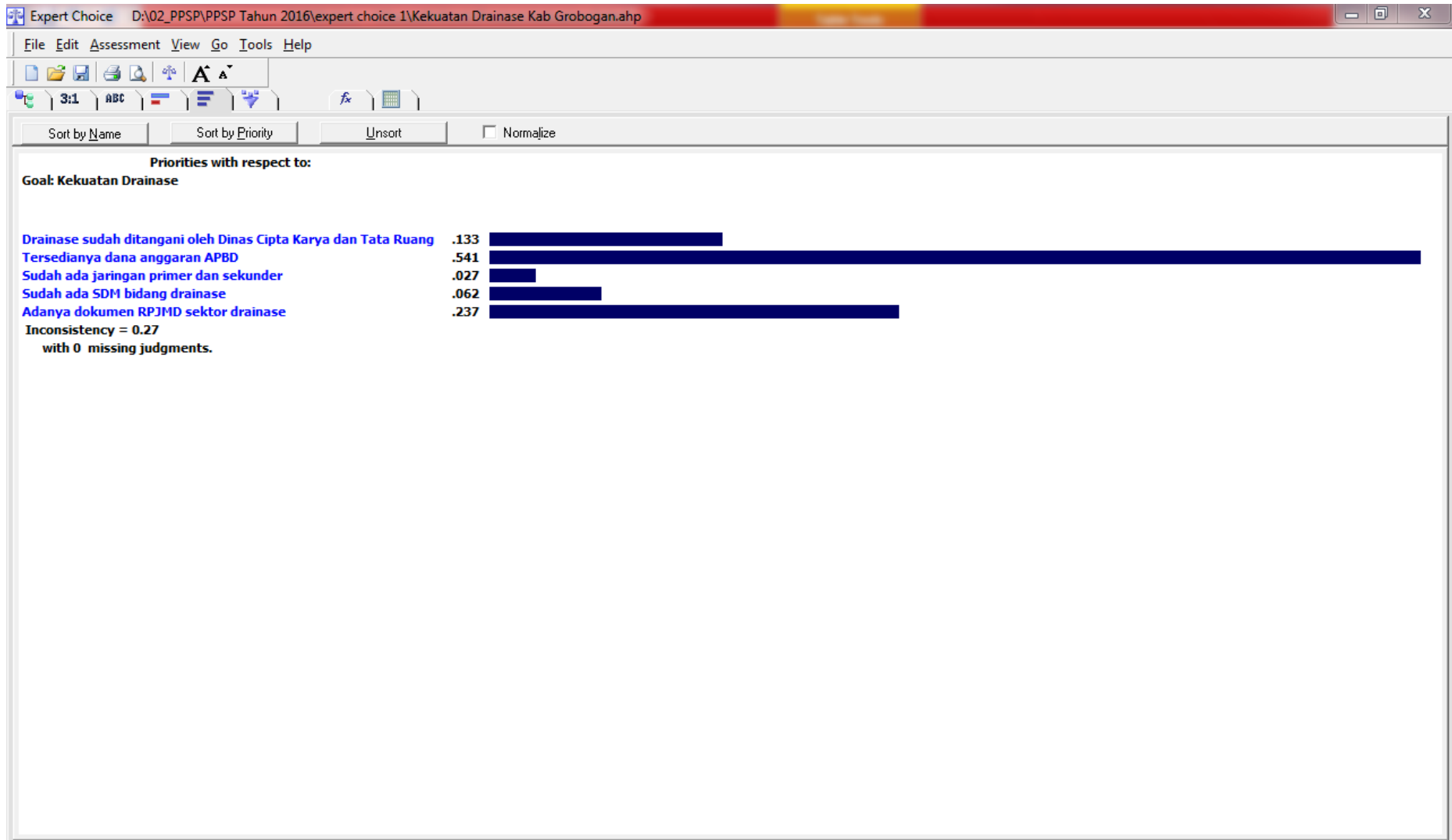
Sumber : FGD Pokja Sanitasi/AMPL 2016

#### F. Pembobotan

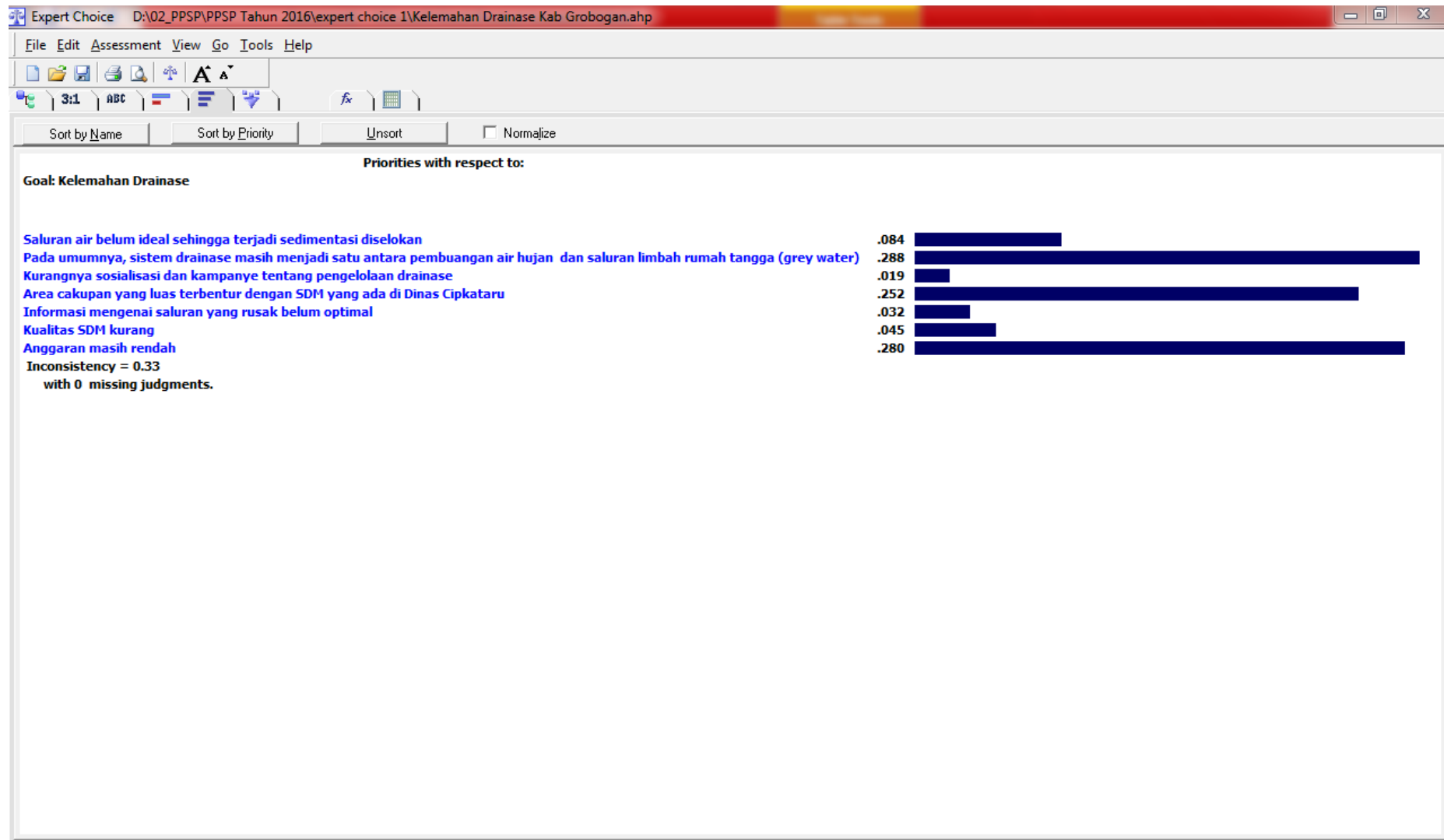
Pembobotan dilakukan dengan cara melakukan FGD untuk melakukan pembobotan dengan menggunakan *softwhare expert choice*, Adapun hasil pembobotan adalah sebagai berikut :



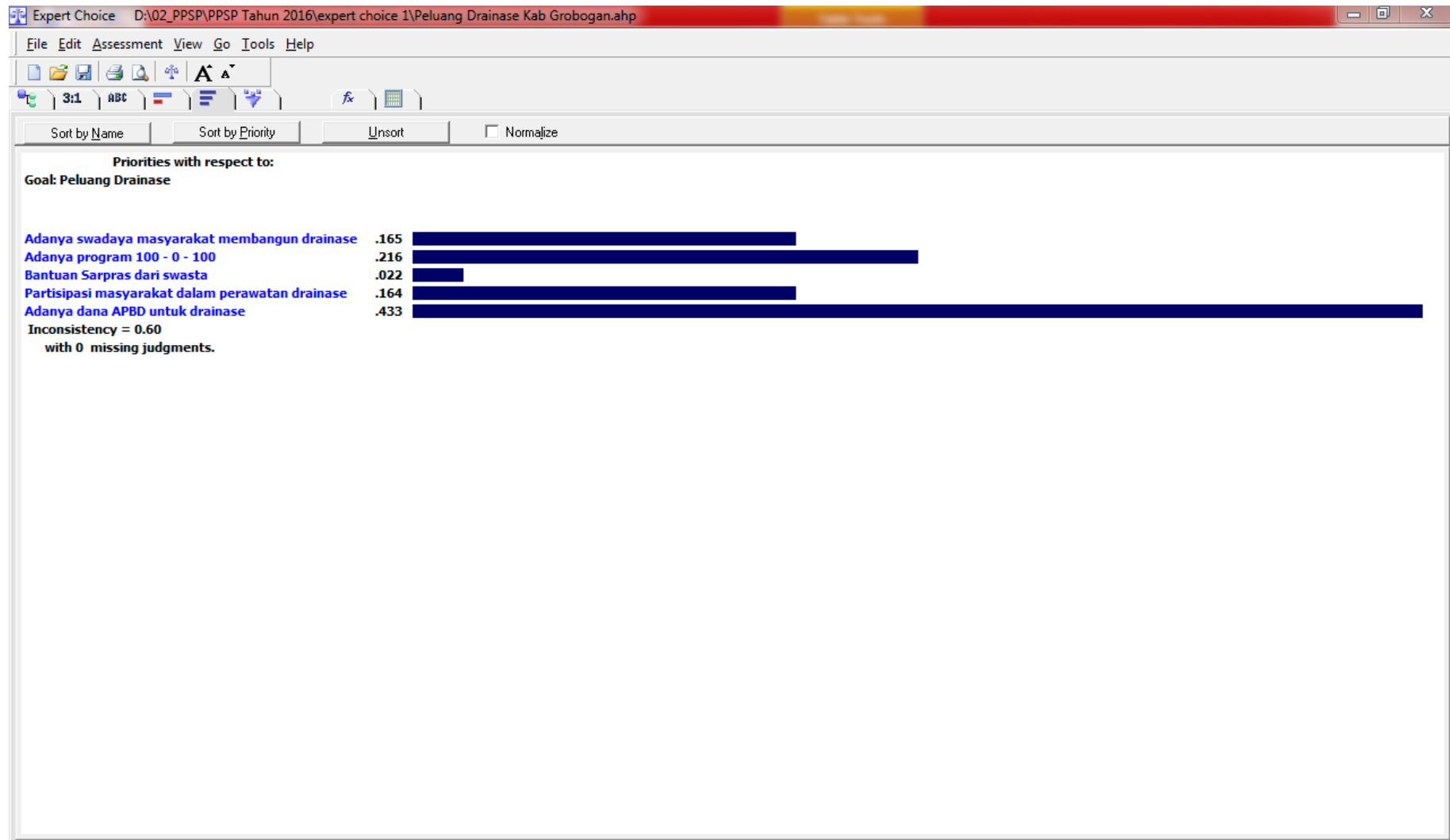
## 9. Pembobotan Kekuatan



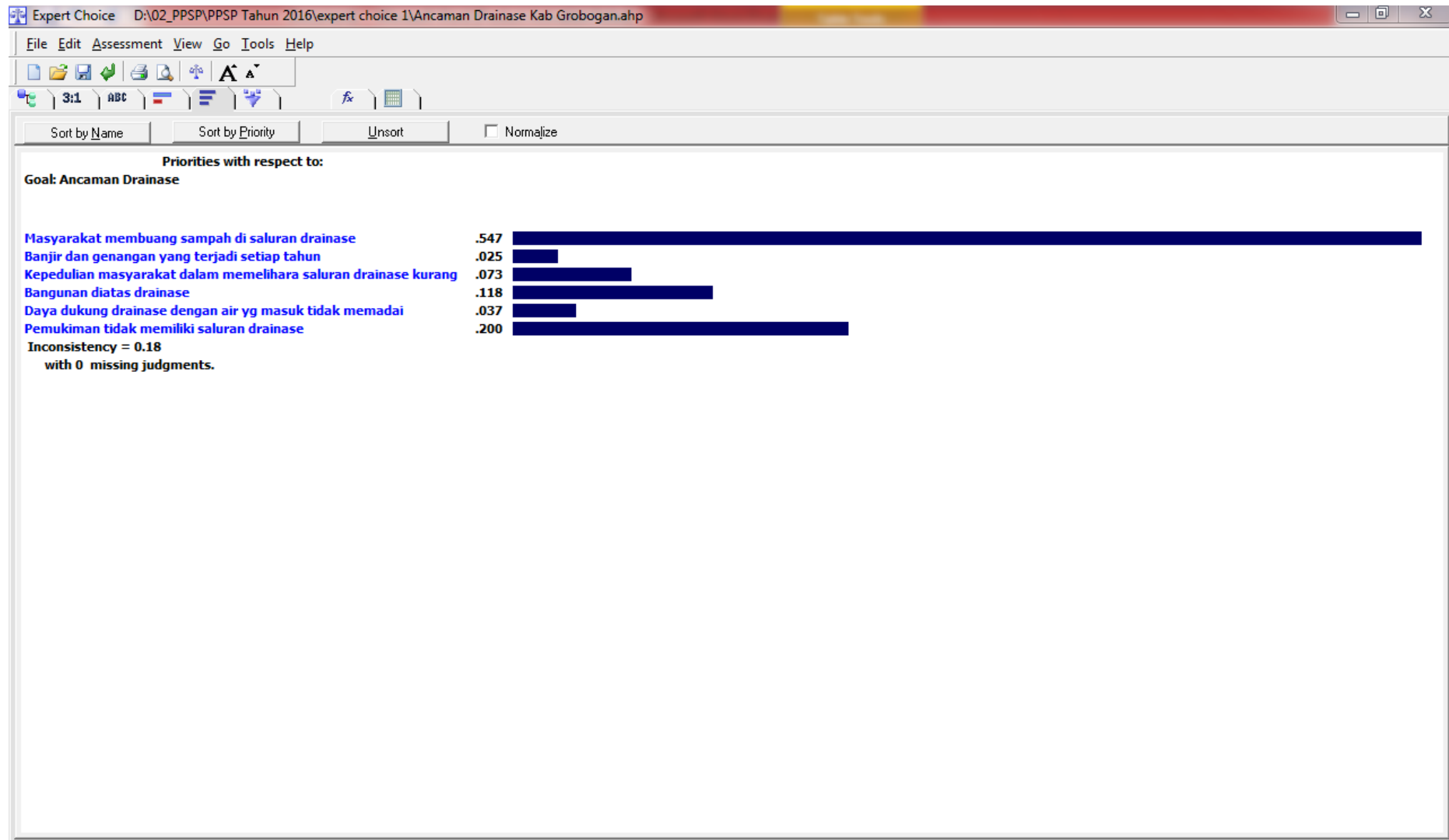
## 10. Pembobotan Kelemahan



## 11. Pembobotan Peluang



## 12. Pembobotan Ancaman

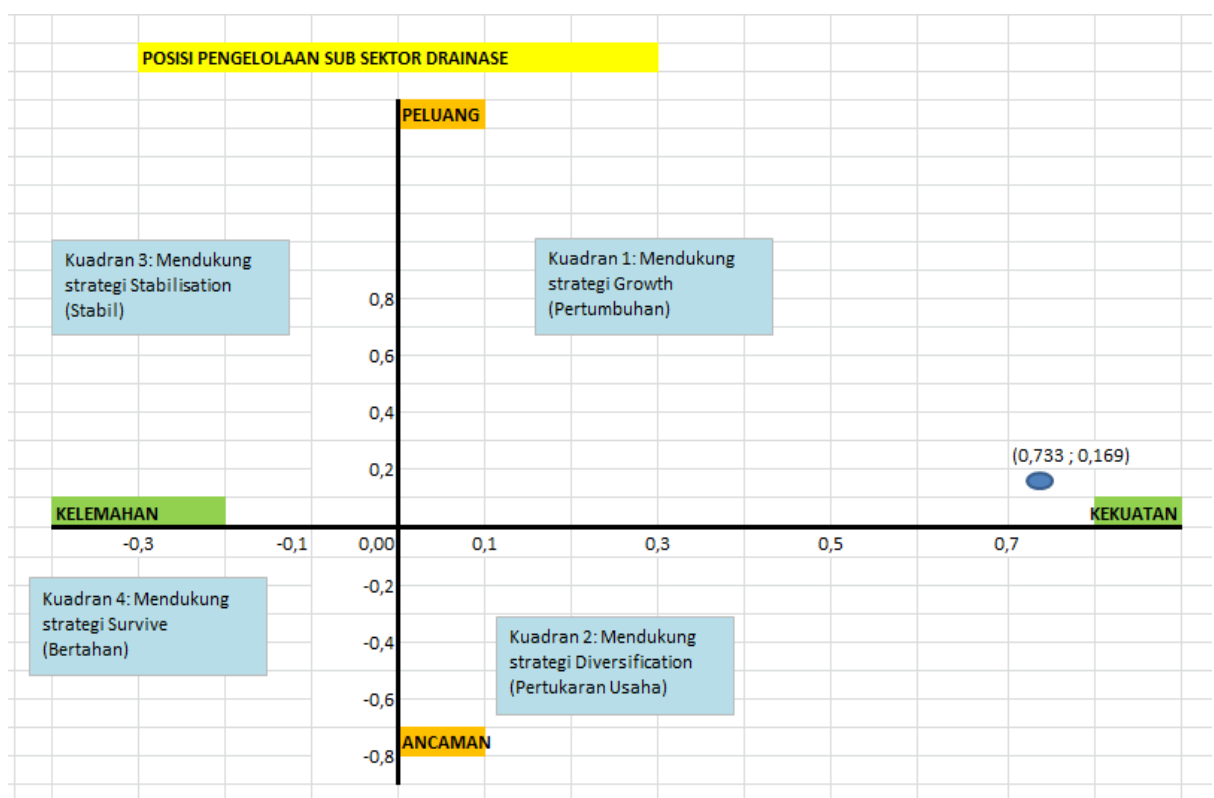


### G. Pembuatan matrik IFAS dan EFAS

NO	ELEMEN	BOBOT	TINGKAT PENGARUH	PERKALIAN BOBOT DAN TINGKAT PENGARUH	KETERANGAN
<b>INTERNAL FACTOR ANALYSIS SUMMARY (IFAS)</b>					
<b>KEKUATAN (STRENGTH)</b>					
1	Drainase sudah ditangani oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	13.30%	4	0.532	
2	Tersedianya dana anggaran APBD	54.10%	4	2.164	
3	Sudah ada jaringan primer dan sekunder	2.70%	3	0.081	
4	Sudah ada SDM bidang drainase	6.20%	3	0.186	
5	Adanya dokumen RPJMD sektor drainase	23.70%	3	0.711	
<b>Total</b>		<b>100%</b>		<b>3.674</b>	
<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>					
1	Saluran air belum ideal sehingga terjadi sedimentasi diselokan	8.40%	3	0.252	
2	Pada umumnya, sistem drainase masih menjadi satu antara pembuangan air hujan dan saluran limbah rumah tangga (grey water)	28.80%	2	0.576	
3	Kurangnya sosialisasi dan kampanye tentang pengelolaan drainase	1.90%	2	0.038	
4	Area cakupan yang luas terbentur dengan SDM yang ada di Dinas Cipkataru	25.20%	3	0.756	
5	Informasi mengenai saluran yang rusak belum optimal	3.20%	2	0.064	
6	Kualitas SDM kurang	4.50%	3	0.135	
7	Anggaran masih rendah	28.00%	4	1.120	
<b>Total</b>		<b>100%</b>		<b>2.941</b>	
Selisih Kekuatan dan Kelemahan				<b>0.733</b>	
<b>EKSTERNAL FACTOR ANALYSIS SUMMARY (EFAS)</b>					
<b>PELUANG (OPPORTUNITY)</b>					
1	Adanya swadaya masyarakat membangun drainase	16.50%	4	0.660	
2	Adanya program 100 - 0 - 100	21.60%	3	0.648	
3	Bantuan Sarpras dari swasta	2.20%	3	0.066	
4	Partisipasi masyarakat dalam perawatan drainase	16.40%	4	0.656	
5	Adanya dana APBD untuk drainase	43.30%	4	1.732	

NO	ELEMEN	BOBOT	TINGKAT PENGARUH	PERKALIAN BOBOT DAN TINGKAT PENGARUH	KETERANGAN
<b>Total</b>		<b>100%</b>		<b>3.762</b>	
<b>ANCAMAN (THREATH)</b>					
1	Masyarakat membuang sampah di saluran drainase	54.70%	4	2.188	
2	Banjir dan genangan yang terjadi setiap tahun	2.50%	3	0.075	
3	Kepedulian masyarakat dalam memelihara saluran drainase kurang	7.30%	2	0.146	
4	Bangunan diatas drainase	11.80%	2	0.236	
5	Daya dukung drainase dengan air yg masuk tidak memadai	3.70%	4	0.148	
6	Pemukiman tidak memiliki saluran drainase	20.00%	4	0.800	
<b>Total</b>		<b>100%</b>		<b>3.593</b>	
Selisih Peluang dan Ancaman				<b>0.169</b>	

#### H. Membuat kuadran posisi pengelolaan sub sektor Drainase



## I. Matrik strategi SWOT

Berdasarkan hasil analisis SWOT, posisi pengelolaan drainase masuk di kuadran I, sehingga strategi yang direkomendasikan adalah strategi kekuatan (strength) dan Peluang (Opportunity) atau dikenal dengan strategi SO, yaitu gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

**Tabel 4.6 Matrik strategi pengelolaan drainase**

No	Strategi
1	Meningkatkan peran serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sehingga program 100-0-100 dapat terlaksana
2	Meningkatkan komitmen pendanaan dana anggaran APBD untuk memperbaiki jaringan drainase primer maupun sekunder
3	Mengoptimalkan kinerja SDM bidang drainase sehingga dapat melakukan perawatan drainase
4	Mengimplementasikan target kinerja, program dan kegiatan yang sudah tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan sektor drainase
5	Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan drainase
6	Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD lintas sektoral, lintas kewenangan(Dinas Cipta Karya, Dinas Pengairan, PSDA Jawa Tengah, BBWS Pemali Juwana) dalam pengelolaan drainase

# BAB V

## PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017-2021, baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, PHLN, swasta/CSR dan masyarakat) maupun jenis kegiatan (air limbah, persampahan, dan drainase), Kabupaten.

Untuk rekapitulasi anggaran sanitasi Kabupaten Grobogan berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, PHLN, swasta/CSR dan masyarakat) dapat dilihat pada tabel 5.1. dan 5.2. dibawah ini.

### 5.1. Ringkasan

**Tabel 5.1. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun**

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	27,128.50	25,674.50	34,643.50	30,447.50	17,020.00	134,914.00
2	Persampahan	22,620.00	35,255.88	19,370.00	3,580.00	1,510.00	82,335.88
3	Drainase	6,245.00	1,540.00	1,575.00	0	0	9,360.00
<b>Jumlah (a)</b>		55,993.50	62,470.38	55,588.50	34,027.50	18,530.00	226,609.88
Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi (b)		55,993.50	62,470.38	55,588.50	34,027.50	18,530.00	226,609.88
Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi (c)		55,993.50	62,470.38	55,588.50	34,027.50	18,530.00	226,609.88
Gap 1 (a-b)		0	0	0	0	0	0
Gap 2 (a-c)		0	0	0	0	0	0

X Rp. 1 Juta

Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Grobogan 2016



**Tabel 5.2. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran**

X Rp. 1 Juta

No.	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
<b>A.</b>	<b>Pemerintah</b>						
1	APBD Kab/Kota	18,775.97	14,151.85	16,109.47	7,320.30	4,450.00	60,807.58
2	APBD Provinsi	7,804.17	8,224.17	4,656.17	1,815.50	70.00	22,570.00
3	APBN	19,176.53	30,178.53	25,307.03	14,304.20	4,769.00	93,735.30
Jumlah A		45,756.67	52,554.55	46,072.67	23,440.00	9,289.00	177,112.88
<b>B.</b>	<b>Non-Pemerintah</b>						
1	CSR Swasta	0	0	0	0	0	0
2	Masyarakat	9,998.50	10,012.50	10,012.50	10,012.50	9,861.00	49,897.00
Jumlah B		9,998.50	10,012.50	10,012.50	10,012.50	9,861.00	49,897.00
Total (A + B)		55,993.50	62,470.38	55,588.50	34,027.50	18,530.00	226,609.88

Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Grobogan 2016

## 5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah

Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Grobogan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017-2021, berdasarkan sumber anggaran pemerintah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN).

**Tabel 5.3. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten**

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	7,380.30	4,755.30	5,927.80	4,728.30	3,178.00	25,969.70
2	Persampahan	8,455.67	7,856.55	8,606.67	2,592.00	1,272.00	28,782.88
3	Drainase	2,940.00	1,540.00	1,575.00	-	-	6,055.00
Jumlah		18,775.97	14,151.85	16,109.47	7,320.30	4,450.00	60,807.58

Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Grobogan 2016

**Tabel 5.4. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi**

X Rp. 1 Juta

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	25.50	325.50	2,002.50	1,295.50	-	3,649.00
2	Persampahan	4,473.67	7,898.67	2,653.67	520.00	70.00	15,616.00
3	Drainase	3,305.00	-	-	-	-	3,305.00
Jumlah		7,804.17	8,224.17	4,656.17	1,815.50	70.00	22,570.00

Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Grobogan 2016

**Tabel 5.5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN**

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	9,779.20	10,581.20	16,700.70	14,136.20	4,601.00	55,798.30
2	Persampahan	9,397.33	19,597.33	8,606.33	168.00	168.00	37,937.00
3	Drainase	-	-	-	-	-	-
Jumlah		19,176.53	30,178.53	25,307.03	14,304.20	4,769.00	93,735.30

Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Grobogan 2016

**Tabel 5.6. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK**

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	9,779.20	10,581.20	16,700.70	14,136.20	4,601.00	55,798.30
2	Persampahan	9,397.33	19,597.33	8,606.33	168.00	168.00	37,937.00
3	Drainase	-	-	-	-	-	-
Jumlah		19,176.53	30,178.53	25,307.03	14,304.20	4,769.00	93,735.30

Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Grobogan 2016

### 5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Grobogan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017 - 2021, berdasarkan sumber anggaran non-pemerintah (Swasta/CSR dan masyarakat).

**Tabel 5.7. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR**

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	0	0	0	0	0	0
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
3	Drainase	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	00	0	0	0	0

Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Grobogan 2016

**Tabel 5.8. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat**

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	9,998.50	10,012.50	10,012.50	10,012.50	9,861.00	49,897.00
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
3	Drainase	0	0	0	0	0	0
Jumlah		9,998.50	10,012.50	10,012.50	10,012.50	9,861.00	49,897.00

Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Grobogan 2016

#### 5.4. Antisipasi Funding Gap

*Funding-Gap* merupakan selisih antara jumlah anggaran yang dibutuhkan dikurangi dengan jumlah dana yang tersedia.

Untuk rekapitulasi anggaran *Funding-Gap* yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Grobogan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017 - 2021, dapat dilihat pada table 5.9. di bawah ini.

**Tabel 5.9. Funding Gap**

X Rp. 1 Juta

No	Uraian	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	27,128.50	25,674.50	34,643.50	30,447.50	17,020.00	134,914.00
2	Persampahan	22,620.00	35,255.88	19,370.00	3,580.00	1,510.00	82,335.88
3	Drainase	6,245.00	1,540.00	1,575.00	0	0	9,360.00
4	Daftar Tunggu (Funding Gap)	170,016.072	147,058.289	214,026.075	132,780.484	216,768.582	880,649.501
5	Kebutuhan Pendanaan Sanitasi	55,993.500	62,470.380	55,588.500	34,027.500	18,530.000	226,609.880
6	Gap (%)	0	0	0	0	0	0

Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Grobogan 2016

# BAB VI

## MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Proses monitoring dan evaluasi merupakan pengendalian yakni bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. *Monitoring* atau pemantauan dapat mempermudah kita dalam mengamati terus-menerus trend dan masalah, dan bila perlu melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu. *Evaluasi* tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil-hasil program, tetapi juga dapat menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa, dan bagaimana implementasi program meleset dari rencana semula dan kemudian menyajikan rekomendasi untuk mengatasi masalah itu. Monitoring dan evaluasi dapat dipakai mengidentifikasi dan mengatasi masalah.

Monitoring dan evaluasi juga penting dalam upaya untuk merekam temuan, inovasi, hasil, dan praktik, baik untuk disebarluaskan serta dimanfaatkan pihak dan daerah lain dan juga sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan.

Hasil monitoring adalah simpulan-simpulan tentang ketepatan hasil dan waktu perencanaan sehingga wujud akhir dari hasil monitoring adalah berupa rekomendasi. Rekomendasi pada umumnya berkaitan dengan 3 hal yaitu pembenahan metode, percepatan proses dan perubahan pelaksanaan. Rekomendasi pembenahan metode pelaksanaan dilakukan jika dalam proses ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana.

Hasil evaluasi adalah simpulan-simpulan tentang tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Evaluasi efektivitas dilakukan untuk melihat ketepatan hasil melalui perbandingan hasil dengan target rencana. Sedangkan evaluasi efisiensi dilakukan untuk melihat tingkat kehematan pemanfaatan sumber daya melalui perbandingan realisasi pemanfaatan sumber daya dengan rencana pemanfaatan sumber daya.

### 6.1. Gambaran Umum Struktur Monitoring Dan Evaluasi Sanitasi

Monitoring dan evaluasi Kinerja Sanitasi memerlukan data dan informasi yang tepat waktu, akurat, relevan dan lengkap. Kegiatan monitoring diperlukan untuk mencatat perkembangan kondisi sanitasi, memantau proses dan kemajuan pelaksanaan kebijakan secara terus-menerus, mengidentifikasi masalah dan penyimpangan yang muncul, merumuskan pemecahan masalah, dan membuat laporan kemajuan secara rutin dalam kurun waktu yang pendek. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak program percepatan sanitasi permukiman sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Keberhasilan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu dilandasi oleh kejujuran, motivasi dan

kesungguhan yang kuat dari para pelaku. Selain itu, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program percepatan sanitasi permukiman adalah :

(1) Obyektif dan profesional

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat program percepatan sanitasi permukiman.

(2) Transparan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara terbuka dan dilaporkan secara luas melalui berbagai media yang ada agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah tentang informasi dan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi.

(3) Partisipatif

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan secara aktif dan interaktif para pelaku program percepatan sanitasi permukiman, termasuk masyarakat miskin.

(4) Akuntabel

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dapat dipertanggung-jawabkan secara internal maupun eksternal.

(5) Tepat waktu

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilakukan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

(6) Berkesinambungan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan.

(7) Berbasis indikator kinerja

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak

Tujuan pembangunan sanitasi tingkat Kabupaten telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten dan dinyatakan dalam sebuah dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Dokumen SSK juga mencantumkan target-target pembangunan sanitasi subsektor (air limbah, persampahan dan drainase) serta target aspek perilaku hidup bersih dan sehat. Strategi, kebijakan dan daftar panjang program dan kegiatan telah disiapkan dalam dokumen ini guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan sanitasi Kabupaten.

Dalam pelaksanaannya nanti, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk proses pelaksanaan SSK serta hasilnya guna melihat ketepatan penggunaan sumber daya baik keuangan maupun manusia. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SSK juga perlu dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas proses di kemudian hari. Pemantauan dan evaluasi SSK akan dilakukan untuk menilai capaian-capaian subsektor sanitasi dan aspek perilaku hidup bersih dan sehat.

Pemantauan atau juga dikenal sebagai *monitoring* bertujuan untuk :

1. Memverifikasi tingkat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan.
2. Mengidentifikasi capaian dan kelemahannya.
3. Menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk mengoptimalkan pencapaian.

Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pembangunan sanitasi. Hasil pemantauan dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan:

1. Kemajuan relatif capaian strategis pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati.
2. Bentuk usaha peningkatkan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi.
3. Kelembagaan untuk Pemantauan dan Evaluasi Sanitasi

Pemantauan dan evaluasi mulai dilakukan di bulan Januari 2015 atau setelah SSK diresmikan sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Grobogan dalam membangun sanitasi. Pemantauan dilakukan setiap tiga bulan yaitu di bulan Maret, Juni, September dan Desember. Kerangka waktu ini dipilih untuk menyelaraskan proses pemantauan dan evaluasi dengan alur perencanaan dan penganggaran daerah.

Pihak yang terlibat dalam pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut:

**Penanggungjawab Utama:**

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Wakil Ketua : Kepala Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana pada Bappeda.

**Pengumpul Data dan Dokumentasi:**

1. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda
2. Staf Bappeda

**Pengolah data/Pemantau :**

1. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
2. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) pada Dinas Kesehatan.
3. Kepala Seksi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Kantor Lingkungan Hidup.
4. Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB).
5. Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Informasi, HUMAS dan PDE

### ***Monitoring terkait pengambilan keputusan***

Tujuan utama sub-strategi ini adalah untuk menetapkan kerangka penyediaan informasi yang akurat dan berkala mengenai keluaran (produk) dan hasil (tahunan dan jangka menengah/lima tahunan) dari Rencana Tindak Strategi Sanitasi Kabupaten Grobogan. Mengukur dan memahami keluaran dan hasil kegiatan, dengan interval tahunan atau jangka menengah, penting artinya untuk menentukan apakah Kabupaten sudah mencapai target sanitasi, yang akhirnya akan memberikan kontribusi pada SSK; serta visi, misi, sasaran dan tujuan dari dokumen RPJMD, RPJMN dan MDGs. Selain itu, monitoring keluaran dan hasil dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan indikasi keberlanjutan layanan yang lebih baik, misalnya *monitoring* ini dapat mengatakan berapa banyak orang yang terhubung dengan sarana baru dan yang akan terhubung dalam kurun waktu tertentu.

Membandingkan keluaran dan hasil dengan biaya, juga membantu menentukan efisiensi proyek, dan membandingkannya dengan tujuan proyek membantu menentukan efektivitas proyek. Hasil pemeriksaan (audit) dari Inspektorat dapat digunakan untuk mengukur kuantitas dan kualitas keluaran kegiatan sanitasi berdasarkan target dan biaya yang ada. Hasil *monitoring* dianalisa dan disajikan dalam format khusus disampaikan kepada pengambil kebijakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk jangka pendek, menengah dan panjang.

Bappeda memfasilitasi kegiatan verifikasi dan konsolidasi laporan monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi, melalui Kelompok Kerja Sanitasi. Laporan tersebut akan disampaikan kepada semua Pemangku Kepentingan, sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan strategi, kebijakan dan program pembangunan sanitasi daerah, untuk kemudian diambil rekomendasi kebijakan untuk menyikapinya. Selanjutnya hasil-hasil monev dilaporkan kepada Bupati untuk kemudian dibahas bersama DPRD. Disamping itu laporan hasil-hasil monev disampaikan ke berbagai lembaga terkait, serta dipublikasikan kepada masyarakat luas.

### ***Monitoring pelaksanaan***

*Monitoring* pelaksanaan atau implementasi untuk melihat atau memantau atau sejauh mana kesesuaian rencana awal dengan hasil atau capaian investasi yang diberikan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat dengan keluaran yang dihasilkan dari proses tersebut, baik berupa fisik maupun non fisik, serta melihat masalah yang dihadapi pada saat implementasi.

*Monitoring* yang dilakukan terhadap pelaksanaan rencana tindak dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu (1) *monitoring* yang dilakukan dengan metode kunjung lapang atau biasa dikenal dengan pemeriksaan fisik, yang dilakukan oleh tim pemeriksaan yang terdiri dari beberapa SKPD yang dipimpin Bagian Pembangunan Kabupaten Grobogan, (2) *monitoring* yang dilakukan melalui dokumen pelaporan realisasi fisik dan keuangan masing-masing kegiatan diselenggarakan.

Data dan informasi yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan



pembangunan sanitasi diperoleh dari: (1) hasil laporan rutin seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan lembaga pelaksana kebijakan dan program; (2) hasil pendataan oleh Kantor Badan Pusat Statistik, dan lembaga pengumpul data lainnya; (3) hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat; (4) hasil pemberitaan media; dan (5) hasil laporan dari kelompok masyarakat.

### 6.1.1. *Monitoring strategi*

Evaluasi dilakukan untuk menemukan penyebab munculnya deviasi antara rencana tercantum dalam SSK dengan realisasi capaian. Untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, deviasi dapat dilihat dari jumlah kegiatan yang diusulkan dalam SSK dengan jumlah kegiatan yang diakomodasi SKPD. Disamping itu dapat dilihat pula dari perbandingan jumlah investasi dan keluaran kegiatan. Evaluasi capaian strategis dapat dilihat dari deviasi target dengan capaian sasaran sub-sektor sanitasi. Kegiatan evaluasi capaian strategis menggunakan data yang disarikan dari kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan capaian strategis pemerintah kabupaten. Meskipun begitu, evaluasi ini perlu memperhatikan kontributor diluar pemerintah Kabupaten yaitu swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, survei sanitasi seluruh kabupaten perlu dilakukan untuk menilai capaian beberapa indikator. Survei ini hendaknya dilakukan minimal setiap tahun sekali dan menggunakan metode yang sama. Evaluasi berkaitan dengan dampak dari dilaksanakannya kegiatan perlu dilakukan tersendiri dalam jangka waktu yang lebih panjang (5 tahunan).

### 6.2. Pengembangan Atau Penyusunan Indikator Input, Output, Dan Outcome

Pengembangan atau penyusunan indikator *input*, *output*, dan *outcome* berfungsi untuk menilai tingkat capaian tujuan dan sasaran pembangunan subsektor sanitasi dengan melihat indikator-indikator yang telah ditetapkan pada bab 3 yaitu tujuan, sasaran, serta tahapan pencapaian subsektor sanitasi. Adapun sasarannya adalah sebagaimana terlihat dalam matrik kerangka logis pada tabel 6.1 berikut:

**Tabel 6.1 Capaian Strategis**

Tahun 2016					
A. Air Limbah					
Tujuan: Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengurangan pencemaran air limbah guna tercapainya universal acces.					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Tercapainya Stop buang air besar sembarangan	19 Kecamatan	Penambahan akses baru: 0			

Tercapainya penambahan sarana MCK, IPAL komunal dan IPAL kawasan					
Terbentuknya lembaga di SKPD yang menangani pengelolaan limbah rumah tangga					
Optimalnya pengelolaan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)					

## B. Persampahan

Tujuan: Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan pada masyarakat

Rencana			Realisasi		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Meningkatkan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah	9 Kecamatan	Penambahan akses baru: 0			
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan persampahan permukiman	9 Kecamatan				
Meningkatkan kemampuan pengelolaan sampah, mulai dari SDM pengelola hingga ke sarana dan prasarana angkutan & TPS / TPA					
Diterapkannya teknologi pengelolaan persampahan yang berkelanjutan dan tepat guna oleh SKPD terkait dan masyarakat dengan pembangunan TPST3R					

## C. Drainase

Tujuan: Meningkatkan kapasitas jaringan drainase sebagai wujud pelayanan sanitasi, kewaspadaan dan pengendalian bencana banjir kepada masyarakat melalui penguatan program yang berbasis masyarakat.

Rencana			Realisasi		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Menurunkan genangan dengan optimalisasi pembangunan jaringan drainase	88 Desa/ Kel	Penambahan akses baru: 0			

**Tabel 6.2 Capaian Kegiatan**

Tahun 2016				
Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Realisasi Output	Belanja	Outcome
A. Air Limbah				
B. Persampahan				
C. Drainase				

**Tabel 6.3 Evaluasi**

**A. Air Limbah**

Sasaran	Rencana	Realisasi	Deviasi	Penyebab	Rekomendasi
Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengurangan pencemaran air limbah guna tercapainya universal acces					

## B. Persampahan

Sasaran	Rencana	Realisasi	Deviasi	Penyebab	Rekomendasi
Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan pada masyarakat					

## C. Drainase

Sasaran	Rencana	Realisasi	Deviasi	Penyebab	Rekomendasi
Meningkatkan kapasitas jaringan drainase sebagai wujud pelayanan sanitasi, kewaspadaan dan pengendalian bencana banjir kepada masyarakat melalui penguatan program yang berbasis masyarakat.					

### 6.3. Pengumpulan Dan Penyajian / Pelaporan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari upaya pemantauan pembangunan sanitasi. Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi data dan informasi kinerja kebijakan/program pembangunan sanitasi yang dapat memberikan gambaran status dan pencapaian upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terhadap sektor sanitasi.

Kegiatan Pengelolaan Pengumpulan Data dan Informasi meliputi :

- Optimalisasi fungsi Pokjasan bidang Monev sebagai kordinator pendataan lintas SKPD kunci;
- Optimalisasi bagian pendataan dan pemantauan setiap SKPD kunci untuk mendukung kegiatan monev;
- Penganggaran khusus kegiatan pendataan sekunder dan primer;
- Penetapan tim survei lapangan

Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pokja sanitasi, dapat berupa pengumpulan data dari program kegiatan yang telah disusun serta dari pengamatan langsung oleh SKPD. Pelaporan hasil akan menampilkan penyimpangan/deviasi capaian pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten terhadap rencana, faktor penyebab penyimpangan dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pokja berperan optimal dalam mengkoordinir, mengkompilasi, menganalisa dan menyusun laporan hasil *monitoring* dan evaluasi sektor sanitasi dengan didukung penuh oleh SKPD terkait sanitasi.

### **6.3.1. Pelaporan *Monitoring* dan Evaluasi Proses Perencanaan**

Pokja Sanitasi Kabupaten Grobogan akan memutuskan frekuensi dan jenis pelaporan yang diperlukan, setelah Pokja memutuskan instrumen yang digunakan. Pokja Sanitasi akan memberikan kesempatan kepada para *stakeholder* untuk memberikan umpan-balik yang mekanismenya dibuat fleksibel sesuai dengan karakteristik *monitoring* dan evaluasi proses perencanaan ini.

Selain dalam bentuk laporan, media massa cetak dan elektronik dapat juga digunakan untuk menyampaikan hasil *monitoring* dan evaluasi kepada masyarakat, sehingga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan sebagai umpan balik. Media lain yang dapat dimanfaatkan antara lain momentum peringatan atau pencanangan kegiatan yang berhubungan dengan sanitasi.

### **6.3.2. Pelaporan *Monitoring* dan Evaluasi Implementasi Program Sanitasi**

Laporan gabungan *monitoring* dan evaluasi implementasi pembangunan sanitasi disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab *monitoring* dan pelaporan semua kegiatan pembangunan di Kabupaten Grobogan. Bappeda selanjutnya menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan mendesiminasikannya kepada kepala SKPD lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan sanitasi. Pelaporan akan dilakukan triwulanan, semesteran dan tahunan sebagaimana mekanisme yang ada. Pemaparan hasil monev dilakukan, agar pemangku kepentingan dapat mengetahui posisi dan gambaran pelaksanaan SSK dalam waktu yang telah berjalan dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan

### **6.3.3. Pelaporan *Monitoring* dan evaluasi manfaat dan dampak Pembangunan Sanitasi**

Pelaporan *monitoring* dan evaluasi manfaat dan dampak pembangunan sanitasi akan disusun setiap dua tahun. Laporan ini menjelaskan status indikator dan kaitannya ini dengan kebijakan, strategi dan program nasional dan internasional. Pokja Sanitasi Kabupaten Grobogan akan mempertimbangkan bentuk laporan *monitoring* ini, seperti Buku SSK Kabupaten Grobogan yang aktual dengan pemutakhiran, atau berupa format baru Laporan Kondisi Sanitasi Kabupaten Grobogan. Hasil laporan akan menampilkan *progress report* yang telah dicapai hingga akhir tahun dan prediksi capaian pada tahap selanjutnya.

Tabel dibawah ini menggambarkan matrik dan prosedur pelaksanaan Monev Sanitasi Kabupaten Grobogan persubsektor berdasarkan konsep dan teknik.

**Tabel 6.4 Pelaporan Monev Implementasi SSK**

Obyek Pemantauan	Penanggung Jawab			Waktu Pelaksanaan	Pelaporan	
	Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data dan Dokumentasi	Pengolah Data/Pemantau		Penerima Laporan	Format
Pelaksanaan / Penanganan kegiatan air limbah	Dinas KLH Dinas Kesehatan	SKPD dan Pokja Sanitasi	Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja	Bulanan, Triwulan	Sekretariat Pokja Sanitasi (Dalbang)	Laporan Bulanan, Laporan Tiwulan, Laporan Akhir
Pelaksanaan / Penanganan kegiatan persampahan	Dinas KLH	SKPD dan Pokja Sanitasi	Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja	Bulanan, Triwulan	Sekretariat Pokja Sanitasi (Dalbang)	Laporan Bulanan, Laporan Tiwulan, Laporan Akhir
Pelaksanaan / Penanganan kegiatan drainase lingkungan	Dinas PU	SKPD dan Pokja Sanitasi	Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja	Bulanan, Triwulan	Sekretariat Pokja Sanitasi (Dalbang)	Laporan Bulanan, Laporan Tiwulan, Laporan Akhir
Pelaksanaan pemicuan STBM dan promosi PHBS	Dinas Kesehatan	SKPD dan Pokja Sanitasi	Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja	Bulanan, Triwulan	Sekretariat Pokja Sanitasi (Dalbang)	Laporan Bulanan, Laporan Tiwulan, Laporan Akhir

#### 6.4. Dokumentasi

Data-data yang akan digunakan untuk menentukan data dasar atau baseline indikator tujuan dan sasaran subsektor adalah data-data yang ada di SKPD masing-masing berupa: laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK), data hasil survey dan studi yang dilakukan di SKPD masing-masing. Pokja akan mendokumentasi semua data dan informasi yang masuk sebagai upaya untuk mengembangkan data base terkait sanitasi serta melakukan upload data di <http://ppsp.nawasis.info/>

#### **6.4.1. Dokumentasi Hasil Monev**

##### **A. Bentuk dokumentasi**

Bentuk dokumentasi selain berupa hard copy seperti foto cetak dan isian kuesioner juga berupa soft copy dalam bentuk CD dan flashdisk.

##### **B. Penanggung jawab**

Penanggung jawab kegiatan dokumentasi adalah Pokjasa yang dipimpin oleh Bappeda.

##### **C. Sarana dokumentasi**

Sarana dokumentasi yang digunakan tidak hanya bersifat manual tetapi juga menggunakan sarana komputasi.

#### **6.4.2. Distribusi Informasi**

##### **i. Arus distribusi monev**

Arus distribusi monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut :

- Kepada Kepala SKPD kunci berupa laporan monev masukan, kegiatan (proses), keluaran;
- Kepada Bupati/Walikota/DPRD berupa laporan monev masukan, keluaran, hasil dan dampak;
- Kepada Pemerintah Provinsi berupa laporan keluaran, hasil dan dampak.
- Kepada Pemerintah Pusat (TTPS) berupa laporan masukan, keluaran, hasil dan dampak.

##### **ii. Sarana distribusi informasi**

Sarana pendistribusian monitoring dan evaluasi tidak hanya melalui media cetak, tetapi juga bisa menggunakan sarana email dan web site Pemerintah Kabupaten Grobogan. Hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi menjadi hak publik yang dapat diakses secara terbuka, cepat dan mudah. Oleh sebab itu, hasil laporan monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi perlu didesiminasikan kepada para pengambil keputusan, media massa dan masyarakat luas melalui berbagai saluran informasi seperti media cetak, media elektronik.



## BUPATI GROBOGAN

### SAMBUTAN

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Waa ta'ala, karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan secara bersama-sama penyusunan buku **Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)** Kabupaten Grobogan Tahun 2017 - 2021.

Buku Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Grobogan Tahun 2017 - 2021 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana strategi sanitasi Kabupaten Grobogan baik yang bersifat teknis maupun non teknis, yang meliputi tiga sub sektor yaitu limbah cair, persampahan dan drainase. Data dan rencana strategi sanitasi tingkat kabupaten yang tersaji dalam buku ini diperoleh dari hasil diskusi untuk menyusun strategi bersama tingkat kabupaten dengan melibatkan seluruh SKPD di Kabupaten Grobogan yang menangani sanitasi.

Buku Strategi Sanitasi Kabupaten Grobogan tahun 2017 - 2021 ini disusun sebagai tindak lanjut penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Grobogan yang merupakan gambaran kondisi eksisting sarana dan prasarana maupun perilaku masyarakat terkait sanitasi. Buku Strategi Sanitasi Kabupaten Grobogan Tahun 2017 - 2021 merupakan pedoman bagi seluruh *stakeholder* terkait pengelolaan sanitasi Kabupaten Grobogan.

Segala upaya telah dilakukan untuk penyusunan Buku Strategi Sanitasi Kabupaten Grobogan Tahun 2017 -2021 ini, melalui proses penyusunan yang cukup panjang serta diwarnai oleh dinamika saling silang pendapat, argumentasi dan konsep-konsep pemikiran akademis maupun empiris antara unsur Pemerintah Daerah yang termasuk dalam SKPD yang menangani pembangunan di sektor Sanitasi, masyarakat dan *stakeholder* lainnya serta dibawah arahan dan pendampingan Tim Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah, Tim ProsDA – USDP, akhirnya proses penyusunan Buku Strategi Sanitasi Kabupaten Grobogan Tahun 2017 - 2021 dapat diselesaikan seperti yang diharapkan. Walaupun masih dirasakan terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami sangat mengharapkan saran dari berbagai pihak untuk dapat dijadikan masukan dalam penyempurnaan.

Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai acuan pemrioritasan program kerja dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang akan dilaksanakan lebih lanjut oleh SKPD terkait.



Selanjutnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan khususnya Pokja AMPL / TKK / Tim Teknis yang telah membantu penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Grobogan ini.

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan bimbingan serta kekuatan kepada kita semua sehingga pelaksanaan SSK ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan bermanfaat bagi kita semua khususnya masyarakat Kabupaten Grobogan.

Akhirnya, semoga buku Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Grobogan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah sehingga pengelolaan sanitasi Kabupaten Grobogan dapat terselenggara secara baik dan cita-cita Kabupaten Grobogan dapat terwujud secara baik. Amin.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Grobogan, Desember 2016  
BUPATI GROBOGAN,

Sri Sumarni, SH, MM

# KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perkenan-Nya, sehingga buku Strategi Sanitasi Kabupaten Grobogan (2017 – 2021) pada tahun ini dapat terselesaikan.

Maksud penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Grobogan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan Strategi Sanitasi Kabupaten agar dapat dijadikan rujukan perencanaan pembangunan sanitasi Kabupaten Grobogan jangka menengah (5 tahunan), sedangkan tujuan dari penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten adalah sebagai rencana pembangunan sanitasi dan sebagai pedoman pembangunan sanitasi mulai tahun 2017 hingga tahun 2021.

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan sanitasi Kabupaten Grobogan selama 5 tahun yaitu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, sebagai dasar/ acuan penyusunan strategi serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, penyusunan program jangka menengah dan tahunan, dan dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Grobogan.

Terima kasih diucapkan kepada Tim Pokja AMPL Kabupaten Grobogan, Tim Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah, Tim ProsDA – USDP serta pihak-pihak lainnya yang telah bekerja sama dalam penyusunan buku Strategi Sanitasi Kabupaten Grobogan 2017 – 2021. Kami berharap informasi yang terkandung dalam buku ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sanitasi Kabupaten Grobogan untuk mencapai visi sanitasi yaitu “Terwujudnya Sanitasi yang Mandiri, Berkeadilan & Berkelanjutan Menuju Masyarakat Grobogan Sehat dan Sejahtera Tahun 2017”.

Grobogan,      Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
SELAKU  
KETUA POKJA AMPL/SANITASI KABUPATEN GROBOGAN**

**SUGIYANTO, SH, MH  
NIP. 19610112 198711 1 003**